BICARA KESETARAAN GENDER DARI SUMATERA HINGGA PAPUA

KUMPULAN HASIL LIPUTAN PESERTA
KESETARAAN GENDER DALAM DUNIA KERJA 2018

“BICARA KESETARAAN GENDER
DARI SUMATERA HINGGA PAPUA”

KUMPULAN HASIL LIPUTAN PESERTA
KESETARAAN GENDER DALAM DUNIA KERJA 2018

Penulis:

KATEGORI CETAK

Supardi Bado - Media Totabuan, Ashri Isnaini - Pontianak Post
Andi Fauziah Astrid Abidin - Majalah Empati, Muhammad Kasim - Harian Suara NTB

KATEGORI ONLINE

Mustakim Ahmad - Metrotv.com, Alika Noor - Viva.co.id
Vessy Frizona - Suara.com, Ramah - kabarpapua.co
Yohanes Adrianus - nttonlinenow, Rachmawati - Kompas.com
Eni Muslihah - Kompas.com, Mega Dwi Anggraeni - Bandung Kiwari
Fitri Haryanti Harsono - Liputan6.com, Melki Pangaribuan - Satuharapan.com
Nurika Manan - KBR.ID

KATEGORI TV

Insany Syahbarwaty – INews TV Ambon, Sekar Sari Indah Cahyani – INews TV Lampung
Arik Tri Pangestuti - B-ONE TV, Agnes Thesia Sinambela - DAAI TV

Mentor

Bina Bektiati
Mustakim
Andi Muhyiddin

Penyelaras Akhir

Endah Lismartini
Febrina Galuh Permanasari
Putri Adenia

Penerjemah

Anita Rachman
Ulma Haryanto

Design and Layout

Robby Eebor

Cetakan Kedua: Desember 2018

ISBN: 978-979-3530-40-6

Penerbit:

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA
Jalan Sigura-gura no. 6A, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.
Tel. +62 21 2207 9779, Fax. +62 21 2207 9779
E-mail: sekretariat@ajiindonesia.or.id, Web: www.aji.or.id

Didukung oleh:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR AJI

Media Inggris The Guardian pada 13 September 2018 lalu memuat berita hasil jajak pendapat Young Women's Trust soal praktik diskriminasi di dunia kerja. Jajak pendapat itu menyimpulkan bahwa diskriminasi jender masih marak, dengan banyak wanita muda mengalami pelecehan seksual, merasa tidak aman dalam pekerjaannya, dan mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan dengan rekan prianya.

Hampir seperempat (23%) perempuan dalam jajak pendapat itu, yang berusia antara 16 dan 30, mengaku telah dilecehkan secara seksual di tempat kerja, tetapi hanya 8% yang melaporkannya. Sepertiga (31%) perempuan muda juga melaporkan adanya diskriminasi saat bekerja, atau sewaktu mencari pekerjaan. Satu dari lima (19%) responden mengatakan bahwa mereka dibayar lebih rendah daripada rekan pria mereka untuk pekerjaan yang sama atau serupa.

Kepala Eksekutif Young Women's Trust Dr Carole Easton mengatakan, perlakuan terhadap wanita muda di tempat kerja, pembayaran gajinya, serta kesejahteraannya jauh tertinggal di belakang pria muda. Carole mengatakan, sejumlah tantangan itu perlu diatasi dengan banyak tindakan nyata, bukan sekadar retorika. "Kita harus bergegas untuk perubahan: banyak hal telah dicapai dalam 100 tahun terakhir, tetapi jalan yang harus ditempuh masih panjang," kata dia.

Praktik diskriminasi seperti yang dilansir Young Women Trust itu juga merupakan praktik yang bisa kita temui di sekitar kita. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja, Sugeng Priyanto, usai membuka "2nd International Conference on

Indonesian Sosial and Political Enquiries (ICISPE)" di Semarang tahun lalu, menyatakan bahwa diskriminasi terhadap para tenaga kerja di Indonesia cukup tinggi, yaitu berkisar 30 persen.

Menurut Kementerian Tenaga Kerja, diskriminasi yang masih kerap terjadi berbagai macam, mulai pembayaran upah yang berbeda antara buruh laki-laki dan perempuan hingga kesempatan menduduki jabatan yang cenderung diskriminatif. Sugeng, seperti dilansir Republika 23 Oktober 2017, antara lain memberi contoh pekerja perempuan yang digaji lebih kecil dari laki-laki. Misalnya, pekerja laki-laki digaji Rp 2,6 juta/bulan, sementara perempuan Rp 2 juta/bulan.

Masih maraknya praktik diskriminasi itulah yang menjadi salah satu pertimbangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) dan Investing in Women (IW) menyelenggarakan lokakarya dengan tema "Kesetaraan Gender di Dunia Kerja". Selain lokakarya, juga ada pemberian fellowship liputan untuk tema tersebut.

Lokakaryanya, yang dilaksanakan pada 20 - 22 Juli 2018, diikuti jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuan dari lokakarya itu adalah meningkatkan pemahaman jurnalis mengenai gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan, selain membantu meningkatkan keterampilannya dalam membuat liputan yang menarik dan mudah dipahami publik. Jurnalis peserta lokakarya ini juga mendapatkan fellowship liputan.

Saat mengikuti fellowship liputan ini, para jurnalis tersebut mendapatkan mentoring dari tiga jurnalis senior: mantan editor Tempo, Bina Bektiati; editor Liputan6.com, Andi Muhyiddin; dan editor Viva.co.id, Mustakim. Melalui proses mentoring ini para peserta juga belajar secara langsung, dengan mendiskusikan kendala yang dihadapi saat peliputan atau memproduksi karyanya. Buku yang ada di tangan Anda ini adalah hasil liputan dari para peserta lokakarya dan fellowship tersebut.

Kami berterima kasih kepada IBCWE atas dukungannya dalam program yang sudah memasuki tahun kedua ini. Semoga

program ini bisa memberi perspektif yang baik bagi jurnalis dalam meliput isu diskriminasi, selain meningkatkan keterampiannya dalam membuat karya jurnalistik. Harapannya, para lulusan dari pelatihan ini bisa memiliki perspektif yang tepat sehingga bisa menghasilkan liputan soal isu kesetaraan gender yang bisa menjadi rujukan penting dan bermanfaat dalam perumusan kebijakan.

Jakarta, 30 Oktober 2018

Abdul Manan,
Ketua Umum AJI

PENGANTAR IBCWE

KESETARAAN GENDER MERUPAKAN JANTUNG SEBUAH PEKERJAAN YANG LAYAK

Pada Sidang Perburuhan Internasional (ILO) yang diselenggarakan di Jenewa, Swis, bulan Juni 2018 lalu, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, M. Hanif Dhakiri, menegaskan komitmennya dalam menjunjung kesetaraan gender, serta mencegah kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Sebagai bentuk penegasan komitmen ini, pemerintah sudah menjalankan beberapa program nasional, seperti pencanangan Gerakan Nasional Non-Diskriminasi di Tempat Kerja, penerbitan panduan kesetaraan upah laki-laki dan perempuan, serta membentuk gugus tugas *(task force)* kesetaraan upah.

Komitmen pemerintah ini perlu kita apresiasi, mengingat hingga saat ini, isu kesetaraan gender masih dianggap isu sosial dan belum dianggap sebagai isu ekonomi. Kenaikan partisipasi perempuan dinilai bisa menjadi salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus berperan dalam menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global.

Kesetaraan gender di dunia kerja belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Ketidaksetaraan gender, salah satunya disebabkan oleh adanya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat, seperti kesenjangan upah hingga preferensi pemilihan profesi. Akibatnya, peranan perempuan menjadi

terbatas dan potensinya belum tergali secara maksimal.

Tidak ada larangan bagi perempuan di Indonesia untuk bekerja, namun perempuan masih dinilai sebagai sumber kedua pencari penghasilan keluarga. Banyak perempuan muda yang sangat bersemangat saat mulai dalam bekerja. Namun kemudian harus berhenti bekerja saat menikah, hamil, dan melahirkan. Mengurus rumah tangga dipandang sebagai tugas utama perempuan. Peran sebagai seorang ibu sekaligus pekerjaan domestik rumah tangga selalu dibebankan kepada perempuan.

Kunci dari peningkatan partisipasi kerja perempuan adalah kesetaraan gender. Jadi, meskipun sudah sering diucapkan, namun yang terpenting adalah bagaimana penerapannya di lapangan. Bagaimana supaya isu kesetaraan gender benar-benar diterapkan di dalam kehidupan kerja di Indonesia. Kesetaraan gender masih menjadi masalah di dunia kerja. Banyak perusahaan belum memprioritaskan masalah ini, sehingga banyak perempuan sulit menyamai dominasi pria. Padahal, kesetaraan gender dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif hingga meningkatkan produktivitas.

Kesetaraan gender adalah jantung dari sebuah pekerjaan yang layak. Kesetaraan gender di tempat kerja menuntut kolaborasi diantara pengusaha dan karyawan. Memperjuangkan kesetaraan gender bukan berarti menuntut perempuan untuk menjadi sama dengan laki-laki, tetapi mendukung perempuan dan laki-laki agar mendapat kesempatan sama untuk membangun sinergi. Di tempat kerja yang layak, membuat perempuan bisa bekerja lebih nyaman dan menunjukkan seluruh potensi yang dimilikinya.

Isu gender sudah menjadi persoalan di hampir seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Isu ini bahkan menjadi salah satu topik bahasan diskusi dalam rangkaian acara IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali, Oktober 2018 lalu, yang menekankan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja. Istilah gender terus mengemuka dan menjadi komoditas yang sering digaungkan dalam berbagai tulisan di media masa.

Media merupakan agen perubahan yang sangat penting dalam

menangani isu kesetaraan gender khususnya di dunia kerja. Kesetaraan gender bukan semata-mata perjuangan perempuan semata, melainkan perjuangan bersama antara laki-laki dan perempuan untuk bisa sejajar. Peran media sangat penting karena berperan sebagai mediator, yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan penyampai pesan.

Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memberikan pelatihan kepada para jurnalis dengan topik "Kesetaraan Gender di Dunia Kerja". Langkah ini diharapkan bisa memperluas wawasan sekaligus memperbanyak liputan mengenai isu kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Kesetaraan gender bukanlah menjadi tujuan akhir, namun akan berfungsi sebagai pembuka jalan menuju kesuksesan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Menciptakan kesetaraan gender di lingkungan kerja harus dimulai dari diri kita sendiri. Manfaatkan kesempatan promosi di kantor. Jika kita berhasil mendobrak budaya yang selama ini menjadi tradisi, maka gap antara karyawan laki-laki dan perempuan akan hilang, sehingga bisa menciptakan suasana kerja yang sehat dan menyenangkan.

Maya Juwita
Direktur Eksekutif IBCWE

KATEGORI MEDIA CETAK

Nominasi:

Melihat Kiprah Kelompok Tani Gambut Perempuan Sungai Asam, Kubu Raya
ASHRI ISNAINI, *Pontianak Post*

Peluang Pemimpin Perempuan di Ruang Redaksi
ANDI FAUZIAH ASTRID ABIDIN, *Majalah Empati*

Nurbaya Sari, Kerinduan pada Perdamaian
MUHAMMAD KASIM, *Suara NTB*

Potret Buruh Wanita di Lumbung Beras Sulawesi Utara
SUPARDI BADO, *Media Totabuan*

Pemenang Terbaik:

Nurbaya Sari, Kerinduan pada Perdamaian
MUHAMMAD KASIM, *Suara NTB*

ASHRI ISNAINI - *Pontianak Post*
akrab dipanggil Ashri. Ia lahir di Pontianak, pada Maret 1985. Ashri lulus S-1 dari Administrasi Negara, Universitas Tanjungpura. Saat ini ia bekerja sebagai jurnalis di Pontianak Post dan tercatat sebagai anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak, Kalimantan Barat.

MELIHAT KIPRAH KELOMPOK TANI GAMBUT PEREMPUAN SUNGAI ASAM, KUBU RAYA

Ashri Isnaini, *Pontianak Post*

Banyaknya lahan gambut bekas kebakaran yang terbengkalai mengundang keprihatinan Emmy Shamiemah (37). Ia lalu merangkul sejumlah perempuan di Desa Sungai Asam, Kubu Raya untuk mengolah kembali lahan tersebut. Berbekal pengetahuan otodidak, ia bersama kelompoknya kemudian mulai menanam nanas. Bagaimana kisahnya?

MINGGU pertama Agustus lalu, Emmy bersama empat petani perempuan di Desa Sungai Asam tampak cekatan membersihkan lahan kebun nanas yang dikelolanya dengan cara manual tanpa bakar. Ada yang menebas dan ada pula yang menumbangkan rumput-rumput. Beberapa petani laki-laki turut membantu.

Sejak awal 2016 silam, dia bersama 10 petani perempuan lain di desa ini dipercaya pemerintah desa setempat mengelola sekitar tiga hektare lahan kosong sisa kebakaran lahan. “Sayang melihat banyak lahan terbakar dibiarkan, jadi saya putuskan untuk kembali mengelolanya dengan ditanami nanas,” kata Emmy.

Dari tiga hektare lahan yang diberikan, Emmy bersama rekan-rekannya efektif baru mengelola sekitar satu hektare. Hingga kini dia mengaku sudah empat kali panen. Hasilnya dua kali panen besar, dan dua kali panen yang hasilnya tak terlalu banyak. “Sempat hasil panen sedikit karena sebagian sempat terserang hama,”ucapnya.

Jika hasil tanaman tumbuh baik, sekali panen bisa menghasilkan sekitar 10 ribu buah nanas. Namun saat ada serangan hama, kelompok perempuan petani gambut ini hanya mampu menghasilkan sekitar 7.500 buah. Jika harga sedang stabil, nanas bisa dijual Rp2.000 per buah. Sementara di saat anjlok, harganya cuma Rp500 per buah.

Harga nanas bisa naik dan turun kapan saja. Karena itulah, Emmy bersama rekan-rekannya berinisiatif untuk membuat produk olahan seperti selai nanas, kue lapis, sirup, permen, es krim, kerupuk, dan dodol. Pembuatan produk turunan dari bahan baku nanas ini diyakini dapat memberikan nilai tambah.

Sebab mereka bisa menjual hasil produksinya tanpa khawatir harga anjlok. Saat sudah dapat pasar, hasilnya juga dinilai jauh lebih besar. Sejauh ini, Emmy mengaku kelompoknya masih memproduksi dalam skala kecil dan hanya memasarkan di tingkat desa. Kendalanya adalah keterbatasan alat dan tenaga. “Walau buatnya terbatas, saat lebaran banyak juga ibu rumah tangga pesan produk olahan nanas yang kami buat,” ujarnya.

Emmy sendiri berasal dari Madura. Sejak akhir 2014 lalu, ia memutuskan hijrah ke Sungai Asam karena ikut suami. Sebelumnya ia berprofesi sebagai guru honorer di salah satu SMP Negeri di Bangkalan selama 10 tahun. Profesi itu ia tinggalkan, meski dalam beberapa tahun ke depan ada kemungkinan diangkat menjadi PNS.

“Rezeki itu bisa dari mana saja, yang terpenting keluarga. Makanya saya putuskan ikut pindah ke kampung halaman suami di Desa Sungai Asam,” ujarnya.

Setelah setahun tinggal di Sungai Asam, tepatnya pada tahun 2015, Emi kaget melihat maraknya kebakaran lahan di desanya.

Akibatnya, kabut asap pun datang menyelimuti. Hal serupa juga terjadi hampir di setiap daerah di Kalbar.

Saat terjadi kabut asap tebal, banyak nelayan yang menggunakan motor air tidak bisa melaut. Ada pula yang kesasar, karena jarak pandang hanya sekitar delapan meter. Kabut asap juga tak jarang membuat warga terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Masalah kebakaran lahan ini antara lain dipicu oleh budaya pembukaan lahan dengan cara membakar. Berdasarkan data dari pemerintahan desa setempat, pada tahun 2015 terdapat sekitar 340 hektare lahan hangus dilahap si jago merah.

Dari total luas kebakaran tersebut, sekitar 50 hektare merupakan lahan kebun masyarakat. Kebun-kebun ini didominasi oleh tanaman karet dan nanas. Kebakaran itu membuat banyak tanaman mati sehingga banyak warga yang kehilangan sumber mata pencaharian. Sebagian lantas beralih menjadi pekerja pabrik atau perusahaan sawit. Ada pula yang menjadi buruh bangunan di luar desa.

Kondisi ini membuat Emmy terpanggil. Ia berupaya memulihkan lagi mata pencaharian masyarakat. Salah satunya dengan mengelola lahan yang telah hangus terbakar. Jika sebelumnya banyak petani membuka lahan dengan cara membakar, Emmy justru menghindarinya.

Untuk menanam nanas, pembukaan lahan dilakukannya dengan cara menebas dan menumbangkan rumput-rumput. Meski di tahap awal harus kerja ekstra, membuka lahan tanpa bakar ini dinilai punya banyak keuntungan. Sisa rumput yang ditebas bisa menjadi pupuk organik.

Warga Desa Sungai Asam, Nasimah (37) tertarik menjadi anggota kelompok petani gambut perempuan karena yakin pekerjaan ini bisa menambah penghasilan. Apalagi ia sebelumnya sudah terbiasa membantu suami mengolah lahan pertanian. Nasimah tidak kesulitan beradaptasi, membuka dan mengolah lahan untuk ditanami nanas. Keyakinannya itu pun kini telah terbukti.

"Kalau dijual buah nanasnya saja, harganya tidak stabil, tapi

jika dibuat produk turunannya, hasil yang didapat lebih banyak," ucapnya. Nasimah mencontohkan, saat membuat es krim dari bahan baku air nanas, dengan modal Rp40 ribu, dia mampu meraup keuntungan bersih sekitar Rp150 ribu.

"Produksinya memang masih skala kecil, namun saya yakin kalau pengolahan produk turunan ini ditekuni hasilnya nanti bisa lebih besar," paparnya. Hal senada juga diakui Dewi, warga Desa Sungai Asam lainnya.

Dewi tertarik ikut bergabung lantaran melihat ada nilai tambah dari menanam dan mengolah produk dengan bahan baku nanas. Sebelumnya, Dewi hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, dia mulai ingin mendapatkan penghasilan tambahan. "Saya pernah coba dagang online, tetapi tidak maju. Di sini sinyalnya susah," ujarnya. Karena itulah, ia lalu memutuskan bergabung dengan kelompok tani perempuan dan membuat produk turunannya seperti permen dan dodol nanas.

PRESENTASI HINGGA KE NORWEGIA

Pada Juni 2017 lalu, Emmy Shamimah didaulat mempresentasikan potensi alam dan produk olahan yang sedang dikembangkan kelompoknya ini di Oslo, Norwegia. Kegiatan tersebut merupakan salah satu even internasional yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari.

Pemerintah desa setempat memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya kelompok tani gambut perempuan di desa ini untuk mendapatkan dampingan ke sejumlah instansi terkait. Badan Restorasi Gambut (BRG) Kalbar adalah salah satunya.

Kepala Desa Sungai Asam, Sumardi mengatakan banyaknya lahan gambut membuat desa ini sangat rentan terhadap kebakaran. BRG menetapkan Sungai Asam menjadi salah satu daerah restorasi lahan gambut.

"Kalau saat musim kemarau, dilempar sisa puntung rokok saja gambut itu mudah terbakar. Makanya saat ada pembukaan lahan dengan cara membakar, risiko kebakaran jauh lebih tinggi," tuturnya.

Sumardi pun mendukung upaya edukasi petani yang semula

membuka lahan dengan cara membakar agar berganti pada cara yang lebih ramah lingkungan. Karena itu, ia mendukung penuh upaya kelompok petani gambut perempuan.

Kelompok tani ini dinilai sebagai sebuah inovasi baru dalam pengembangan sektor pertanian di desanya. "Kami berharap dengan adanya upaya pembukaan lahan tanpa bakar sekaligus bisa membuat produk turunan dari hasil tanaman, bisa mengubah pola pikir masyarakat," paparnya.

Dinamisator BRG Kalbar, Hermawansyah mengatakan salah satu tugas utama BRG yakni melakukan kerja restorasi gambut yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan. BRG pun menerapkannya melalui Program Desa Peduli Gambut (DPG).

Dia menerangkan, DPG diluncurkan sejak tahun lalu sejak tahun 2017. Kala itu ada 75 desa yang didampingi seluruh Indonesia dengan tujuh provinsi target seperti Kalbar, Kalteng, Sumatera Barat, Papua, Papua Barat, Kalsel, dan Sumsel

Di Kalbar sendiri saat ini terdapat 27 desa yang mendapat dampingan BRG yang terdiri dari 11 desa di Kubu Raya, 10 desa di Kayong Utara dan enam desa di Sambas.

Selain berupaya mengedukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran dan memberdayakan potensi ekonomi, BRG juga membuat sekolah lapangan petani gambut. Di sekolah ini masyarakat diajari mengelola lahannya tanpa membakar.

Sejauh ini, kata Hermawansyah, hasil produk olahan masyarakat Desa Sungai Asam belum dipasarkan keluar lantaran terbatasnya alat dan kemasan produk. Ia berharap melalui dampingan BRG dan keterlibatan pemerintah desa serta BUMDes, ke depan pangsa pasar dapat diperluas. ●

A. FAUZIAH ASTRID - *Majalah Empati*
lahir di Ujung Pandang, 16 Agustus 1982. Tahun 2004 Astrid lulus dari Fakultas Komunikasi Universitas Hasanuddin, Makasar. Tahun 2005 ia melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana Universitas Hasanuddin. Sejak masih menjadi mahasiswa, Astrid sudah menunjukkan minatnya pada dunia jurnalistik. Astrid juga aktiv di berbagai forum kajian dan LSM. Saat ini, selain menjadi editor di majalah Empati, Astrid juga menjalani profesi sebagai dosen di UIN dan UNIFA.

PELUANG PEMIMPIN PEREMPUAN DI RUANG REDAKSI

A. Fauziah Astrid, *Majalah Empati*

Nilai dan budaya lokal kerap kali menjebak seorang perempuan untuk memiliki akses dan peluang yang setara dengan laki-laki. Ruang media yang maskulin, masih menapis perempuan untuk berada pada tampuk kepemimpinan sebuah perusahaan di dunia kerja. Begitu pula di Makassar. Perusahaan media kebanyakan masih dipimpin laki-laki dengan dalih perempuan suatu waktu berada pada produktivitas yang menurun.

Bagi Rubhy Sudikio, menjadi seorang jurnalis radio merupakan jalan hidupnya yang akan selalu dilakoni. Kecintaannya terhadap dunia penyiaran itu membuatnya kadang lupa, bahwa catatan perjalanannya yang pahit, merupakan warna hitam yang harusnya mampu dia ubah.

Memulai kariernya di tahun 1999, kala itu Rubhy memasuki usia 21 tahun. Dirinya menceritakan waktu itu langsung diminta untuk turun lapangan dan melakukan liputan untuk sebuah stasiun radio lokal. Ia hanya bertahan selama satu tahun karena merasa karakter suaranya tak cocok untuk jadi penyiar.

Di media tersebut, selama empat tahun, statusnya hanya tenaga kontrak. "Karena peluang untuk terangkat jadi karyawan tidak ada, maka di akhir tahun 2002 saya keluar," kenangnya. Di media ini, Rubhy juga biasanya diberi siaran malam yang

mengharuskannya pulang larut malam. Tapi, dia akhirnya merasa tidak nyaman karena si sopir selalu mengantarnya pulang pada saat semua orang sudah diantar. “Saya tidak nyaman karena selalu terakhir diantar, jadinya hanya berdua dengan sopir,” paparnya.

Rubhy kemudian berpindah ke radio swasta di tahun 2002. Di radio ini, perlakuan diskriminasi mulai dirasakan. Banyak tekanan yang diberikan Manajer Stasiun. Apalagi, tambahnya pengkotak-kotakan berdasarkan agama juga sangat kental. Sebagai Muslim, Rubhy merasa diberi peluang yang lebih sedikit. Di tahun 2003, Rubhy kemudian menikah. Tahun 2005 ia memiliki anak pertama.

Sewaktu hamil, dia sempat mengalami sakit dan ngidam yang berat. Sayangnya, dia malah mendapat ancaman akan dikeluarkan apabila tidak masuk. “Masuk usia delapan bulan kehamilan, saya masih siaran dengan porsi kerja dan tekanan yang tidak berkurang, apalagi di kontrak kerja tidak tertulis tentang cuti melahirkan, bahkan dua minggu menjelang saya melahirkan, saya masih siaran,” tambahnya. Bahkan, sewaktu akan melahirkan di rumah sakit, Rubhy masih dihubungi kantor untuk menanyakan perihal pekerjaan. Padahal menurutnya, dia sudah mengajukan pengganti sementara.

Setelah melahirkan, Rubhy diizinkan cuti tidak sampai 40 hari karena manajemen menganggap Rubhy harus menyelesaikan banyak pekerjaan. Selama masa menyusui, Rubhy harus bolak balik rumah ke kantor yang berjarak 15 km karena tak bisa membawa anaknya ke kantor. Di tempat ini, sistem kerja yang dialami Rubhy tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenagerjaan. Walaupun lebih dari 8 jam kerja, kantor tak pernah memberinya upah lembur. “Waktu itu gaji saya tidak sesuai UMP,” bebernya.

Peristiwa berikutnya ketika memiliki anak kedua. Waktu itu Rubhy sudah mengajukan pengganti untuk siaran. Pada masa itu, Rubhy mengingat dirinya hampir melahirkan di ruang siaran. “Saya sudah pembukaan 8, dan setelah siaran itu saya langsung cepat-cepat ke rumah sakit,” kenangnya.

Setelah melahirkan, Rubhy diminta untuk segera masuk

kerja dengan dalih kekurangan orang. Cuti yang diberikan tidak sampai sebulan. Masa-masa ini membuat Rubhy tidak nyaman. Puncaknya ketika Rubhy meminta izin sehari karena anaknya sakit dan esoknya, dia diminta mundur dari perusahaan karena dianggap produktivitasnya menurun karena memiliki anak. "Padahal selama kehamilan saya tidak pernah memperlihatkan kalau saya letih, apalagi ruang master control itu penuh radiasi dan berbahaya untuk ibu hamil, tapi saya memperlihatkan kalau saya bisa bekerja dengan baik walaupun punya keluarga.

Setelah keluar, dan berpindah beberapa kali, Rubhy juga mengalami perlakuan yang hampir sama. Ketika mengandung anak ketiga dan sudah mengajukan cuti melahirkan, Rubhy masih sering dipanggil untuk mengurusi pekerjaannya. Waktu itu, Rubhy bahkan dipanggil kembali ke kantor untuk mengurus talk show, padahal dirinya berada di rumah sakit dan sudah pembukaan satu. "Alasannya waktu itu karena tidak ada penyiar yang bisa bawa, saya sudah menolak tapi tetap diminta untuk handle acara itu. Akhirnya setelah satu jam acara, saya kembali ke rumah sakit naik bentor, tidak lama setelah itu saya pun melahirkan," kenangnya.

Hal yang membuatnya akhirnya meninggalkan tempat tersebut, karena dirinya tidak diberi peluang untuk menjadi Produser. "Mereka lebih mengutamakan laki-laki untuk menjadi Produser padahal kompetensi kami saya rasa sama," papar alumnus STIKOM Makassar ini.

Stasiun radio yang kini ditempatinya sejak 2012 membuatnya menjadi satu-satunya perempuan di kantor. Dia menginginkan ini menjadi tempat terakhirnya berkarier. Walaupun gaji yang didapatnya tidak sesuai UMR, tetapi dirinya diberi kelonggaran untuk mengurus anak. Hanya saja, dirinya agak kesusahan karena struktur perusahaan yang membuatnya tidak tahu harus melapor ke siapa jika ada masalah. Tetapi terkadang ia merasa dimanfaatkan. Katanya, dia sering disuruh untuk mendekati informan atau atasan dengan dalih karena dia perempuan.

Secara keseluruhan dari semua tempatnya bekerja,

Rubhy belum pernah menemukan fasilitas yang menunjang kebutuhannya sebagai pekerja perempuan. “Belum ada itu yang menyiapkan pembalut di toilet, ruang khusus untuk menyusui, bahkan ruang tidur terpisah jika saya harus menginap di kantor, tidak ada semua itu,” tutur perempuan kelahiran 1978 ini. Selain itu, dia merasa peluang untuk menempati posisi atas atau top management masih lebih diutamakan untuk laki-laki daripada perempuan.

Perlakuan tak setara juga dialami Rahma Amin di media cetak surat kabar lokal. Sejak menekuni dunia jurnalistik di tahun 2013, dirinya telah berpindah dua kali. Kali pertama, dia bertahan selama setahun, yaitu pada 2013-2014. Pada posisi Reporter, Rahma akhirnya keluar karena perusahaan mengalami masalah keuangan. Gaji yang diterimanya pun kecil dan kadang diberi tak menentu waktunya. Tenaga kerja yang sedikit, terkadang membuatnya mengerjakan pekerjaan lain. “Untuk liputan, perempuan dikasih yang ringan, seperti pemerintahan dan ekonomi. Tapi laki-laki dikasih desk kriminal,” kisahnya.

Ia akhirnya memutuskan berhenti dan berpindah ke perusahaan surat kabar lain. Memulai lagi di tahun 2014, Rahma mengawali karier sebagai Reporter. Memasuki 2016 dia menjadi Asisten Redaktur dan di 2017 menjadi Redaktur. Ia menikah dan memiliki anak di tahun 2014. Uniknya, di kantor ini, Rahma sudah diwanti-wanti jauh hari untuk tidak hamil. “Ternyata saya hamil, jadi kantor bilang jangan terlalu lama cuti kalau melahirkan nanti,” paparnya.

Pada saat anak pertama harusnya dia mendapatkan cuti tiga bulan, tetapi 40 hari setelah melahirkan dia kemudian aktif kembali karena tenaga kerja yang kurang. Di kantornya juga diterapkan potong gaji kalau masuk kerja melewati jam tiga sore. Awal-awal, Rahma masih diberi kebijaksanaan karena alasan menyusui, sehingga gajinya tak pernah mengalami pemotongan. Tetapi ketika anaknya berusia 10 bulan, kebijakan itu tidak berlaku lagi.

Masalah kemudian muncul ketika diadakan pemilihan

Redaktur Pelaksana atau Redpel. Di kantornya, pada posisi Redaktur dan Asisten Redaktur, yang mengisi merupakan perempuan. Rahma menyebutkan semua karyawan didorong untuk maju berkompetisi. "Tetapi perusahaan melihat perempuan belum bisa memimpin. Akhirnya Redpel diambil dari luar komposisi yang ada dan yang dipilih seorang laki-laki," tandasnya. Rahma menyangkan hal tersebut karena dia melihat Redpelnya saat ini tidak memiliki kelayakan. Rahma menerka, perempuan dianggap punya masalah jika diberi ruang menjadi Repdel.

"Terlalu banyak hambatan, mobilitas terbatas, punya anak malah susah," tuturnya. Fasilitas yang disiapkan perusahaan bagi perempuan secara khusus juga tidak ada. "Ruang menyusui tidak ada, ruang khusus perempuan untuk beristirahat juga tidak ada. Selain itu dia juga menyayangkan tidak transparannya jenjang karier di sana.

Berbeda dari Rubhy dan Rahma yang berusaha untuk bertahan dengan kondisi seperti itu, jurnalis lainnya, Dian Muhtadiah memilih keluar dari perusahaan media cetak yang dimasukinya sejak 2007. Dian akhirnya memilih hengkang setelah 10 tahun meniti karier dengan posisi terakhir sebagai Redaktur.

Keputusan ini diambilnya, setelah ia dipindah secara sepihak menjadi Sekretaris Redaksi. "Alasan Dirut waktu itu Sekretaris Redaksi sebelumnya tidak memenuhi kualifikasi, sementara kualifikasi itu katanya ada pada diri saya. Tidak pernah didiskusikan ke saya, langsung ada SK-nya. Bagi saya tidak adil, padahal waktu itu pekerjaan saya sebagai Redaktur masih banyak. Saya mengadu ke pimpinan dan hanya disuruh ikuti perintah Dirut. Setiap saya mau bicara, saya tidak dikasih kesempatan. Akhirnya saya memilih mengundurkan diri dari perusahaan," bebernya.

Dian juga membeberkan hal lainnya yang menurutnya melanggar hak. Sewaktu dia harus menginap di kantor karena takut pulang malam, dia terpaksa tidur di kursi atau di bawah kolong meja karena tidak diberikan ruang tidur khusus. Pada

saat dia memiliki anak pun, dia tidak diizinkan membawa anak ke kantor karena dianggap mengganggu situasi kerja. "Tidak ada kebijakan paruh waktu untuk bisa mengurusi anak, jadi saya biasanya terpaksa bawa anak secara sembunyi-sembunyi," ujarnya menambahkan. Pada saat dirinya hamil besar pun, Dian mengaku masih disuruh bekerja tanpa melihat kondisinya. "Pernah liputan sampai harus menunggu semalaman, saya tidak dikasih toleransi untuk istirahat bahkan tidak dikasih wartawan pengganti, padahal saya harus istirahat," ceritanya.

Keluhan demi keluhan para jurnalis perempuan ini harusnya mampu diatasi Dinas Tenaga Kerja. Sayangnya, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Drs Andi Irwan Bangsawan MSi, tidak ada jurnalis yang mau melapor masalahnya ke Disnaker. "Banyak yang sering mengeluh ke saya kalau ketemu di lapangan, tapi pada saat saya minta melapor, mereka takut. Mereka bilang nanti dipecat, padahal kalau kami catat dalam laporan, itu kerahasiaan terjamin," ujarnya menjelaskan. Harusnya, lanjut Irwan, perusahaan media yang besar di Makassar, jika melakukan pelanggaran hak kerja perempuan, itu bisa ditindak. "Tapi sayangnya, belum pernah ada laporan yang masuk ke meja kami," katanya lagi.

Selain itu, Irwan menilai hak-hak pekerja perempuan pun tidak tersosialisasi dengan baik. "Kami di Makassar tengah membicarakan Perda pekerja medis perempuan. Hal ini mungkin sama dengan pekerja jurnalis perempuan yang tidak mengenal waktu kerja," katanya.

Irwan berharap perusahaan media tetap menghargai persamaan hak, kesempatan kerja untuk berada pada level-level struktur atas. "Jangan bilang, karena dia perempuan dia susah. Harusnya tidak ada lagi kata itu. Tetap harus sama haknya," paparnya.

LEVEL PIMPINAN REDAKSI UNTUK SIAPA?

Pada konteks level kepimpinan, Arsyad Hakim, Pimpinan Redaksi Harian FAJAR Makassar mengakui perempuan hanya

sampai pada level Redaktur di medianya. Tuntutan mobilitas yang tinggi membuat perempuan, apalagi yang sudah berkeluarga, sulit menempati posisi itu. "Kalau tiba-tiba cuti tiga bulan (cuti melahirkan), kan repot. Tapi sebenarnya peluang itu ada. Beberapa perusahaan yang sama berada di FAJAR grup dipimpin perempuan," ujar Arsyad Hakim.

Secara umum, tambah Arsyad, perusahaannya tidak membedakan karyawan perempuan dan laki-laki. Bahkan, untuk perempuan yang menjadi Redaktur, mereka diberikan tanggung jawab halaman yang bisa dikerjakan sampai pukul 10 malam. "Redaktur perempuan kita kasih halaman Sport yang dikerjakan jam 7 malam, dan halaman Metro sampai jam 10 malam," imbuhnya.

Untuk fasilitas, Arsyad mengakui belum ada fasilitas secara khusus yang diberikan untuk perempuan yang sudah memiliki anak. Seperti ruang menyusui, ruang istirahat secara khusus, atau ruang bermain anak. "Karena yang menyusui atau yang masih harus mengurus anak, biasanya mereka kami izinkan ikut rapat pagi, setelah itu pulang, nanti sore baru masuk," katanya.

Arsyad melihat, i karyawan perempuan yang sudah berkeluarga memang mengalami penurunan produktivitas. Reporter, menurut Arsyad hanya bisa bekerja pada usia 35 tahun. Jika melewati usia itu, harusnya mereka telah berada pada posisi Redaktur. "Tapi tidak semua bisa jadi Redaktur, makanya biasa kami bawa ke divisi lain misalnya bisnis, promosi, atau anak perusahaan lain," ujarnya.

Setara harusnya berada pada semua level. Pada semua bidang kerja dan kegiatan, akses kerja harus sama. "Sayangnya perempuan selalu diarahkan pada peluang. Mereka ditapis pada peluang. Biasanya alasan politis, perempuan jadinya tidak punya akses. Dan pada saat itu, alasan nilai budaya mencuat," ujar Kepala Program Studi Gender dan Pembangunan Pascasarjana Universitas Hasanuddin Dr Mardiana E Fachry MS.

Mardiana melihat dunia jurnalis yang maskulin, membuat perempuan juga dituntut bekerja 24 jam. Padahal secara fisik,

memang mereka memiliki keterbatasan. Justru alasan itulah, tambahnya, akses yang diberikan besar, tetapi peluang yang diberikan kecil. “Kenapa kantor atau negara tidak memerhatikan kebutuhan fisik perempuan yang berbeda, makanya peluang pelecehan terhadap perempuan itu besar,” ujarnya.

Mardiana juga melihat pengambil kebijakan di ruang media masih berada pada level netral gender, yaitu memperlihatkan kenyataan bahwa peluang ada, tetapi akhirnya ternyata diberi ruang yang sempit. “Harusnya kita bisa gender awareness, bisa memberikan akses sama, memberikan rasa aman pada saat kerja dan memberikan peluang besar untuk posisi kerja apapun,” katanya.

Untuk itu, Mardiana berharap ada kesadaran gender yang dimiliki para pemilik media. Dia berharap tidak lagi ada masalah yang timbul karena kodrat perempuan. Dia juga berharap perusahaan bisa membuat aturan yang membuat perempuan merasa nyaman.

Tidak dipungkiri, perusahaan pasti melihat profit dan hal-hal yang menyangkut produktivitas menjadi hal buruk bagi perusahaan. Tetapi untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan, semestinya perusaahan bisa melihat kebutuhan tertentu yang dimiliki perempuan. Itulah yang disebut Mardiana sebagai pengarusutamaan gender. ●

GENDER
Peluang Pemimpin Perempuan
Di Ruang Redaksi

MUHAMMAD KASIM - *Suara NTB*
lahir di Labuhan Lombok, 1 Maret 1989. Kasim atau akrab disapa Cem, saat ini aktif sebagai jurnalis dan kontributor berbagai media nasional. Selain bekerja sebagai jurnalis, Kasim juga aktif di Aliansi Jurnalis Independen di Mataram sejak 2014 sampai sekarang. Ia juga menjadi Ketua Komunitas Pemuda Tergerak. Kasim menamatkan S-1 di Universitas Hamzanwadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saat ini ia sedang dalam proses menyelesaikan pendidikan pasca-sarjana Ilmu Komunikasi di UIN Mataram.

NURBAYA SARI, KERINDUAN PADA PERDAMAIAN

Muhammad Kasim, *Suara NTB*

Di saat perempuan lainnya diam dan bersembunyi di tengah konflik. Itu tidak berlaku bagi Nurbaya Sari (45). Ia memilih berada di tengah konflik. Meredakan pertikaian yang umumnya dilakukan oleh para lelaki.

Letusan kembang api dan anak panah berseliweran di atas kepalanya. Teriakan dan saling lempar membuat suasana di Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok dan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang saat itu mencekam.

Nurbaya Sari seolah terbiasa melihat suasana tersebut. Permasalahan kecil sedari dulu menyebabkan dua lingkungan itu berapi-api. Keberanian perempuan dua anak ini, membuat sebagian masyarakat yang tak mengenalnya, mengagumi keberaniannya. Maklum bila Nurbaya menjadi perempuan yang disegani. Kerinduan akan perdamaian adalah hal mutlak baginya. Benaknya seakan terganggu bilamana sesama Muslim, apalagi senasib sepenanggungan bertikai terlalu lama.

Pertikaian ini dipicu permasalahan kecil, yaitu kontainer sampah yang diletakkan di perbatasan lingkungan. Peristiwa berbuntut penyerangan ini diduga dilakukan oleh warga Karang Taliwang. Konflik pun pecah dan menyebabkan korban meninggal dan luka di kedua belah pihak.

Baya, sapaan akrab Nurbaya, mengakui lelah dan terganggu

dengan pertikaian itu. Pasalnya,konflik itu berdampak luas. Anak-anak tak berani sekolah, ikatan emosional para perempuan dua lingkungan di pasar juga jadi renggang. Belum lagi, kerugian secara ekonomi karena terganggunya usaha kuliner khas Kota Mataram tersebut. Dan, petugas medis yang bertugas di Puskesmas Karang Taliwang, tak berani bekerja.

Nurbaya memikirkan banyak cara agar kehidupan masyarakat di dua lingkungan harmonis. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia melobi tokoh masyarakat di Karang Taliwang. Berkoordinasi dengan aparat Kepolisian dan TNI, agar pertikaian mereda. "Kalau sudah berdamai. Perempuan bisa cari penghidupan lagi. Usaha tidak terganggu dan anak-anak berani sekolah," ucapnya.

Berada digaris depan proses islah kedua lingkungan, tak pernah terbesit rasa takut dan membusungkan dada. Ketulusan niat adalah modal utama. Karena, Baya lebih menyerahkan hidup dan matinya ke Sang Maha Kuasa.

Pemikiran sebagai perempuan awam, sesama muslim dan berada di NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ika dan menganut asas Pancasila harus bersatu padu. Keamanan dan kerukunan harus terawat dengan baik. Perjalanan panjang serta komunikasi dengan para tokoh di Karang Taliwang membuahkan hasil. "Alhamdulillah, sekarang kami sudah hidup rukun. Karena, kita sama-sama merindukan kedamaian," katanya.

Persoalan siapa yang berjasa dibalik islah itu bukan hal penting diperbincangkan. Kata dia, semua memiliki andil menciptakan suasana kondusif.

Terlepas dari persoalan konflik, Baya memiliki cita-cita besar. Ia memilih terjun ke dunia politik. Penguatan dan pemberdayaan perempuan adalah mimpinya selama ini. Perempuan dinilai harus kuat, mandiri dan tidak boleh tertekan.

Sejak lama, ia mengajarkan perempuan di kampungnya untuk terlibat aktif dalam proses pemberdayaan. "Kalau perempuan kuat. Suami atau laki-laki tidak akan recokin kita (perempuan)," ujarnya dengan tegas..

Penguatan kapasitas perempuan di daerah rawan konflik

menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, tengah dipikirkan. Sebab, program dinas selama ini, fokus pada perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.

Menurut dia, peningkatan kualitas perempuan harus dioptimalkan. Jika secara ekonomi mapan, akan mengurangi resistensi terjadinya konflik. "Kalau perempuanya tangguh dan secara ekonomi sudah mapan. Mereka sendiri yang akan melarang para suami mereka bertengkar. Karena, perempuanlah yang akan merasakan dampaknya," ujar Dewi.

Penguatan kapasitas perempuan khususnya di kawasan rawan konflik akan dikomunikasikan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. DP3A akan turut andil dalam hal pemberdayaan. Asnayati, Kepala Dinas Sosial menambahkan, program penguatan perempuan dilakukan melalui program pelatihan dan bantuan modal. Perempuan rawan sosial dilatih menghasilkan produk yang mampu menunjang kehidupan keluarga. Selain itu, ada kelompok usaha bersama (KUBe) dan program keluarga harapan.

"Setiap tahun kita ada pelatihan 20 perempuan. Kita berikan bantuan alat dan modal usaha," ujar Asnayati.

Pemerhati Perempuan yang juga Dosen Universitas Islam Negeri Mataram, DR. Hj. Warni Juwita menyampaikan, konflik antara Pagutan dan Karang Genteng bisa diredam dengan melakukan pendekatan kepada perempuan dan anak-anak. Sebab, mereka adalah korban dan merasakan dampak dari konflik tersebut.

Menurut dia, perempuan memiliki alur komunikasi yang baik dalam menata hubungan rumah tangga maupun ekonomi. "Karena konflik ruang kehidupan perempuan jadi sempit," katanya.

Penguatan jaringan terutama perempuan sangat dibutuhkan. Warni mengingat bahwa konflik di Aceh mampu diredam oleh perempuan. Secara praktis, perempuan memiliki komunikasi yang baik untuk menciptakan iklim yang kondusif. Oleh karena itu, penguatan perempuan di daerah rawan melalui pendekatan pemberdayaan dinilai sangat penting.

Pandangan sama disampaikan Ketua Kaukus Perempuan Madiana. Menurut dia, pemberdayaan perempuan tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi kemandirian dan pengetahuan.

Khusus untuk konflik antara Monjok dan Taliwang, ia melihat perempuan harus menjadi pelopor perdamaian. "Remaja perempuan berkontribusi menjadi pelopor perdamaian," katanya.

Selama ini, konflik menimbulkan trauma. Dan, lazimnya perempuan dan anak yang menjadi korban. nggapan bahwa perempuan lemah dan hanya mengurus pekerjaan domestik, tidak sepenuhnya benar bila dilihat kemampuan mereka menciptakan perdamaian. "Saya langsung turun ke Monta (Monjok-Taliwang). Perempuan tidak terganggu dengan konflik itu," ujarnya.

Pemkot Mataram sejauh ini, belum memikirkan pemberdayaan perempuan khususnya di daerah rawan konflik. Kebijakan ini kata Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana akan coba diintervensi untuk mencetak perempuan pelopor perdamaian. Menurut dia, ini dianggap perlu ada terutama di wilayah yang residu konflik.

"Selama ini belum ada kebijakan mengarah kesana. Tapi kita akan coba intervensi itu," katanya.

Figur perempuan yang memiliki keterpengaruhan dengan menunjukan aktivitas sosial akan bermanfaat. Mereka jadi semacam instrumen dan diyakini memiliki komunikasi baik dengan tokoh - tokoh lingkungan. Perempuan sama - sama membangun sinergi dan penguatan terhadap kondisi sosial masyarakat. ●

Profil

Nama : Nurbaya Sari
TTL. : Mataram, 17 April 1973
Suami : Zaeni Rokhman
Anak : 1. Awan Prakoso Naga Pakca R
2. Claodia Puspasari Anjani R
Pendidikan : 1. Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Mataram
2. Magister Hukum Universitas Mataram (tesis)

Selasa, 4 September 2018

SUARA NTB

Nurbaya Sari

Halaman 12

Kerinduan pada Perdamaian

HILANG

SUPARDI BADO - *Media Totabuan*

Ia lahir di Kopandakan pada 14 Desember 1980. Jebolan S-1 Ilmu Administrasi, Universitas Sam Ratulangi ini sudah menjadi jurnalis sejak tahun 2007 sebagai kontributor RCTI. Sejak tahun 2011 sampai sekarang Supardi menjadi redaktur di Koran Media Totabuan, sebuah koran lokal di kota Kotamobagu, Bolaang Mongondow Raya, Sulawesi Utara.

POTRET BURUH WANITA DI LUMBUNG BERAS SULAWESI UTARA

Supardi Bado, Media Totabuan

Terik matahari pagi hingga jelang sore, tidak memupuskan semangat para buruh tani di Desa Tumokang Baru, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara turun di sawah.

Termasuk Ibu Casmi (40) dan empat puluh orang buruh tani lainnya yang saat itu sedang memanen padi yang terhampar pada satu hektare sawah di desanya. Panasnya matahari dan hujan jadi langganan tiap hari, demi sesuap nasi dan harapan keluarga bahagia.

Casmi, adalah buruh tani di desanya yang terletak di dataran Dumoga, daerah yang dikenal sebagai lumbung beras (rice barn) Sulawesi Utara. Hampir tiap hari, wanita bertubuh bongsor ini bergelut dengan lumpur di sawah tempat mereka mengais rejeki. Untuk melaksanakan tugas, Casmi harus bangun awal, yaitu sekitar pukul lima pagi wakti setempat.

"Sudah jadi pekerjaan rutin, pada pukul 05.00 WITA, saya sudah bangun, memasak, mencuci pakaian. Ketika anak bangun, dimandiin, dikasih makan, kemudian digantikan baju menuju sekolah. Biasanya, pada pukul 07.00 pekerjaan dapur sudah beres, tinggal menunggu jemputan menuju sawah," kata Chasmi, yang sudah 24 tahun menggeluti pekerjaannya ini.

Bagi Chasmi, bekerja di sawah sudah menjadi garis nasib dari

keluarganya, yang asal Jawa. Sebagai penduduk transmigran yang didatangkan dari Kendal Jawa Tengah Tahun 1971, Chasmi merasa tidak ada pilihan pekerjaan lain karena ada keterbatasan pendidikan. Menurutnya, jarang wanita di desanya yang sekolah tinggi, rata-rata lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian setelah lulus SMP, biasanya wanita diharuskan menikah dini.

"Dulu, gadis yang sudah dewasa, harus segera menikah. Setelah itu, harus turun ke sawah bersama dengan suami. Sekarang enak, anak gadis tidak harus ke sawah. Karena saya hanya lulusan SMP, ya anak yang kita perjuangkan," ujarnya sambil menyeruput kopi istirahat siang.

Untuk menekuni pekerjaannya sebagai buruh tani, Casmi digaji 14 ribu rupiah per jam oleh mandor di tim Kelompok Tani Putra Manohara, tempat ia dan 35 buruh tani wanita bekerja. Dalam sebulan, ibu dua anak ini mengaku mendapat penghasilan Rp1,6 juta. Jumlah yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan buruh pabrik yang memperoleh upah Rp2,8 juta seusuai upah Propinsi Sulawesi Utara.

Namun, menurut Casmi, penghasilan tersebut sudah cukup. Julianto (48) sang suami bekerja sebagai tukang. Jika ditotal, penghasilan Casmi dan Julianto dikisaran Rp 2,5-3 juta per bulan.

Dari hasil bekerja, sebagai buruh tani, Casmi saat ini sedang menyekolahkan anak pertamanya di Perguruan Tinggi. "Anak saya yang pertama sedang kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammdiyah, di Manado," ujarnya. Untuk membayar uang indekos dan uang sekolah, Casmi dan suaminya rutin mengirimkan uang.

Menurut bos Casmi, Turyadi, mayoritas pekerjanya adalah wanita, yaitu 35 orang dari total 50 pekerja. Laki-laki 51 tahun yang biasa disapa Pak Manis ini merupakan pimpinan kelompok buruh tani ini.

Turyadi menjelaskan, untuk waktu kerja, tidak ada perbedaan antara buruh laki-laki dan perempuan. Namun dalam beberapa pekerjaan, buruh wanita memperoleh pembagian tugas

yang sesuai. Ketika panen, wanita bertugas memotong dan mengumpulkan padi di petak sawah, yang laki-laki bertugas mengangkat padi ke tempat timbunan.

Masih menurut Turyadi, kesehatan para pekerja juga dia perhatikan dengan terbiasa membawa obat-obatan yang diperlukan. "Biasanya, jika ada yang sakit, saya suruh istirahat atau diantar pulang, karena lokasi bekerja tidak menentu. Kami bekerja dari sawah satu, ke sawah yang lain," ujarnya.

Maklum, dalam Kelompok Tani Putra Manohara, ansuransi kerja seperti layaknya di perusahaan, belum ada. "Wong ini hanya kelompok bentukan atas inisiatif sendiri, jadi tidak ada ansuransi. Tapi, rata-rata pekerja memiliki kartu BPJS atau KIS yang diberikan pemerintah," kata Turyadi dengan logat khas Jawa.

Casmi, adalah potret buruh tani di lumbung beras Sulawesi Utara. Jasa Casmi dan ribuan buruh wanita di daerah ini, jelas tidak diberi imbalan seperti hal buruh formal yang bekerja di industri besar.

Setiap tahun, khusus Dumoga Utara, dari 6.725 hektare sawah, menyuplai 38.104 ton beras untuk 2018. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, menurut data 2016, Bolmong Menyuplai 182.259 ton beras, jumlah tersebut mampu memenuhi kebutuhan beras 7 kabupaten/kota di daerah Sulawesi Utara.

BURUH WANITA DAN HARAPAN MASA DEPAN

Data di Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Dumoga Utara, dari 4.153 Kepala Keluarga (KK), 2.859 adalah keluarga yang berprofesi sebagai buruh tani.

Selain sebagai warga transmigran, ribuan warga di daerah ini hanya menggantungkan hidup dari persawahan. Meskipun akses kepemilikan sawah hanya dikuasai segelintir orang. Casmi bersama para perempuan buruh di Desa ini seakan tidak ada pilihan lain. Lahan tersedia hanya membolehkan mereka untuk jadi buruh.

Dari data yang diperoleh, kepemilikan lahan persawahan

hanya dikuasai oleh 25 persen warga setempat. Selebihnya dikuasai oleh para juragan tanah.

“Biarlah hanya kami yang bekerja seperti ini, akan tetapi, kami akan berjuang untuk anak kami, agar mereka memperoleh penghidupan yang layak. Tidak harus turun ke tempat kerja yang tidak memiliki harapan untuk berkembang,” ujar Casmi.

Dia menuturkan, akan berjuang sekuat tenaga agar anaknya bisa lulus di Sekolah kesehatan. Dia tidak ingin anaknya ikut-ikutan bekerja disawah jadi buruh tani.

“Pekerjaan ini sebenarnya bukan pilihan hidup, tapi apa daya, keadaan yang memaksa kami menekuni pekerjaan ini,”ujar Casmi dengan nada pasrah. ●

KATEGORI ONLINE

Nominasi:
Daya Hancur Pelecehan Perempuan di Dunia Maya
ALIKA NOOR KHOLIFAH, *Viva.co.id*

Sejajar Pria, Tiga Srikandi TWA Sungai Dumai Berjibaku Padamkan Karhutla
AZHAR SAPUTRA, *Riau Online*

Pasar Rintisan TKI Lampung Timur yang Pernah Berjaya
ENI MUSLIHAH, *Kompas.com*

Tempat Penitipan Anak, Andalan Ibu Pekerja Urban
FITRI HARYANTI HARSONO, *Liputan6.com*

Bekal dari Balik Tembok Penjara
MEGA DWI ANGGRAENI, *Bandungkiwari.com*

Stigma Hambat Perempuan Berkiprah di Infrastruktur
MELKI PANGARIBUAN, *Satuharapan.com*

Timpang Upah Buruh Batik di Yogyakarta
MUSTAQIM AHMAD, *Metrotvnews.com*

Cerita Buruh Hamil di Industri Garmen
NURIKA MANAN, *KBR.id*

Berkat Mie Kering Rumput Laut, Ibu-ibu di Sarawondori Papua Mampu Kuliahkan Anak
RACHMAWATI, *Kompas.com*

Manfaatkan Media Sosial Sebagai Peluang Usaha
RAMAH, *Kabar Papua*

Eksploitasi SPG, Potret Kelam dari Beratnya Kesetaraan Gender
VESSY DWIRIKA FRIZONA, *Suara.com*

Potret Perempuan Adonara Menggantung Asa dari Berkebun
YOHANES ADRIANUS, *NTTonline.com*

Pemenang Terbaik:
Cerita Buruh Hamil di Industri Garmen
NURIKA MANAN, *KBR.id*

ALIKA NOOR KHOLIFAH - *Viva.co.id*
Lahir pada 29 Juni 1988. Alika menamatkan pendidikannya dari jurusan Communication Public Relation di Universitas Terbuka, Pokjar Kuala Lumpur, Malaysia. Sejak tahun 2016, ia tercatat sebagai jurnalis di Femina Group dengan spesifikasi penulisan untuk parenting, perempuan, pendidikan, psikologi, kesehatan, anak, lifestyle, dan keuangan. Ia juga pernah menjadi jurnalis lepas di beritagar.id, NU Online, dan Womantalk.com.

DAYA HANCUR PELECEHAN PEREMPUAN DI DUNIA MAYA

Alika Noor Kholifah, Viva.co.id

"Pelecehan perempuan di dunia maya ibarat ranjau darat, tak tampak di permukaan, namun bila terinjak ledakannya bisa mematikan."

Cyber harrasment atau pelecehan di dunia maya merupakan salah satu jenis kasus yang terbanyak dilaporkan kepada Komisi Nasional Perempuan. Berdasarkan catatan tahunan yang dikeluarkan komisi nasional yang bergerak di bidang perlindungan perempuan tersebut, yaitu tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) 2018, angka pengaduan cyber harrasment mencapai 20 kasus, dari total 98 kekerasan berbasis siber.

Pengertian bentuk-bentuk pelecehan di dunia maya, bisa berupa pengiriman teks dengan isi yang menyakiti, menakuti, mengancam, dan mengganggu. Contoh yang masih hangat di ingatan, yaitu pelecehan yang dialami biduan Via Vallen pada Juni 2018 lalu.

Semuanya berawal ketika Via menerima pesan dari seseorang melalui fitur DM (direct message) di Instagram. "Saya ingin kau bersamaku di kamar tidur, mengenakan pakaian seksi,' demikian isi pesan itu dalam bahasa Inggris, seperti

yang ditunjukkan tangkapan layar yang diunggah Via pada 4 Juni 2018. Kala itu, Via tak mengabaikan begitu saja pesan tersebut. Ia menyadari, seseorang telah melecehkannya. Via pun mengumumkannya agar diketahui publik.

"Sebagai penyanyi, saya dipermalukan oleh pemain bola terkenal di negara saya sekarang," tulis Via di Instagram story.

"Saya bukan perempuan macam itu!!" kata penyanyi bernama asli Maulidia Octavia itu.

Di kalangan orang terkenal, pelecehan di dunia maya serupa dengan Via juga pernah dialami selebgram dan YouTuber, Gita Savitri atau dikenal dengan nama Gitasav.

Gita juga mendapat DM dari akun palsu bernama Tristan yang mengajaknya berhubungan intim. Sama seperti Via, Gita menolak diam ketika mengalami perlakuan cyber harrashment. Ia meng-capture isi pesan pelaku kemudian mengunggahnya ke Instagram story.

Unggahan Via dan Gita menuai banyak dan beragam reaksi dari warganet. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Di kubu yang setuju, warganet menyatakan dukungan dan menilai bahwa tindakan Via dan Gita adalah hal yang tepat.

Namun, komentar pedas dari warganet juga datang bertubi-tubi. Gita dan Via dianggap alay dan lebay, mengumbar sensasi demi meraup perhatian. Gita dan Via dinilai bereaksi berlebihan hanya gara-gara pesan di media sosial yang pelakunya pun tak wujud.

BERAKAR PADA KETIMPANGAN GENDER

Tudingan alay dan lebay terhadap Via Vallen dan Gita Savitri mencerminkan bahwa masih belum adanya satu sudut pandang yang tepat tentang pelecehan seksual terhadap perempuan di dunia maya.

Mengutip Wikipedia, pelecehan seksual merupakan perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan melakukan hubungan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik merujuk pada aktivitas seks.

Komisioner Komnas Perempuan, Masruchah, menyatakan, kasus yang dialami Via Vallen masuk dalam kategori pelecehan berbasis siber non fisik, dan seharusnya apa yang dilakukan Via Vallen perlu didukung. “Ini masuk dalam pelecehan seksual non fisik,” kata Masruchah.

“Apa yang dilakukan oleh Via perlu didukung karena ia telah berani speak up dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia, jangan karena (pelaku pelecehan) tokoh terkenal bisa sembarangan melakukan hal itu,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Budi Wahyuni, mengungkapkan pandangannya bahwa kasus-kasus cyber harrasment salah satunya berakar dari ketimpangan gender yang didominasi budaya patriarki. Perempuan Indonesia masih hidup di bawah bayang-bayang konstruksi gender yang menempatkannya sebagai objek.

“Ketidaksetaraan gender, ketimpangan ini melahirkan banyak ketidakadilan. Jadi perempuan itu akan selalu dipandang sebelah mata, akan selalu salah,” kata Budi melalui sambungan telepon.

“Kalau pembagian peran sama, tidak ada diskriminasi. Karena cara pandang laki-laki dan perempuan sama,” ujar Budi menambahkan.

Banyaknya pelecehan terhadap perempuan, merupakan bukti bahwa laki-laki masih cenderung menunjukkan kuasa gender terhadap perempuan. Di ranah digital, seperti media sosial, pelecehan semakin mudah, karena tidak ada ruang dan waktu yang membatasi, serta antara pelaku dan sasaran tidak bertatap muka langsung.

“Jangankan di media sosial, di kehidupan nyata saja itu masih sering terjadi. Misalnya di KRL, di tempat-tempat umum, perempuan jalan baik-baik saja dicolek payudaranya, apalagi di medsos yang orang bisa sembunyi di balik akunnya, tanpa tatap muka,” kata Budi.

Aktivis perempuan dan Co Director Hollaback, Anindya Restuviani, juga menyatakan, pelecehan di dunia maya merupakan ‘kepanjangan tangan’ dari cara pandang gender yang tidak setara di dunia nyata.

"Masalah power play atau relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan sudah terjadi di dunia nyata, dengan adanya ruang baru di dunia digital, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Jadi ujaran seksisme di dunia nyata yang ditransfer ke dunia maya," kata Vivi dalam sambungan telepon, Kamis, 13 September 2018.

Secara tidak sadar perempuan sendiri juga merupakan agen patriarki, dimana mereka memiliki cara berpikir bahwa derajat perempuan di bawah laki-laki. Berangkat dari persepsi ini, maka tidak heran jika sebagian kaum perempuan nyinyir ketika Via Vallen maupun Gita, berusaha terbuka dengan pelecehan yang menimpanya.

"Mereka menganggap biasa kalau laki-laki berbuat begitu (pelecehan), padahal itu bukan sesuatu yang harus dibiasakan. Memang sangat sulit untuk mengubah mindset perempuan itu sendiri, yang sudah percaya bahwa kita pantas diperlakukan begitu, padahal kita tidak pantas diperlakukan seperti itu," kata Vivi.

PEREMPUAN BERANI MELAWAN PELECEHAN

Data Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual, baik fisik maupun non-fisik. Namun, ibarat fenomena gunung es, kondisi riil dipastikan jauh lebih banyak karena sangat minim yang dilaporkan.

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018, kekerasan terhadap perempuan berbasis siber muncul ke permukaan dengan masif, tapi kurang dilaporkan dan ditangani. Via Vallen dan Gita Savitri, merupakan contoh perempuan yang berani bicara terbuka untuk menyuarakan pelecehan yang menimpa mereka. Tapi tidak semua perempuan siap secara mental melakukan hal serupa.

"Kadang ada orang yang lingkungan keluarganya tidak mendukung, sehingga mereka tidak bisa speak up secara terbuka," tegas Vivi.

Dari komunitas Hollaback sendiri, memberikan layanan konseling terhadap perempuan berdasarkan kesiapan mentalnya

untuk bicara. Korban tidak bisa dipaksa atau didorong-dorong untuk menceritakan pelecehan yang menimpa mereka, sampai dirinya sendiri berani terbuka.

Sementara itu, menurut Budi Wahyuni, ada baiknya ikut mendorong perempuan untuk berani melapor jika memang mengalami tindak pelecehan di dunia maya.

Dunia maya bak rimba raya. Alam semesta virtual yang dihuni pemilik akun dengan beragam konten yang diciptakannya. Setiap orang bebas berekspresi, menunjukkan kreativitas, bereksplorasi, mencari informasi, hingga menjalin interaksi dengan sesama pengguna.

Salah satu elemen dunia maya adalah media sosial (medsos). Sejatinya, medsos diciptakan agar pengguna dari berbagai belahan dunia bisa saling terhubung satu sama lain. Karena medsos merupakan ruang publik yang nyaris tanpa batasan, maka medsos juga bisa digunakan sebagai lapak membangun citra diri hingga melakukan transaksi bisnis. Bagi figur publik, medsos juga dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi dengan penggemar, serta memelihara eksistensi.

Masing-masing pengguna memiliki cara tersendiri dalam meraih tujuan eksistensinya, tergantung dari karakteristik platform media sosial yang ia gunakan. Ada yang menonjolkan konten foto, video, maupun tulisan.

Jika memandang dari kacamata kesetaraan gender, dan berkaca dari pengalaman tidak menyenangkan yang dialami oleh Via Vallen dan Gita Savitri, mengemuka pertanyaan: bagaimanakah menciptakan ruang publik di internet yang aman dari pelecehan seksual terhadap perempuan?

Menurut Budi, pola pikir dan cara pandang terhadap gender merupakan kunci utama. Masyarakat perlu berhenti menganggap perempuan sekadar sebagai objek, tapi beralih menempatkan perempuan sebagai subjek.

"Jadi, kalau ada kritik, ya, kritik yang membangun. Kan kita beda membicarakan perempuan sebagai objek dan subjek. Kalau perempuan ditempatkan sebagai subjek, ada penempatan harkat

dan martabat sebagai perempuan," kata Budi.

Keadilan dan kesetaraan gender, menurut Budi, kuncinya ada pada berbagi kuasa (sharing power) sehingga seimbang. "Masalahnya kita mau nggak untuk jadi seimbang? Kekerasan terhadap perempuan itu akarnya relasi kekuasaan yang tidak imbang," ujarnya.

Satu hal lagi yang digarisbawahi Budi, yaitu perempuan bisa seutuhnya memiliki otonomi terhadap tubuhnya sendiri, termasuk dalam berekspresi di media sosial. Andaikan mereka mau memamerkan tubuhnya sekalipun, itu merupakan bagian dari hak dalam otonomi tubuh. Meski punya hak penuh terhadap tubuhnya, menurut Budi, perempuan hendaknya bisa membangun eksistensi di media sosial dengan ide, pemikiran, serta prestasinya.

Adanya tindak pelecehan, penyebabnya bukanlah dari eksternal pelaku, melainkan dorongan dari dalam dirinya sendiri. "Masalahnya bukan pada pakaian yang terbuka. Kalau memang otaknya sudah ngeres, tubuh perempuan ditutupi karung goni juga bisa terjadi perkosaan," katanya.

"Cukup berikan komentar yang mengapresasi (perempuan) tak perlu dihujat. Orang upload foto tak ada yang karena alasan ingin dihujat 'kan?" ujarnya menambahkan. ●
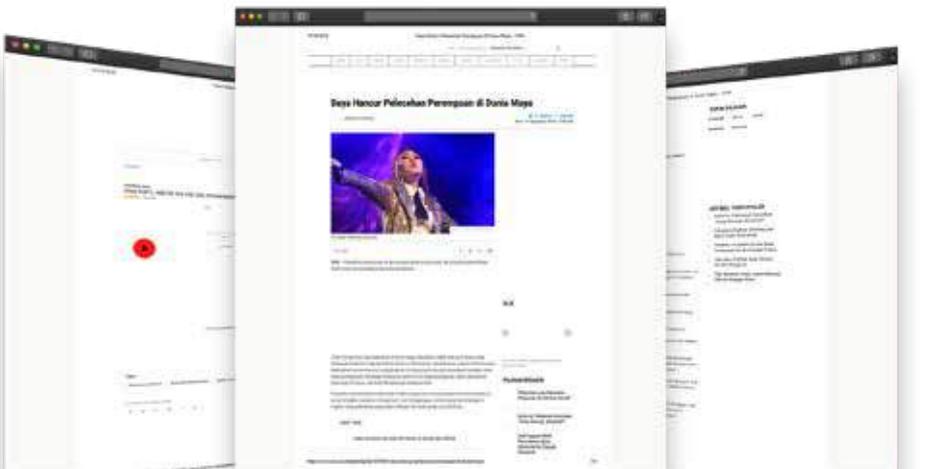
AZHAR SAPUTRA - *Riau Online*

Lahir di Pekanbaru, 4 April 1989. Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau (STIE-R) ini tak langsung menjadi wartawan. Ia pernah bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta di Riau. Tapi sejak tahun 2015 ia banting setir menjadi jurnalis. Dan sampai sekarang Azhar setia menjalankan profesinya dan terus bertahan di Riauonline.co.id sebagai reporter.

SEJAJAR PRIA, TIGA SRIKANDI TWA SUNGAI DUMAI BERJIBAKU PADAMKAN KARHUTLA

Azhar Saputra, Riau Online

"Bukan dua atau tiga hari, sudah satu pekan lamanya Zulinawati, Sri Wahyuni dan Afridawati tak kenal lelah berjibaku memadamkan api yang melanda kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Dumai sejak diketahui pada 13 Juli 2018."

Bersama empat rekan pria dibantu beberapa petugas dari Manggala Agni, TNI, Polri, Mitra Polhut, Masyarakat Peduli Api dan korporasi yang didominasi kaum pria, tiga Srikandi ini berbaur menjadi satu dengan instansi demi satu tujuan, yaitu memadamkan api dalam kawasan hutan lindung.

Pengolah data TWA Sungai Dumai Soebono, bahkan mengaku tak pernah merasa diberatkan oleh kehadiran tiga wanita dalam upaya memadamkan api pada saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi.

"Mereka (tiga pegawai wanita) diperbantukan untuk melakukan apa yang kami kerjakan selama melakukan pemadaman yang terjadi saat itu. Dengan adanya ibu-ibu ini saya terbantukan. Yang jelasnya, ada tambahan personel," ujarnya.

Soebono dan Kepala Resort TWA Sungai Dumai menceritakan asal mula malapetaka menimpa hutan lindung itu. Kedua penjaga

hutan ini bergegas menuju lokasi kebakaran yang diketahui terjadi pada sore hari, 13 Juli 2018.

Luasan yang terbakar juga tak banyak. Tak lebih dari satu hektare. Di sana lebih dahulu telah berkumpul personel TNI dan disusul oleh mereka serta diiringi petugas kepolisian. Kemudian berdatangan pula Masyarakat Peduli Api dan Manggala Agni.

Semuanya sepakat, pemadaman akan dilakukan pada keesokan harinya. Suasana mulai gelap. Serta jauh dari hiruk pikuk ramainya kendaraan roda empat dan dua. Yang ada hanya cahaya api dan suara ranting yang terbakar. Petugas ini pun kembali ke rumah untuk mengumpulkan tenaga untuk esok hari.

"Asal mulanya itu saya dengan Kepala Resort lakukan patroli. Di sana sudah ada Bintara Pembina Desa atau Babinsanya. Karena sudah malam kami lakukan pemadaman pada Sabtunya (14 Juli 2018-red)," kisah Soebono.

Suara kokok ayam jantan tidak terdengar lagi, yang ada hanya aksi heroik dari Zulinawati, Sri Wahyuni dan Afridawati. Satu per satu ibu-ibu ini bergantian mengantre memegang erat moncong selang dari pompa pemadam kebakaran yang telah dipersiapkan.

Ujung selang dengan diameter mencapai 1,5 inci menjadi andalan mereka saat itu. Belum lagi harus memikul kerasnya tekanan air antara 7-10 bar. Tak ubahnya seperti yang dilakukan TNI, Polri dan petugas lainnya di lokasi pemadaman.

Hilir mudik dentuman suara dari helikopter water bombing yang tak jauh dari atas kepala mereka juga tak dipedulikan. Hanya satu hal tertanam dalam benak mereka, api dapat padam agar mereka bisa segera pulang dan kembali ke rumah. Namun nyatanya hingga malam tiba, api tidak juga dapat dikendalikan.

"Cuacanya ekstrem. Angin kencang dan suhu meningkat. Jadi, saat itu pemadaman belum tuntas. Kami sambung di hari Minggunya," ucapnya.

Pemadaman di hari Minggu tuntas mereka lakukan. Zulinawati, Sri Wahyuni dan Afridawati beserta petugas lainnya pun pulang karena api dapat dijinakkan dan berhasil dipadamkan. Tinggal melakukan pendinginan dengan cara memuntahkan sebanyak-

banyaknya air dalam kawasan gambut yang telah menjadi bara api.

Selesaikah aksi heroik dari tiga wanita tangguh ini? Ternyata belum. “Pemadaman belum selesai. Kami turun lagi hari Senin. Apinya malah membesar,” katanya melanjutkan.

Zulinawati, Sri Wahyuni dan Afridawati kembali diturunkan untuk kembali melakukan pemadaman api. Upaya serupa terus berulang terjadi hingga memasuki tanggal 27 Juli 2018, api akhirya bisa benar-benar padam berkat hujan yang membantu mengguyur lokasi karhutla.

“Di saat itulah kesan yang paling tidak bisa saya lupakan. Bersama-sama melakukan pemadaman api dengan rekan dari TNI, Polri, Manggala Agni dan petugas lainnya,” kata Afridawati, yang merupakan satu-satunya Polhut wanita TWA Sungai Dumai.

“Nggak ada rasa takut. Justru saat itu kami saling menyemangati. Sepertinya senang saja ada kami perempuan diantara petugas laki-lakinya,” ujar Sri Wahyuni, Penata Usaha dari TWA Sungai Dumai.

“Meskipun keseharian saya menata administrasi, tidak menutup kemungkinan terjun ke lapangan. Contohnya melakukan pemadaman. Kami membantu teman karena kebutuhan personel yang kurang. Meskipun saat itu wajah ini menghitam. Tidak masalah bagi saya. Saya mencintai pekerjaan ini,” ucap Zulinawati, petugas TWA Sungai Dumai yang sudah berusia 50 tahun.

Demi terciptanya kelestarian sumber daya alam hayati, keseimbangan ekosistem, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan ekosistem, spesies, sumberdaya genetik yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, organisasi yang memiliki satu pejabat setingkat eselon II, empat pejabat setingkat eselon III serta sembilan eselon IV tak segan-segan melibatkan pegawai perempuannya. Termasuk yang ada di Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Dumai yang masuk dalam salah satu dari 17 kawasan konservasi yang dikelola oleh mereka.

Kepala BBKSDA Riau, Suharyono mengatakan bahwa keterlibatan pegawai perempuan dalam menjaga kawasan hutan

itu tidak hanya berada pada tingkatan paling bawah, namun di seluruh wilayahnya yang memiliki luasan sekitar 329.867 kilometer persegi, dengan rincian daratan seluas 94.561 kilometer persegi dan perairan seluas 235.306 kilometer persegi itu.

"Pegawai wanita kami tidak hanya bekerja pada tingkatan tapak saja, tapi di seluruh pekerjaan. Tentunya sesuai tugas dan fungsi sampai kapasitas mereka," paparnya.

Dari tingkatan bawah, seperti di TWA Sungai Dumai, tiga dari tujuh petugasnya ialah perempuan. Satu polisi hutan Indonesia dan dua lagi pegawai dengan tugas utama mengelola administrasi.

Sedangkan pada tingkatan yang lebih tinggi ada Koordinator Klinik Hewan, drh. Rini. Ia bertanggung jawab 24 jam dalam evakuasi terhadap satwa serta mengatasi konflik antara satwa dan manusia.

Pria yang akrab disapa Haryono itu tak menepis dugaan, bahwa keterlibatan pegawai perempuan untuk membantu terciptanya keseimbangan ekosistem pada kawasan konservasi merupakan imbas dari minimnya jumlah pegawai mereka.

Di lain sisi, dengan dilibatkannya pegawai perempuan, semangat pegawai laki-laki justru semakin tinggi. Menurutnya semangat itu muncul karena telah terjadi keharmonisan yang tidak mengenal kekurangan ataupun kelebihan selama berada di lapangan.

"Antara pegawai laki-laki dan perempuan saat berada di lapangan saling melengkapi, menyemangati sehingga kata-kata kelebihan ataupun kekurangan dari pegawai kami itu tidak ada. Semuanya sama,"ujar Haryono menjelaskan.

"Kami, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menjadi penanggung jawab dan pelaksanaan dalam kegiatan konservasi sumber daya alam hayati," katanya. Maka, melibatkan seluruh pegawai, termasuk pegawai perempuan adalah upaya untuk mencapai sasaran strategis, penerimaan devisa negara, penerimaan negara bukan pajak hasil dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, satwa liar, tumbuhan alam, nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi diiringi

dengan peningkatan populasi satwa liar terancam punah.

Sementara itu, khusus untuk TWA Sungai Dumai petugas selalu melaksanakan patroli rutin dengan melibatkan tujuh orang pegawainya. Mereka mengawasi sekitar 4.712.50 hektare kawasan TWA. Selain patroli rutin, catatan penting lainnya ialah dengan cara melakukan sosialisasi, pendataan sampai pemasangan papan peringatan pada daerah yang mereka anggap rawan kejahatan.

Setelah ditetapkan menjadi kawasan lindung berdasarkan SK.Gubernur KDH Tk I Riau No.85/I/1985 Tanggal 23 Januari 1985 serta penetapan kawasan berdasarkan SK.Menhut No.154/ Kpts-II/1990 tanggal 10 April 1990, kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Dumai secara resmi diperkenalkan kepada publik.

Dengan karakteristik hutan hujan tropis dataran rendah serta memiliki tipe hutan rawa kering sesuai dengan kriteria hutan wisata, lokasi TWA ini terbelah menjadi dua bagian yang diapit oleh beberapa desa dari bagian tengah sampai ke bagian selatan dan utara.

Di bagian timur berbatasan dengan hutan produksi tetap dan sebelah barat berbatasan dengan hutan produksi yang dapat dikonversi. Jika ditotal, TWA ini memiliki luas 4.712.50 hektare, mengerucut sebelum SK gubernur tahun 1985 dikeluarkan, yang mencapai 5.000 hektare.

Sementara untuk letaknya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau memastikan bahwa secara geografis TWA ini berada di antara 1 31 derajat-1 38 derajat lintang utara dan 100 31 derajat-101 28 derajat bujur timur yang terletak di wilayah kota Dumai, provinsi Riau.

Sehingga, kawasan yang berada di pusat kota ini begitu mudah dijangkau menggunakan kendaraan jenis apapun. Baik roda empat ataupun roda dua. Dari ibu kota provinsi Riau, Pekanbaru dengan tujuan agar dapat tiba dengan cepat, RIAUONLINE. CO.ID mencoba menggunakan kendaraan roda dua. Dengan jarak tempuh 215 km, tanpa berhenti dapat memangkas waktu tiba dari biasanya 5,5 jam menjadi 5 jam dengan kecepatan normal, 60-70 kilometer per jam.

Lokasi TWA dapat dengan mudah dijumpai. Warga sekitar menyebutnya dengan daerah Bukit Jin. Sebelah kiri jika sebelum memasuki kota yang bersebelahan dengan markas Manggala Agni. TWA ini berada di bawah pengawasan Seksi Konservasi Wilayah IV Resort Dumai Bidang KSDA WIL II BBKSDA Riau yang berada di Jalan Soekarno-Hatta.

Negara menjadikan kawasan ini sebagai TWA dengan tujuan agar mampu menampung ratusan bahkan ribuan animo masyarakat karena potensi wisata yang dimiliki, seperti perkemahan dan lokasi titik foto yang memukau. Namun telah didahului oleh ketenaran lokasi wisata lainnya yang ada di Dumai.

Seperti Pantai Teluk Makmur, Taman Bukit Gelanggang, Danau Bunga Tujuh, Hutan Wisata, Hutan Mangrove sampai Bandar Bakau. Kelebihan TWA ini justru ada pada lokasi pengamatan satwa liar dengan potensi memukau tidak kalah dengan lokasi wisata edukasi lainnya di Indonesia.

Untuk floranya, masyarakat akan dapat melihat langsung kemegahan dari hadirnya pohon kempas, baik berjenis kayu raja ataupun malaka. Dimana saat ini kehadirannya sudah dilindungi oleh negara berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang jenis tumbuhan dan satwa yang ditetapkan baru-baru ini pada 29 Juni 2018 silam dengan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.

Kepala Resort TWA Sungai Dumai Nurjaman mengatakan, pihaknya gencar melakukan patroli rutin sebagai upaya pengawasan. “Upaya pencegahan kita tentu melakukan patroli rutin selain dari sosialisasi yang juga kita gencarkan. Jika kedapatan sedang melakukan pengrusakan biasanya tahap awalnya kita lakukan pendekatan untuk tidak melakukan hal serupa. Selain itu mereka juga diberikan surat peringatan dengan harapan tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum,”ujarnya.

Dalam menjaga kelestarian dan keberlangsungan Taman Wisata Alam Sungai Dumai itulah Nurjaman mengajak semua pegawainya, termasuk tiga Srikandi Zulinawati, Sri Wahyuni dan Afridawati ikut ambil bagian. Tak ada batas, tak ada sekat, dan

tak ada diskriminasi dalam pekerjaan bagi tiga Srikandi tersebut. Mereka melakukan tugas dengan bahagia dan bertanggungjawab. Semoga tak ada juga diskriminasi dalam hal gaji dan fasilitas penunjang lainnya. ●

ENI MUSLIHAH - *Kompas.com*
Lahir di Pugung Raharjo, 10 Agustus 1982. Eni menyelesaikan pendidikannya dari Jurusan Manajemen Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darma Jaya, Lampung. Eni sudah merintis karier sebagai jurnalis sejak tahun 2008 dan tetap bertahan hingga hari ini. Ia pernah bekerja di Radio Elshinta, LKBN Antara, lalu sejak 2013 hingga sekarang di KBR, dan sejak 2015 hingga sekarang di Kompas.com. Eni juga tercatat sebagai anggota aktif di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung.

PASAR RINTISAN TKI LAMPUNG TIMUR YANG PERNAH BERJAYA

Eni Muslihah, Kompas.com

"Cerita keberhasilan purna TKI membuka kios dan berdagang terus berkembang, hingga akhirnya sebagian besar kios di pasar tersebut dimiliki oleh purna pekerja migran."

Dendangan musik dangdut sayup-sayup terdengar dari sebuah blok pasar di Desa Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Langkah demi langkah, menghampiri sumber suara. Lirik lagu pun makin kentara. Begini liriknya...

Sementara kasih sayang yang ku berikan
Engkau anggap tuk membayar
Hutang cinta yang ku pinjam
Kalau belum lunas, mengapa tak menagih lagi
Haa..haaa..haaa..haa...
Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain
Buat apa sih, benang biru kau sulap menjadi kelambu
....

Ya, lagu berjudul "Benang Biru" itu didendangkan oleh artis kawakan Meggy Z di era tahun 90-an. Sumber suara berasal dari sebuah kios pecah belah. Seorang perempuan dengan potongan rambut pendek cepak ditemani lagu itu, nampak sibuk menyeka

perabot dagangannya yang terhinggap debu jalanan.

Katami (48) pemilik kios pecah belah. Diketahui adalah seorang purna pekerja migran Indonesia (PMI) dari Lampung Timur. Lebih dari lima tahun menghabiskan waktunya untuk berniaga di pasar yang awalnya dirintis oleh alumni PMI.

Blok tempat Kios Katami berdiri, terlihat penuh terisi. Beberapa blok kios lainnya terlihat tak berpenghuni. Aktivitas jual beli erasa senyap tak bergairah. "Ya beginilah kondisinya setiap hari, tapi ya ada saja yang membelinya," kata Katami saat ditemui Kompas.com, sepekan lalu.

Meski sepi, namun Katami mengaku usahanya hingga kini terus berjalan. Tak pelak setiap hari, dia masih bisa meraup keuntungan ratusan ribu rupiah. "Memang tidak terlalu ramai mbak, tetapi setiap hari ada saja yang belanja. Dalam sehari, sepi-sepi begini lumayanlah, bisa meraup keuntungan Rp200-Rp300 rupiah per hari," tuturnya.

Dia mengaku, telah memiliki lima kios di pasar tersebut. Beberapa digunakan untuk gudang, sisanya display dagangan.

Lima tahun merantau ke negeri orang, Katami bekerja menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Gaji demi gaji per bulan dia kumpulkan, membuatnya mampu membuatnya mengembangkan usaha pecah belah di pasar itu.

Ketika ditanya, lebih senang menjadi PMI atau pengusaha? Katami bersemangat menjawab, "Lebih enak jadi pengusaha, apalagi di kampung sendiri lebih tenang karena lebih dekat dengan Keluarga." Dia mengaku lebih mantab untuk tidak lagi menjadi pekerja di luar negeri.

Kisah sama pun dirasakan Lilis Sofiah (46) warga Labuhan Ratu Lampung Timur. Nasib baiknya selama menjadi buruh migran berbuah hasil. Gaji dari kontrak pertama, ia manfaatkan untuk membeli kios di pasar itu. "Awalnya saya beli kios akhirnya membeli isi dengan pakaian yang dapat dijual dan akhirnya kios saya terus Bertambah," ujar Lis. Bahkan dari kios Lis itulah, warga bisa utang membeli pakaian seragam anak sekolah.

Lis baru tersadarkan membuka usaha di kampung setelah 11

tahun berstatus sebagai PMI di Arab Saudi dan Hongkong. Ia mendengar ada yang berhasil dengan berniaga.

Semakin sering berinteraksi dengan masyarakat Lis akhirnya tergoda untuk maju pada bursa Pencalegan. “Saya butuh modal dan saya pergi lagi. Nah kali ini saya ke Taiwan, tujuannya untuk mencari biaya politik,” tuturnya sambil tertawa lepas. Sayang usahanya belum berhasil. Lis tidak lolos dalam bursa penentuan calon legislatif. Tapi ia melanjutkan bisnisnya.

Lis juga bergabung dalam sebuah gerakan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lampung Timur. Salah satu kegiatannya adalah mengadvokasi masyarakat, memberi pembekalan kepada calon PMI yang berasal dari desanya. “Selain itu, kami para purna PMI menggalang dana kemanusian untuk gempa di Lombok, NTB,” katanya.

SEJARAH PASAR RINTISAN TKI

Kesuksesan kedua perempuan purna PMI membuka lapak juga turut dirasakan purna pekerja migran lainnya. Khususnya di Desa Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

Pasar Rintisan TKI Desa Labuhan Ratu, Lampung Timur berdiri sejak tahun 2001. Berawal dari inisiatif kepala desa yang ingin menghidupkan perekonomian di desa tersebut. Sebuah lahan seluas 1 hektare disiapkan tepat di depan jalan Lintas Pantai Timur Sumatera, satu kilometer dari Taman Nasional Way Kambas. Lengkap dengan bangunan kios, siapapun boleh membeli dengan sistem pembayaran tunai atau cicilan. Siapapun berhak memiliki sebuah kios dengan status hak guna pakai.

Diawali dari Imam Nahrowi (50) purna pekerja migran. Menjadi pekerja buruh pabrik material di Hongkong membuatnya berpikir untuk membuka toko material. “Dulu masih sangat sepi, saya coba-coba untuk membeli kios di pasar itu dan gaji tahun berikutnya saya belikan bahan-bahan material,” cerita Nahrowi kepada Kompas.com.

Usahanya berkembang hingga sekarang dan dia mengajak purna-purna lainnya untuk ikut mengembangkan pasar tersebut.

"Ada yang membuka kios wartel ketika itu, berguna sekali menjalin komunikasi antara pihak keluarga dengan kami para TKI," kisahnya.

Kios wartel itu dikembangkan seorang purna pekerja migran bernama Berty Sarofah. Berty juga salah satu perintis terbentuknya pasar TKI di sana. Berty pernah memiliki 15 kios usaha. Sayangnya, Berty saat ini belum bisa membagikan kisahnya. Purna PMI itu sedang proses pemulihan dari gangguan kejiwaan.

Cerita keberhasilan membuka lapak terus diperbincangkan hingga akhirnya pemilik kios dan juga lapak-lapak sayuran sebagian besarnya dimiliki oleh purna TKI asal desa Labuhan Ratu. Tetapi sayangnya perkembangan tidak sesuai dengan harapan, sehingga pamor pasar yang sempat berjaya itu perlahan mulai menyurut.

Banyak kios terbengkalai ditinggalkan pemiliknya. Padahal, pasar itu sempat dijadikan percontohan keberhasilan pekerja migran dalam mengembangkan perekonomian daerahnya. "Saya sendiri kurang tahu secara pasti, tapi diperkirakan kurang sabar dalam berusaha dan kemungkinan lainnya, pasar kami lokasinya tidak jauh dari pasar besar yang terletak di Desa Tridatu, Labuhan Ratu," kata Imam.

Hingga akhirnya, pasar dikembalikan lagi pengelolaannya ke aparat desa, meskipun masih banyak pemiliknya adalah purna buruh migran. "Paling tidak kami sudah mengawali pembangunan ekonomi di kampung yang kami cintai," tutur Imam, yang kini menjadi pemilik toko material terbesar di kampungnya itu.

KISAH PMI GAGAL

Tak semua pekerja migran langsung berhasil. Winarti (49) termasuk salah satu yang mengalami nasib apes. Tapi ia memberanikan diri melawan ketidakadilan yang diterimanya selama bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negara tetangga. "Ketika itu pagi sekali, dengan alasan membuang sampah saya nekat kabur dari rumah majikan. Tak sepeser pun membawa uang dari hasil kerja," kata Winarti mengawali ceritanya.

Ketika itu tidak ada alat komunikasi yang menunjang, hanya berbekal robekan kertas bertuliskan sebuah alamat, Win seorang warga Desa Tridatu Kabupaten Lampung Timur tahun 2003 silam mencari pertolongan. "Alhamdulillah, saya bisa kabur dari majikan resmi. Tidak cuma gaji, dokumen resmi saya pun ditahannya," katanya lagi.

Melalui pertolongan dari warga Indonesia yang bekerja sama, Win akhirnya dapat bekerja kepada majikan lain yang baik. Tapi statusnya ilegal, karena tak ada dokumen resmi yang ia pegang. "Saya bekerja pada majikan kedua berstatus ilegal, tapi di sana saya lebih tenang," ujar Win.

Tepat dua tahun, menjadi PMI ilegal, Win dan beberapa orang lainnya pulang ke tanah air. Dia pulang dengan membawa cerita yang lara dan penuh dengan rasa ketakutan. "Tidak dapat saya bayangkan, andai kapal yang kami tumpangi itu terjaring dalam patroli petugas luar negeri," ujarnya.

Win meninggalkan tanah air dipicu dari kemiskinan yang mendera keluarganya. "Anak mau sekolah, kebetulan tetangga saya sponsor (calo) menawarkan saya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negeri Jiran," kata Winarti atau biasa disapa dengan Wiwin.

Keputusannya semakin bulat ketika melihat tetangga lainnya yang bekerja ke luar negeri sering

mendapat kiriman dari sanak suadara yang menjadi buruh migran. Sebentar-sebentar ada barang yang datang dan kemudian membangun rumah serta mengirim sejumlah uang untuk kebutuhan keluarga.

Rayuan maut calo pekerja buruh migran pun akhirnya mampu meyakinlan Win untuk berangkat. Kini Win mengaku kapok. "Pengalaman buruk yang saya alami, membuat saya kapok pergi ke luar negeri, cerita ini akan saya sampaikan terus pada warga sekitar saya, agar berpikir ulang menjadi PMI," ujar Win, mengakhiri ceritanya.

PROGRAM UNTUK PURNA PMI

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Wilayah Lampung menjelaskan pasar Rintisan TKI Lampung Timur terbentuk atas inisiasi warga sendiri atas inisiatif purna pekerja migran di desa tersebut. Tak sepeser pun perintisan pasar itu dibantu oleh pemerintah.

BNP2TKI sendiri sejak tahun 2015 telah mengembangkan program pemberdayaan PMI migran di daerah kantong-kantong pengiriman PMI terbanyak. "Programnya antara lain budidaya ikan lele," kata Humas BNP2TKI Cabang Lampung Ulfa Mubarika.

Program peningkatan ekonomi yang berjalan diantaranya ternak ayam KUB, budidaya lele, budidaya jamur tiram, produk olahan jamur tiram (keripik jamur, bakso jamur, nugget jamur), olahan singkong (eyek-eyek, keripik singkong). Olahan jagung seperti membuat kerupuk jagung, tortila dan keripik pisang. Kemudian ada juga pelatihan kreasi kerajinan dengan ornamen tapis Lampung, batik Lampung, pelatihan merajut, pembuatan gula semut dan lainnya.

Kegiatan ini terus berkembang di Desa Taman Endah, Purbolinggo, Lampung Timur. Menurut Ulfa, di sana satu-satunya kelompok purna PMI yang memiliki koperasi.

LAMPUNG TIMUR KANTONG TERBESAR PENYALURAN PMI

Secara umum, Lampung Timur adalah daerah penyumbang terbesar pengirim pekerja migran. Total pengiriman PMI dari Lampung Timur pada dua tahun terakhir mencapai 3.196 orang, didominasi sektor informal atau pekerja rumah tangga.

Dari data BNP2TKI tahun 2017-2018, sektor informal lebih diminati PMI perempuan, jumlahnya mencapai 18.374 orang. Sedangkan peminat sektor tersebut pada laki-laki hanya 39 orang saja.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nuning Sri Rahayu negara yang paling diminati PMI adalah Malaysia. "Malaysia menjadi

tujuan negara paling banyak peminatnya karena satu rumpun dan persyaratannya tidak terlalu sulit, meskipun upah yang ditawarkan berkisar Rp3 juta," kata dia.

Lalu mengapa Lampung Timur menjadi daerah pengirim PMI terbesar di Lampung, menurutnya, tradisi yang membuat masyarakat setempat gemar bekerja ke luar negeri selain faktor utamanya adalah ekonomi. "Tradisi yang berkembang dan menganggap menjadi pekerja migran adalah solusi dari persoalan ekonomi harus dikendalikan lewat program-program yang lebih menjanjikan," kata dia.

Hadirnya pasar Rintisan TKI di Labuhan Ratu, Lampung Timur adalah sebuah solusi agar pekerja migran tak berlama-lama di negeri orang dan kembali mengembangkan kampung Halaman. Meski pasar tersebut kini meredup, tapi tujuan utama mendirikan pasar tersebut layak diingat kembali dan menjadi motivasi untuk membuat pasar kembali berjaya, dan mengembalikan pekerja migran yang didominasi perempuan itu untuk kembali ke kampung halaman. Melalui wirausaha, pekerja migran perempuan bisa memberdayakan diri dan mengangkat harkatnya sebagai mahluk sosial. ●

Pasar Rintisan Mantan TKI Lampung Timur yang Pernah Berjaya...

FITRI HARYANTI HARSONO - ***Liputan6.com***
Lahir di Bogor, 15 April 1991. Fitri lulus dari Jurusan Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia pada tahun 2014. Ia sudah tertarik pada dunia jurnalistik sejak masih menjadi mahasiswa dengan memilih aktif sebagai koreponden dan jurnalis Pendar Budaya, FIB UI. Ia melanjutkan aktivitas sebagai jurnalis dengan magang di Harian Pelita pada September-November 2014, dan akhirnya terjun menjadi jurnalis sejak Juni 2015 hingga saat ini Liputan6.com.

TEMPAT PENITIPAN ANAK, ANDALAN IBU PEKERJA URBAN

Fitri Haryanti Harsono, Liputan6.com

Ruangan tempat penitipan anak (TPA) Zwitsal Day Care Center bercat kuning seakan menyambut hangat siapa saja yang datang. Dinding bertuliskan "Toy Zone" dengan motif gambar bayi terasa lucu dan imut dipandang. Bangku, kursi, dan aneka permainan anak berwarna-warni. Sebuah perosotan dengan anak-anak tangga menjulang tinggi.

Itulah suasana Zwitsal Day Care Center yang terdapat di kantor baru di Graha Unilever, kawasan Green Office Park, Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan. TPA tersebut mendukung kenyamanan ibu pekerja yang menitipkan anaknya.

TPA milik PT Unilever Indonesia, Tbk dioperasikan sejak 2017. Kehadiran TPA tak lepas dari dukungan pihak perusahaan melihat fungsi keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagai salah satu unsur pembangun wellbeing (kesejahteraan). Hal ini terkait dukungan terhadap ibu bekerja untuk terus berkarier dan berkarya di Unilever.

Konsep wellbeing sangat penting bagi kinerja dan prestasi karyawan demi terciptanya wellbeing keluarga yang bahagia dan sejahtera. Wellbeing juga termasuk unsur sukses bagi tumbuh kembang anak dan faktor kesuksesan karyawan dalam menjalani pekerjaan sehari-hari di kantor.

"Kami menyediakan Zwitsal Day Care Center yang dapat

digunakan setiap hari untuk anak-anak karyawan di bawah usia sekolah (balita). Dengan bantuan fasilitator dari lembaga pendidikan, fasilitas ini tidak hanya sebagai tempat penitipan anak, tetapi juga membantu mengembangkan kemampuan kognitif dan psikometrik anak-anak lewat berbagai macam kegiatan pra-sekolah," papar Head of HR Business Partner CD, Finance, IT and Head of Employee Branding PT Unilever Indonesia Tbk, Nanag Chalid lewat pesan teks kepada Health-Liputan6.com pada Senin, 27 Agustus 2018.

Salah satu karyawan PT Unilever Indonesia, Tbk, Maria Regina menitipkan anaknya, Pandum (3) di TPA tersebut. Maria selaku Business Integrity Manager menyampaikan fasilitas tersebut memberikan kemudahan baginya sebagai seorang ibu bisa menjalani work life balance (keseimbangan hidup bekerja). Di satu sisi, ia mampu fokus memenuhi tuntutan kerja secara profesional, tapi juga bisa menjalani peran sebagai ibu, bahkan di lingkungan kerja sekalipun. Interaksi Maria dengan Pandum yang tidak terputus menjadi semangat untuk terus melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan di kantor.

BEKERJA SEKALIGUS MENGASUH ANAK

TPA merupakan solusi bagi para ibu pekerja urban seperti Jakarta agar dapat menitipkan anaknya. Hal ini membuat karyawan wanita dapat produktif menyelesaikan pekerjaan kantor karena anak berada di tempat pengasuhan yang tepat. Apalagi, di saat istirahat bekerja bisa menengok anak yang sedang berada di TPA.

Ada juga perbincangan hangat dengan Emma Rahmadhanti (37) pada Kamis, 9 Agustus 2018 TPA Serama, Kementerian Kesehatan RI, Kuningan, Jakarta, siang itu sangat berkesan. Emma, begitu dia disapa, sudah menitipkan anak ketiganya di TPA sejak 2016. Semenjak menitipkan anak di TPA tersebut, Emma mengaku dirinya lebih semangat kerja.

"Yang saya rasakan jadi lebih semangat kerja. Kerjanya jadi enggak main-main dan kebanyakan bercanda juga," kata Emma,

staf bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Setditjen Farmalkes) Kementerian Kesehatan kepada Liputan6.com sambil tersenyum.

Ia juga bisa mengatur waktu dengan baik antara ikut mengurus anak di TPA dengan bekerja. Sebagai ibu pekerja, aktivitas memantau anak di sela-sela jam istirahat kerja dan memompa Air Susu Ibu (ASI) di kantor untuk persediaan buah hati tetap dilakoni Emma. Hal itu juga tidak memengaruhi pekerjaannya meski memompa ASI butuh 30 menit sampai 1 jam.

"Sejauh ini, target pekerjaan tercapai. Enggak ada kendala karena harus mengurus anak (yang dititipkan di TPA) di kantor. Saya kan bekerja sesuai tugas di bagian farmasi dan alat kesehatan. Dan hasil kerjaan juga oke," Emma menambahkan.

Setiap hari kerja, Emma membawa anak ketiganya, Hanif Abbad Ramdani, berusia 20 bulan ke TPA Serama. Pukul 06.00 WIB, ia sudah dalam perjalanan ke kantor dari rumahnya di bilangan Utan Kayu, Jakarta Timur. Sembari diantar sang suami menggunakan mobil pribadi, anak pertama dan kedua Emma juga diantar ke SD terlebih dahulu.

CEGAH KEKERASAN ANAK

Kehadiran TPA didukung adanya peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 5 tahun 2015 tentang penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja. Namun, jauh sebelum peraturan tersebut keluar, petunjuk teknik pembangunan TPA sudah lebih dulu diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku petunjuk teknis penyelenggaraan TPA, yang diterbitkan pada tahun 2011.

"Syarat mendirikan TPA sudah ada kebijakannya. Ada standar baku yang profesional mendirikan TPA diruang publik. Petunjuk teknis juga berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," papar Asisten Deputi bidang Infrastruktur dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ratna Susianawati.

Ratna meyakini, pelayanan TPA yang sudah ada saat ini di beberapa kantor di Jakarta bekerja maksimal. Pelayanan sudah bagus dan memuaskan ibu pekerja. Dari laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak ada laporan soal keluhan terkait pelayanan TPA yang buruk.

"Mungkin ada juga kantor yang punya TPA meski tergolong minimal dan sederhana dibangun. Yang penting anak bisa dititipkan dan dijaga pengasuh sekaligus anak bisa bermain," tambah Ratna.

Komnas Perempuan memandang ketersediaan TPA tidak semata-mata membuat ibu pekerja dapat bekerja maksimal. Hal ini juga mencegah terjadi kekerasan pada anak. Artinya, anak berada dalam jangkauan pengawasan dan pengasuhan dari ibu. TPA pun sebagai bukti bahwa perusahaaan memberikan kenyamanan pada ibu pekerja.

"TPA jadi inventaris jangka panjang untuk ibu pekerja agar dapat bekerja maksimal. Tentunya, ibu pekerja juga berpotensi naik jabatan. Saya pikir, TPA sangat membantu sekali. Mendukung dan mendorong karier ibu pekerja," ungkap Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Budi Wahyuni.

DUKUNGAN PERUSAHAAN

Bagi perusahaan yang ingin atau sudah membangun TPA, perlu memerhatikan beberapa kiat fasilitas pendukung. Sehingga memberikan kemudahan bagi ibu pekerja gunakan.

Apalagi bagi ibu pekerja yang tinggal di kota besar seperti Jakarta yang macet. Waktu tempuh dari rumah ke tempat kerja pun bisa terkendala. Apalagi ibu pekerja yang rumahnya cukup jauh, seperti Bekasi, Depok, dan Bogor.

Perusahaan juga perlu mempertimbangkan, kendaraan yang digunakan ibu pekerja untuk membawa anak bersama. Budi memberikan contoh, penyediaan mobil kantor yang mengantar ibu dan anak ke kantor bisa jadi ide baik.

Selain mobil, penyediaan bus dan sopir kantor juga mempermudah ibu menitipkan anak di TPA kantor. Perusahaan

juga perlu memperhatikan fasilitas lain yang mendukung ibu pekerja seperti ruang menyusui yang dibangun di dalam TPA maupun terpisah dari TPA sehingga memudahkan ketika menyusui atau memerah ASI. Di TPA Serama dan Zwitsal Day Care Center terdapat ruang menyusui.

OPTIMALKAN POTENSI IBU BEKERJA

Unilever Indonesia meyakini, salah satu pilar terpenting yang menjadi kunci sukses adalah konsep 'creating great place for great people'. Semakin meningkatnya jumlah karyawan, yang mana mereka sudah menjadi orangtua, pihak perusahaan mengambil langkah-langkah proaktif guna membantu ibu pekerja mewujudkan potensi optimal di lingkungan korporasi.

Fasilitas ini menjadi salah satu investasi dalam hal people development, tidak hanya secara produktivitas tetapi juga loyalitas, serta bagaimana perusahaan memperlakukan dan mengembangkan karyawannya seoptimal dan sebaik-baiknya.

"Komitmen kami dalam menerapkan konsep kesejahteraan pekerja (wellbeing employee), termasuk di dalamnya kesejahteraan keluarga (wellbeing family) dari karyawan kami. Secara keseluruhan tentunya ramah terhadap ibu hamil dan melahirkan. Sebagai contoh, kami baru saja memperpanjang cuti melahirkan dari kebijakan normatif selama tiga bulan menjadi empat bulan," ungkap Chalid.

Selain itu, ada konsep agile working yang memungkinkan karyawan Unilever Indonesia mengelola efektivitas dan efisiensi kerja secara mandiri dengan bantuan teknologi. Karyawan jadi tidak terikat untuk datang ke kantor dalam rentang waktu yang telah ditentukan.

Perusahaan melengkapi karyawan dengan perlengkapan laptop, paket data, dan ponsel sehingga dapat bekerja di mana saja. Konsep kerja seperti ini sangat ramah bagi seluruh karyawan untuk bisa bekerja kapan saja, di mana saja, sesuai kebutuhan pribadi dan keluarganya. ●

Tempat Penitipan Anak, Andalan Ibu Pekerja Urban
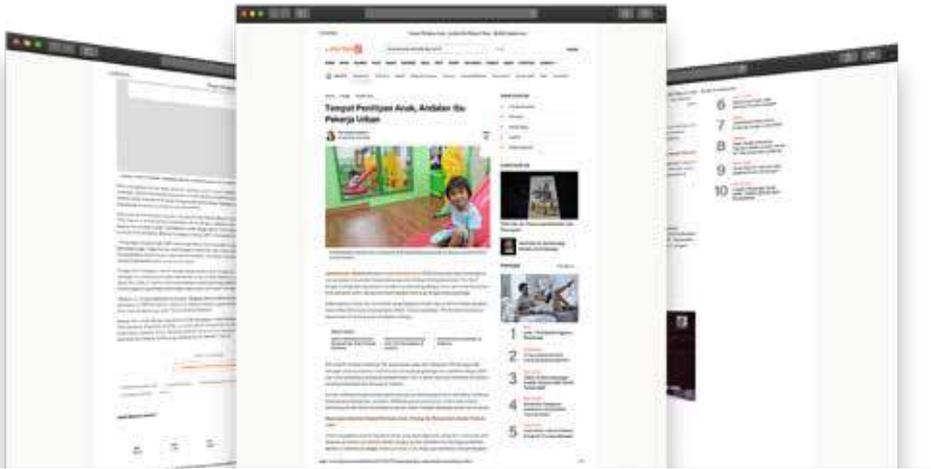
MEGA DWI ANGGRAENI - *Bandungkiwari.com*
Lahir pada 16 April 1984, dan berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Saat ini Mega bekerja di Bandung Kiwari, sebuah platform media online. Karier jurnalistiknya dimulai pada tahun 2010. Ia tercatat pernah bekerja di Harian Umum Radar Bandung, Kabarkampus.com, Remotivi, ayobandung.com, kontributor Bandung di viva.co.id, dan media online Sora Soca. Selain aktif di organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, Mega juga tercata sebagai aktivis di Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia.

BEKAL DARI BALIK TEMBOK PENJARA

Mega Dwi Anggraeni, Bandungkiwari.com

"Sriiing… sriiiing… sriiiing," terdengar suara mesin di sudut ruangan berbentuk huruf L.. Di dalamnya terdapat sekitar enam perempuan. Masing-masing duduk di belakang mesin jahit sembari menekuni jahitannya. Ada yang menjahit seprai, vuring tas, sampai seragam Bhayangkari.

Setiap pagi sampai sore, ruangan dalam bangunan berbentuk kubus itu diisi para penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Bandung. Terutama mereka yang tertarik membuat pola dan menjahit. Biasanya, para penjahit berseragam biru muda itu mendapat pesanan jahitan dari luar lapas.

Menjahit merupakan salah satu pembinaan kemandirian yang diberikan oleh lapas untuk para penghuninya. Mereka yang tertarik dan berminat mengembangkan bakat bisa datang ke pos kerja menjahit setiap pagi. Berbagai alat dan kebutuhan menjahit tersedia lengkap di sana. Mulai dari mesin jahit, benang, sampai berbagai bentuk kancing. Ada lebih dari lima mesin jahit yang bebas digunakan selama jam kerja.

Selain pos kerja menjahit, ada juga pos kerja kecantikan. Bentuknya serupa salon-salon di luar lapas, hanya saja ukurannya lebih kecil. Ruangan itu hanya mampu menampung tiga kursi, tiga meja rias, dan tiga cermin. Meski begitu, perlengkapan salon dan kecantikannya cukup lengkap. Mulai dari gunting dan sisir, pengering rambut sampai perlengkapan mewarnai rambut. Letak

pos kerja yang satu ini tepat di samping pos kerja menjahit. Siapa saja yang tertarik bermain dengan berbagai produk kecantikan, bereksperimen dengan model rambut, bisa berkunjung ke pos ini.

Di samping pos kerja kecantikan, terdapat ruangan yang ukurannya tiga kali lebih luas. Dindingnya bercat biru muda. Bermacam lukisan pemandangan, bunga, foto keluarga, menggantung hampir menutupi seluruh dinding. Warnanya menarik mata, ada merah, kuning, biru, hijau, dan putih.

Hari itu, pos hanya diisi oleh empat orang. Semua larut dalam imajinasi, mata terpaku pada lukisan setengah jadi di hadapan para pelukis berseragam itu. Sesekali kuas di tangan kanan mereka bergerak lambat di atas kanvas, memenuhi setiap sudutnya dengan warna yang selaras.

Melangkah keluar dari ketiga pos tersebut, melintas lapangan berlantai semen, terdapat pos kerja khusus untuk para penghuni lapas yang suka bermain tanah, air, dan tumbuhan hijau.

Lokasinya terletak di belakang salah satu blok kamar. Di sana, berbagai tanaman hias tumbuh subur. Beberapa hasil perkebunan seperti terong, jagung, tomat, pun tampak mulai siap dipanen.

Ada lebih dari sepuluh perempuan penghuni lapas yang bekerja di sana. Tanpa memedulikan sinar matahari yang mulai menyengat, mereka tetap asyik mencukil tanah, menyiram, menanam, dan membersihkan kolam.

Aktifitas itulah yang rutin dilakukan oleh sebagian warga Lapas Perempuan Kelas IIA, Sukamiskin, Bandung. Setiap pukul 08.00 WIB mereka mulai keluar kamar, bersiap memasuki pos kerja masing- masing. Mereka baru kembali ke kamar tepat pukul 17.00 WIB. “Di luar aktifitas ini, biasanya kami juga mengadakan pelatihan dengan pihak ketiga,” ucap Kepala Seksi Kegiatan Kerja Inna Imaniati kepada Bandung Kiwari, saat ditemui di sela-sela kegiatan kerja, beberapa waktu lalu.

Cukup banyak pembinaan kemandirian yang diberikan oleh Lapas Perempuan untuk seluruh warga binaannya. Beberapa juga menyertakan sertifikat untuk para pesertanya, terutama pelatihan yang digelar oleh pihak ketiga. Harapannya, pelatihan

dan sertifikat itu bisa menjadi bekal untuk para narapidana, warga binaan, dan tahanan saat mereka menghirup udara bebas. Bukan itu saja, lapas juga menyediakan kejar paket A sampai C. Khusus untuk para penghuni lapas yang ingin menyelesaikan pendidikannya. Biasanya kelas digelar setiap hari Selasa dan ujian digelar per semester.

Sayangnya, tidak semua penghuni lapas memiliki kesadaran dan mau berpartisipasi dalam berbagai program pembinaan kemandirian. Inna mengaku selalu kesulitan mengajak mereka mengikuti kegiatan. Padahal hasil seluruh program pembinaan tersebut bisa menjadi nilai jual ketika mereka melamar pekerjaan selepas menjalani masa hukuman.

"Mereka kan tinggal duduk manis, dapat ilmu, dapat sertifikat juga. Tapi, ya begitu. Susah sekali mengajak mereka," imbuhnya.

Salah satu kejadian yang sampai sekarang melekat dalam ingatan Inna, ketika salah satu pihak ketiga mengadakan pelatihan shibori. Shibori merupakan teknik menghias kain ala Jepang. Caranya dengan mengikat kain berwarna putih polos dan mencelupkannya ke adonan pewarna indigo. Hasil ikatan atau lipatan itulah yang nantinya akan menjadi corak pada kain. Biasanya kain shibori memiliki nilai jual tinggi, terutama ketika sudah menjadi produk fashion.

Ketika itu, penyelenggara meminta lapas mengajak 100 peserta. Tapi Inna tak mampu memenuhi kuota Padahal dirinya sudah berusaha mengajak seluruh penghuni lapas untuk ikut pelatihan membuat shibori.

Inna tidak memiliki hak memaksa seluruh narapidana di lapas perempuan untuk membekali diri dengan keterampilan. Atau memaksa mereka mengikuti seluruh pelatihan demi mengembangkan kemampuan. Semua selalu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Meski sebenarnya upaya mengubah kepribadian pun sudah dilakukan.

Sebelum mendapatkan bimbingan kemandirian, seluruh narapidana ini wajib mengikuti bimbingan kepribadian. Berbagai kegiatan yang diharapkan bisa mengubah mental, pribadi, fisik,

dan rohani menjadi lebih baik dilakukan sejak masa pidana hingga setengah masa pidana.

"Kami cuma bisa berusaha semaksimal mungkin supaya saat bebas nanti, mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama," kata Inna.

Meski begitu dirinya tak menutup mata, stigma masyarakat masih membayangi hidup para calon mantan narapidana. Stigma yang membuat sebagian mantan narapidana kembali menghabiskan separuh hidup dalam benteng penjara. Namun, Inna yakin ketika memiliki kemampuan ditambah dengan berbagai sertifikat pendukung, masih ada perusahaan yang mau menerima karyawan meski menyandang status mantan narapidana.

SEMBUNYI DARI BAYANG-BAYANG TEMBOK PENJARA

Nunuy tersenyum lebar. Di dadanya menyilang tali tas, sementara tangan kanannya menjinjing bungkusan plastik berisi celana yang baru dia beli. Perempuan kelahiran 60 tahun lalu itu langsung menyambut Apih Garut, sahabat lamanya dengan pelukan. Sudah bertahun-tahun mereka tak jumpa, tepatnya semenjak Nunuy menghirup udara bebas pada 2011 lalu.

Sore itu, matahari sudah mulai turun dari singgasananya. Langit mulai berganti warna menjadi kuning keemasan. Namun, nafas kehidupan di Terminal Leuwi Panjang, Bandung masih terlihat. Sesekali bus antar kota-antar provinsi pergi meninggalkan parkiran. Di dalamnya, beberapa penumpang duduk manis, menunggu diantar sampai tujuan. Beberapa pedagang juga masih melayani pelanggan, meski terlihat lebih santai.

Sudah jadi kebiasaan perempuan bernama asli Nurmawati ini keluar dan masuk Terminal Leuwi Panjang. Bergelut dengan asap knalpot bus, berteman dengan supir, kernet, calo, juga preman. Terminal sudah jadi tempat tongkrongan Nunuy sejak sebelum keluar dari lapas. Pasca bebas, terminal menjadi tempatnya menyambung hidup.

Hampir setiap hari Nunuy datang ke terminal demi mencari

sesuap nasi. Sebenarnya, perempuan yang sudah dua kali hidup dalam benteng penjara ini memiliki suami yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia bekerja meski hanya mengandalkan proyek. Tapi alasan itulah yang membuat Nunuy merasa perlu ikut bertanggung jawab untuk membantu perekonomian rumah tangganya. Sayang, usaha yang dia jalani hanya berjalan dua tahun. Hatinya patah, semangatnya turun, usai suaminya berpulang.

"Saya drop, jadi berhenti berjualan," kisahnya.

Hampir setahun lamanya Nunuy hidup dalam kesedihan. Tapi dia tak ingin kembali terjerumus dalam lubang hitam narkoba yang membuatnya menjalani separuh hidup dalam bui. Kemudian sadar, dia masih harus melanjutkan hidupnya. Hingga akhirnya memilih kembali berbisnis.

Lapak nasi bungkus yang dulu ia kelola, dia tinggalkan. Kali ini Nunuy memilih mengkreditkan barang kepada orang-orang yang ada di terminal. Tapi sekali lagi, dia harus menghentikan usahanya lantaran banyak yang membawa lari barang-barang kreditannya. Kini, dia mengandalkan hidup hanya dari penghasilan sang adik.

Meski memiliki banyak kenangan buruk di terminal, Nunuy tetap tak bisa melepaskan hidupnya dari sana. Sesekali, dia masih suka berkunjung untuk bertemu dan berkeluh kesah pada teman senasibnya, Ida. Sesama mantan narapidana, yang menyambung hidup dengan berjualan kopi seduh di salah satu sudut terminal.

Sejak meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Bandung, Nunuy memang tak pernah berniat bekerja di perusahaan. Dia lebih memilih berwirausaha, lantaran tak percaya diri jika harus melamar pekerjaan di sektor formal. Mengingat pendidikannya terputus di tengah jalan. "Saya hanya mengantungi ijazah SMP, mana ada perusahaan yang mau menerima pekerja SMP?"

Bukan hanya itu, statusnya sebagai mantan narapidana juga membuatnya menjadi warga minoritas dalam lingkungan sosial. Terlebih, Nunuy pun tak memiliki bekal apapun selepas menghirup udara bebas. Dia tak pernah ikut berbagai program

pembinaan kemandirian saat berada dalam lapas. Dia juga tak pernah menerima bekal apapun untuk kehidupan di luar lapas. Meski hanya selembar sertifikat keahlian.

"Buat orang seperti saya, rekomendasi dan sertifikat memang sangat penting untuk bekal di luar lapas," katanya.

Nunuy hanya satu potret mantan narapidana perempuan yang hidupnya terlunta-lunta usai menjalani masa tahanan, lantaran tak bisa mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Sekarang, dia berhenti berharap mendapatkan pekerjaan yang layak. Meski mengaku tak akan menolak jika ada yang membutuhkan tenaganya. Terutama untuk urusan memasak.

Sebuah jurnal studi berjudul "Aspirasi Masa Depan Narapidana Ditinjau dari Perspektif Kepemudaan", mencatat, sebanyak 80 persen narapidana memilih untuk meninggalkan pekerjaan lama dan merintis usaha mandiri. Alasannya, dengan berwirausaha mereka tak perlu lagi melamar karena yakin sektor formal sudah menutup pintu untuk para mantan narapidana. Kecuali mereka memiliki relasi dalam perusahaan yang akan menjadi penjamin.

Padahal sebuah penelitian yang dilakukan oleh CareerBuilder, sebuah situs pencari kerja dari Amerika menyebutkan masih ada manager personalia yang mengabaikan catatan kriminal para pencari kerja. Mereka yang pernah terjerat kasus kriminal, tetapi mau belajar dari kesalahan masih memiliki kesempatan mendapat pekerjaan.

Artinya, para pencari kerja yang memiliki catatan kriminal tersebut perlu terlihat aktif. Semisal mengambil kelas untuk mengembangkan keterampilan, menjadi relawan, atau terlibat dalam jejaring sosial. Apalagi, hak para pencari kerja di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tercantum dalam pasal 5 yang menyebutkan, "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan".

WIRAUSAHA MASIH JADI PILIHAN UTAMA MANTAN NARAPIDANA

"Tidak banyak mantan narapidana yang bekerja di sektor formal, meski statusnya pernah jadi karyawan perusahaan," ucapan itu muncul dari Iyus Yusup, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Madya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I, Bandung.

Ketika menjalani pekerjaan sebagai PK Muda, Iyus kerap berhubungan dengan ratusan klien yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB). Sebagian merupakan perempuan yang berusaha kembali menjalani kehidupan bermasyarakat di luar lapas.

Iyus berusaha membantu seluruh klien termasuk urusan pekerjaan. Membimbing dan mendukung mereka supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Namun, sampai saat ini Iyus belum pernah menemukan mantan penghuni lapas perempuan yang bekerja di sektor formal.

Berdasarkan pantauannya, Iyus melihat hampir 50 persen kliennya kembali bekerja di sektor informal. Mereka merintis usaha dari awal. Sementara 40 persen kliennya tak memiliki pekerjaan dan sisanya yang kembali bekerja di sektor formal, itu pun tak bertahan lama.

Para mantan narapidana yang kembali bekerja di sektor formal, biasanya pernah menyandang status kerja sebagai karyawan perusahaan. Tindak pidana yang dilakukannya pun bukan kasus narkoba, melainkan penggelapan dan penipuan. Tapi jumlah perempuan yang terjerat kasus tersebut, tak sebanyak kasus narkoba.

Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Bandung dari sekitar 400 narapidana yang ada, 70 persen atau tiga per empat penghuni blok kamarnya merupakan terpidana kasus narkoba. Latar belakang pekerjaannya beragam, tetapi mayoritas adalah perempuan pekerja malam.

Iyus pernah mendapatkan satu klien yang mendapat kesempatan bekerja kembali di bank. Namun, tak lama kemudian perusahaan mengetahui catatan hitamnya. "Setelah itu dia

merasa suasana kantor jadi tidak enak, dan memutuskan untuk mengundurkan diri," lanjut Iyus.

Salah satu faktor utama mantan narapidana perempuan lebih memilih berwirausaha adalah stigma yang melahirkan krisis percaya diri. Meski sebenarnya mereka mengetahui banyak perusahaan yang masih membutuhkan tenaga kerja.

Hampir setiap hari selama empat tahun, Iyus harus mendengarkan kegalauan para klien perempuannya. Tingkat kecemasan mereka meningkat ketika akan mengirimkan lamaran ke sebuah perusahaan. Padahal, mereka sudah cukup memiliki bekal keterampilan yang didapat selama menjalani masa hukuman.

"Aduh Pak, nanti mereka tahu ngga ya aku pernah tinggal di lapas? Terus nanti gimana ya?" ucap Iyus meniru salah satu kliennya. Dan pertanyaan itu akan terus berulang hingga akhirnya mereka membatalkan niat untuk melamar pekerjaan.

Pilihan memang selalu ada di tangan kliennya. Jika mereka bisa menjalani kehidupan baru sebagai wiraswasta, Iyus akan mengalihkan fokus perhatiannya kepada klien yang masih menganggur. Dia juga kerap memberikan masukan, dorongan, bahkan memberikan informasi ketika salah satu mitra Bapas membuka lowongan kerja tanpa memandang status mantan narapidana.

Satu waktu, ada perusahaan outsourcing menghubungi Bapas. Mereka membutuhkan sejumlah tenaga kerja keamanan. Tentu saja Iyus langsung menghubungi beberapa klien yang dinilai memenuhi syarat. Mendorong mereka untuk memulai kehidupan baru dengan pekerjaan baru. Namun, hingga lowongan pekerjaan ditutup, tak ada satu pun kliennya yang melamar.

"Kadang saya bingung mereka ini maunya apa," ujarnya.

PELUANG KERJA UNTUK PARA MANTAN NARAPIDANA

"Tidak ada peraturan yang melarang mantan narapidana perempuan dan laki-laki bekerja di tempat kami."

Mantan narapidana perempuan dan laki-laki memiliki hak

yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Apalagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan melindungi semua para pencari kerja di Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 5, "setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan". Meski begitu, tak banyak orang yang memahami peraturan tersebut.

Hingga akhirnya para mantan narapidana lebih memilih membuka usaha ketimbang bekerja di sektor formal, usai menjalani masa tahanan. Sebenarnya, bukan para pencari kerja. Para pemilik lapangan kerja pun seolah tak memahami isi peraturan tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I, Bandung, salah satu perusahaan tidak dapat melindungi pekerja yang statusnya sebagai mantan narapidana. Menciptakan suasana tidak nyaman, hingga membuat mantan narapidana yang berusaha memulai kembali hidup bermasyarakat dalam lingkup kantor mengundurkan diri.

Dari sekian banyak perusahaan di Indonesia, hanya satu yang menyatakan secara jelas mempersilakan para mantan narapidana untuk melamar ke tempatnya. "Siapa pun bisa melamar ke tempat kami, selama mereka memiliki kemampuan yang kami butuhkan dan bersungguh-sungguh," ucap Denny Henry Samboh, General Manager HRM PT. PAN Brothers TBK kepada Bandung Kiwari.

Meski begitu, keputusan memang bukan ditangan Denny. Sebagai Human Resource Management, Denny hanya bisa memberikan rekomendasi kepada para user atau departemen yang membutuhkan tenaga kerja di PT PAN Brothers TBK. Para user inilah yang nantinya akan menerima atau menolak para calon pekerja.

Bukan hanya itu, PAN Brothers pun memberikan kesempatan kepada seluruh para mantan narapidana untuk melamar ke perusahaan. Tidak ada kriteria khusus perempuan atau laki-laki. Setelah menerima EDGE Certification satu tahun lalu, PAN Brothers memang menyingkirkan kriteria tersebut dalam iklan lowongan kerja. EDGE merupakan metodologi penilaian global dan standar sertifikasi bisnis untuk kesetaraan gender.

Di Indonesia, PAN Brothers merupakan satu-satunya garmen industri pertama yang tersertifikasi untuk kesetaraan gender. "Cuma memang, di beberapa sektor banyak yang pekerjanya perempuan. Misalnya untuk menjahit, kebanyakan perempuan karena yang melamar pun kebanyakan perempuan. Meski kami juga memberikan kesempatan untuk laki-laki," tambahnya.

Meski belum memiliki pengalaman menerima mantan narapidana, PAN Brothers tetap memberikan kesempatan. Terlebih, perusahaan yang bergerak di bidang garment ini masih membutuhkan sekitar tujuh juta tenaga kerja di berbagai sektor, yang tersebar di beberapa daerah di Pulau Jawa. Seperti Boyolali, Semarang, Demak, Jakarta, Tangerang, Bandung, Cimahi, dan Tasikmalaya.

"Kami berharap, khusus garmen yang mainnya dieksport mereka mau disertifikasi supaya mereka bisa setara," tutupnya. ●
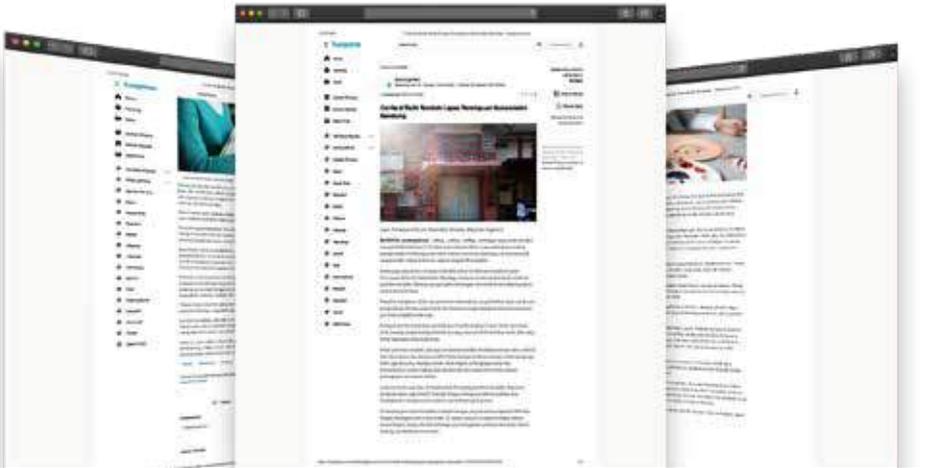
MELKI PANGARIBUAN - *Satuharapan.com*
Panggilannya adalah Melki. Pria kelahiran Kendari, pada 10 Maret 1988 ini kini menetap di Bekasi. Saat ini Melki bekerja sebagai reporter di satuharapan.com. Sudah lima tahun enam bulan ia bekerja di satuharapan.com, dan masih bekerja hingga saat ini.

STIGMA HAMBAT PEREMPUAN BERKIPRAH DI INFRASTRUKTUR

Melki Pangaribuan, Satuharapan.com

"Perempuan pekerja infrastruktur tidak banyak karena pekerjaan konstruksi dikenal dengan pekerjaan lapangan, sehingga mungkin tidak terlalu sesuai bagi sebagian perempuan dan lebih dirasa cocok untuk kaum pria."

Matahari menjunjung tinggi di langit. Sinar teriknya meliputi sekitar wilayah Kota Bekasi, Senin 30 Juli 2018. Debu tanah dan butiran pasir sesekali mengudara tertiup angin. Lalu lalang kendaraan bermotor terlihat ramai di area proyek pembangunan jembatan layang di perempatan Jalan Rawa Panjang, yang akan menghubungkan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi.

Siang itu sekitar pukul 11.30 WIB, beberapa laki-laki pekerja infrastruktur cekatan mengerjakan pemasangan besi pondasi jembatan layang yang melintasi jalur Sungai Bekasi. Para pekerja sebagian mengenakan helm proyek berwarna kuning dan putih, ada juga pekerja yang memakai topi atau kain penutup kepala. Satu orang pekerja sedang mengoperasikan alat berat pengeruk tanah untuk pemasangan dasar tiang pondasi. Tiga atau empat orang lainnya memasang kawat tulang besi untuk pondasi, dan seorang pekerja mengatur lalu lintas keluar masuk kendaraan di area SPBU dekat proyek tersebut.

Beberapa langkah dari situ sebagian pekerja lain terlihat sedang duduk-duduk beristirahat di pos bedeng mereka. Pekerja proyek yang ditemui saat itu mengatakan perusahaan kontraktornya berasal dari salah satu jasa konstruksi swasta (ECP). Mereka terbata-bata saat ditanyai siapa pemimpin proyek dan di mana mandornya. Ketika ditanya apakah mereka memiliki rekan kerja perempuan di dalam proyek tersebut, salah satu pihak keamanan yang menyebut nama panggilannya "Ucok," menjawab tidak ada pekerja perempuan pada proyek itu, meski pernah ada mahasiswi yang magang beberapa waktu lalu.

Pekerja yang ditanyai itu meminta untuk lebih baik menanyakan langsung kepada pihak mandor atau pelaksana proyek PT Intan Cipta Perdana yang berada di lapangan dekat pengerukan tanah pondasi. Namun saat dihampiri saat itu, tidak ada satu pun pelaksana proyek dan mandor dapat ditemui.

KASIHAN JIKA PULANG MALAM

Di waktu terpisah, karyawan bagian Hubungan Masyarakat (Humas) di proyek PT Intan Cipta Perdana, Muh Ridha, membenarkan bahwa perusahaan mereka tidak melibatkan karyawan perempuan dalam segala pengerjaan proyek jembatan layang, terkecuali mahasiswa-mahasiswi yang sedang praktik kerja lapangan (PKL). "Tidak ada (karyawan) perempuan, kalau pun ada perempuan itu mungkin orang-orang di warung, yang masak-masak, bukan karyawan kami. Karena kami menakutkan adanya indikasi-indikasi kalau (pekerja perempuan) pulang malam kasihan. Tapi kalau yang PKL ada pernah dua laki-laki dan dua cewek (perempuan), mereka PKL bukan karyawan kami," kata Ridha yang biasanya dipanggil Daeng itu, saat dihubungi satuharapan.com, Senin, 10 September 2018.

Di pojok belakang proyek itu, memang ada bedeng bangunan seukuran 5x5 meter dari triplek kayu yang merupakan warung penjual nasi, rokok, dan kopi. Rumah sederhana untuk makan dan minum bagi para pekerja sehari-hari. Wawan, pemilik warung merupakan warga Kampung Pangkalan Bambu Kelurahan

Marga Jaya Kota Bekasi sedang mencuci piring saat ditemui. Ia mengaku warung nasinya didirikan sejak proyek jembatan layang itu dimulai. Ia dibantu empat orang anggota keluarga yang semuanya perempuan.

Tak banyak informasi yang dapat diperoleh dari Wawan. Saat itu ada juga dua orang ibu masih sibuk menyiapkan pesanan makanan. Kedua perempuan itu malu-malu dan enggan ditanyai. Sedangkan dua perempuan lain yang merupakan keponakan Wawan tidak berada di warung nasi itu. Mereka memang bekerja untuk Wawan, tapi bukan pekerja proyek bangunan.

Tak jauh dari pekerjaan proyek jembatan layang itu, berjarak sekitar 50 meter ada proyek pembangunan lainnya terlihat menjulang tinggi sekitar 30 lantai dari lokasi pembangunan jalan layang Rawa Panjang. Gedung itu merupakan proyek pembangunan apartement di Jalan Cut Meutia, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang laki-laki pekerja proyek yang sedang istirahat siang di sebuah warung nasi tidak bersedia diwawancarai tanpa seizin perusahaannya. Bahkan ketika ditanya mengenai apakah mempunyai rekan kerja perempuan di proyek tersebut dia memilih bungkam.

Senada dengan pekerja itu, pihak keamanan yang ditemui, Mamat tidak berani memberikan banyak keterangan. Ia hanya mengatakan di proyek gedung itu tidak ada pekerja perempuan. Mamat juga meminta untuk menghubungi pihak proyek yang berkantor di sebelah gedung bangunan supaya mendapatkan keterangan lebih jelas.

TIDAK MUDAH DITEMUKAN

Ada sejumlah proyek lainnya melintasi wilayah Bekasi, seperti proyek jalur lintasan light rail transit (LRT) atau kereta api ringan, pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated. Ada juga pekerjaan proyek pembangunan sambungan jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), area dekat gerbang tol (GT) Jakasampurna, Jalan KH Noer Ali atau sekitar 15-20 menit dari arah kantor pusat pemerintahan Kota Bekasi.

Para pekerja laki-laki sedang sibuk bekerja di samping Saluran Kalimalang Bekasi. Paku-paku bumi sebagian masih ditidurkan di atas tanah coklat. Alat berat sedang tidak beroperasi siang itu. Kendaraan keluar masuk melewati papan seng pembatas jalan proyek. Pekerja laki-laki yang ditemui tidak bersedia memberikan pernyataan terkait ada atau tidaknya perempuan pekerja infrastruktur.

Saat itu memang tak terlihat satu pun pekerja perempuan di lokasi proyek lanjutan Tol Becakayu. Mereka meminta untuk menanyakan langsung ke perusahaan kontraktornya, PT Waskita Karya. Kemudian permohonan wawancara disampaikan kepada Kepala Divisi III perusahaan Waskita, namun sejak 1 Agustus 2018 dengan berbagai alasan hingga awal September 2018 tidak ada penjelasan kepastian dari pihak Waskita untuk kesediaan diwawancarai.

Laki-laki pekerja konstruksi di sektor infrastruktur lebih mudah ditemukan ketimbang pekerja perempuan pada berbagai proyek pembangunan di Bekasi. Tetapi untuk mendapatkan perempuan pekerja konstruksi untuk diwawancarai, hal itu tidak mudah ditemukan.

Di wilayah Bekasi dan sekitarnya hampir tidak mungkin dapat menemukan pekerja/buruh perempuan dalam pembangunan infrastruktur. Umumnya di lapangan kebanyakan laki-laki yang bekerja seperti mengecor, mengaduk pasir dan semen, memasang kawat besi, dan sebagainya. Perempuan biasanya ditemui sebagai penyedia makanan atau minuman untuk konsumsi bagi buruh bangunan laki-laki di sekitar tempat proyek. Kalau pun ada pekerja perempuan biasanya sebagai staf administrasi atau staf keuangan. Itu pun mereka enggan diwawancarai dan mesti izin berbelit-belit dengan pemimpin perusahaan proyeknya.

Salah satu perempuan pekerja infrastruktur yang tidak mudah ditemukan di berbagai proyek di Bekasi dan sekitarnya, yaitu Anastasya Yolanda (32). Ia saat ini menjabat sebagai Kasie Enjiniring Proyek Jakarta International Velodrome, PT Wijaya Karya (WIKA). Banyak tempat dan berbagai proyek telah ia

kerjakan di badan usaha milik negara (BUMN) ini.

Perempuan kelahiran Jakarta, 1986 itu awal mulanya bekerja di WIKA dengan melamar melalui jalur management trainee setelah lulus dari perguruan tinggi. Ia memilih menjadi pekerja infrastruktur karena sesuai dengan latar belakang pendidikannya sebagai arsitektur, selain dari tenaga profesional bidang konsultan yang digelutinya.

Sehari-hari Tasya, sapaan akrabnya, bertugas berkaitan dengan aspek engineering bangunan gedung meliputi yang meliputi perencanaan dan gambar-gambar terkait, metode pelaksanaan pekerjaan, time schedule, dan value engineering. Dia bekerja antara delapan hingga 10 jam sehari dari Senin hingga Jumat, dan enam jam pada hari Sabtu.

Selama ini Ibu dari dua anak ini mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan, seperti cuti haid, cuti hamil, libur atau istirahat dan lainnya. Tetapi khusus mengenai cuti haid ia tidak pernah mengajukan haknya ke perusahaan. "Selama ini hak cuti saya selalu dipenuhi perusahaan namun saya pribadi tidak pernah mengajukan untuk cuti haid," kata Anastasya Yolanda dalam keterangannya kepada satuharapan.com awal bulan September 2018 di Jakarta setelah sibuk mempersiapkan Pesta Olahraga Asia ke-18 Jakarta- Palembang 2018.

KUAT BATIN

Anastasya mengaku memiliki empat rekan perempuan yang membantunya dalam pekerjaan sehari-hari. Ia memberikan pandangannya tentang perempuan yang bekerja dalam pembangunan infrastruktur, menurutnya, perempuan yang bekerja pada sektor pembangunan infrastruktur adalah perempuan yang tangguh. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik saja karena waktu kerja yang kadang lebih panjang, namun bagi seorang ibu juga harus kuat secara batin karena harus merelakan waktu bersama keluarga hanya untuk memastikan pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Ia menilai perempuan pekerja infrastruktur tidak banyak

karena pekerjaan konstruksi dikenal dengan pekerjaan lapangan, sehingga mungkin tidak terlalu sesuai bagi sebagian perempuan dan lebih dirasa cocok untuk kaum pria. “Dominasi kaum pria dalam pekerjaan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri,” katanya.

Tasya tidak menampik kemungkinan, perempuan tidak tertarik karena alasan fisik maupun kemungkinan karena adanya stigmatisasi bahwa perempuan tidak bisa bekerja di sektor infrastruktur. Menurutnya, bagi sebagian perempuan ada yang tidak nyaman harus bekerja di lapangan dengan kondisi cuaca dan terkena debu sewaktu-waktu. Meski bagi sebagian perempuan lainnya, justru menjadi hal yang menyenangkan.

“Kami bisa membuktikan bahwa untuk membangun karya-karya infrastruktur bertaraf internasional dan terbaik juga turut didukung oleh peran penting kaum perempuan,” ujar Tasya. Rasa bangga tak bisa ditutupi oleh perempuan asal Pekanbaru-Riau itu.

Tasya yang bekerja di sektor infrastruktur sejak 2010, mengakui selama ini keluarganya mendukung penuh pekerjaannya. Sementara dukungan di tempat kerja ia rasakan sebagai budaya kerja di WIKA yang selalu unggul dalam kerja sama dari seluruh rekan kerja untuk secara bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan.

Terhadap kesetaraan gender di dunia kerja, khususnya sebagai perempuan pekerja di sektor infrastruktur, Tasya menilai stigma dunia konstruksi saat ini memang masih didominasi pria akan tetapi wanita pun mampu berperan sesuai dengan tugas dan wewenang sebaik pria. Menurutnya wanita harus diberikan kesempatan dan kepercayaan selayaknya pria. Dia berharap di masa depan akan lebih banyak wanita yang mampu berperan dalam sektor infrastruktur.

171.364 ORANG DI BIDANG BANGUNAN

Kota Bekasi memiliki visi “Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”. Secara khusus dijelaskan dalam “Bekasi Maju” yaitu

menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju.

Data BAPPEDA Kota Bekasi yang diperoleh dari aplikasi Data Pintar Kota Bekasi v2.0 yang diakses pada 19 Juli 2018, tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah perempuan pekerja di sektor konstruksi.

Beberapa serikat buruh/pekerja bahkan tidak memilki anggota perempuan dalam sektor pembangunan infrastruktur. Sedangkan pembangunan di berbagai sarana dan prasarana serta proyek-proyek di Bekasi terus dilakukan. Sementara kesetaraan gender di dunia kerja khususnya perempuan dalam pembangunan infrastruktur terbatas.

Berdasarkan "Profil Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017" yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, disebutkan dari total penduduk yang bekerja di Kota Bekasi yang berjumlah 2.110.427 orang pada tahun 2016, sebanyak 8 persen bekerja di bidang bangunan yaitu 171.364 orang. Namun tidak ada keterangan rinci jumlah pekerja perempuan dan laki-laki di sektor ini.

Sementara laju implisit produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Bekasi berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2013-2016 di sektor konstruksi sebesar 4,47 pada tahun 2013 dan sebesar 1,43 persen pada tahun 2016.

Dalam Laporan Ketenagakerjaan Indonesia 2017: Memanfaatkan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Penciptaan Lapangan Kerja yang diterbitkan Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) Kantor Jakarta, siswa diminta untuk menyebutkan sektor di mana mereka ingin bekerja setelah lulus. Tiga sektor yang paling diinginkan oleh perempuan Indonesia adalah konstruksi (15,6 persen), manufaktur (12,2 persen) dan layanan komunikasi dan teknologi (10,9 persen).

Pada laporan ILO itu yang menarik, meskipun konstruksi

merupakan salah satu sektor yang menjadi keinginan bekerja siswa perempuan, jumlah perempuan yang bekerja di sektor ini relatif lebih rendah. Pada 2016, dari 7,9 juta pekerja di sektor konstruksi, hanya 165.148 orang atau sedikit lebih dari 2 persen adalah perempuan. Hampir 91 persen pekerja di sektor konstruksi dipekerjakan sebagai operator dan pekerja kasar/buruh. Jumlah total perempuan yang bekerja di sektor konstruksi, 55 persen di antaranya bekerja sebagai operator dan buruh.

Namun proporsi perempuan yang bekerja di bidang administrasi dan yang berhubungan dengan hal itu lebih tinggi, yaitu 26,9 persen, bila dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 1,3 persen). Jumlah perempuan yang ingin bekerja di sektor konstruksi dan manufaktur lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 27,8 persen dan 15,7 persen.

Sementara itu dalam laporan ILO di Jenewa tahun 2015, "*Good Practices and Challenges in Promoting Decent Work in Construction and Infrastructure Projects*" disebutkan tingkat partisipasi perempuan dalam sektor konstruksi di Asia lebih tinggi daripada di wilayah lain. Tingginya angka pekerja perempuan sektor konstruksi terdapat di beberapa negara, seperti Kazakhstan (23,5 persen), Singapura (22,9 persen), Mongolia (21,1 persen) dan Ethiopia (17,8 persen). Sebagian perempuan bekerja di administrasi, sumber daya manusia, klerus dan bidang pekerjaan yang berhubungan dengan kantor dan teknis lainnya.

Ada tantangan lain untuk merekrut lebih banyak perempuan ke dalam industri konstruksi, bahkan di negara-negara maju. Menurut Building and Wood Worker's International (BWI), partisipasi perempuan terhalang oleh budaya dan praktik yang berfokus pada laki-laki yang mendominasi industri dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari dan pekerjaan, seperti persepsi bahwa perempuan yang bekerja di bidang konstruksi lebih menyukai pekerjaan yang tidak terampil.

BEKERJA DENGAN HATI

Syailendra Ogan, General Manager Human Capital WIKA

mengatakan selama ini, setiap sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh WIKA dipilih berdasarkan kapabilitas, bukan gender, dan pekerja perempuan sudah membuktikan mereka punya kemampuan setara dengan laki-laki. Menurutnya, yang membedakan mereka dengan laki-laki adalah bagaimana perempuan memandang berbagai hal dengan menggunakan hati.

"Mereka (perempuan) mengelola dengan perasaan," ujar Syailendra Ogan, di tengah kesibukan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.

WIKA itu, kata Syailendra, dikenal dengan nilai kekeluargaan yang tinggi, ketika dihadapkan pada masalah, kaum perempuan akan menunjukkan sikap kewanitaan dan keibuannya sehingga masalah bisa diselesaikan dengan lebih halus. Perusahaan memandang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan dalam satu pekerjaan yang menuntut waktu ekstra untuk mencapai target yang mengharuskan kerja lembur pekerja tersebut, baik perempuan maupun laki-laki wajib lembur untuk menyelesaikannya.

Menurut Syailendra, pekerjaan sebagai kontraktor banyak bersentuhan dengan mandor, subkon, serta pekerja konstruksi lainnya yang biasanya bersifat keras. Pendekatan yang sifatnya halus dibutuhkan dalam situasi tertentu, pendekatan secara halus akan lebih mencairkan suasana, dan pekerja perempuan sangat cocok untuk bertindak lebih halus dan lebih sabar ketimbang pekerja laki- laki.

Ketika memperkerjakan perempuan sebagai pekerja konstruksi, kita sudah paham konsekuensinya. Salah satu contoh konsekuensinya adalah ketika mereka hamil dan hendak melahirkan. WIKA harus memenuhi kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku berkaitan dengan pemberian jatah cutinya, tapi ini telah disikapi dengan baik. Jika undang-undang ketenagakerjaan mewajibkan karyawan yang hamil untuk cuti tiga bulan, kita bahkan memberikan hak mereka untuk cuti selama 3,5 bulan.

"Secara hitung-hitungan mungkin nampak tidak produktif,

tetapi di WIKA mengukur pekerjaan bukan berdasarkan kehadiran atau jumlah jam kerja, melainkan dengan target yang harus dicapai, dan selama ini pencapaian target WIKA selalu dapat terpenuhi," katanya.

Lebih lanjut Syailendra mengatakan karyawan perempuan WIKA kini bahkan telah dipercaya untuk mengambil peran lebih di proyek-proyek WIKA hingga ke luar negeri. Saat ini, tanggungjawab yang diberikan didasarkan pada kompetensi yang dimiliki, semua ditentukan pada saat asesmen yang menilai kapabilitas karyawan, sehingga ketika dia lulus, perusahaan tidak akan segan-segan untuk memberikan tanggungjawab yang lebih besar.

Di WIKA sendiri, kata Syailendra, dari 14 General Manager yang merupakan posisi strategis di perusahaan, dua diantaranya dijabat oleh sosok perempuan yang luar biasa. "Mereka berdua dianggap mampu untuk meningkatkan kualitas departemen yang mereka pimpin," katanya.

CARA PANDANG MASKULIN

Sementara di waktu terpisah, Sarinah (30) dari Divisi Kampanye dan Hubungan Internasional Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (FSEDAR) di Bekasi mengatakan tidak memiliki anggota pekerja konstruksi perempuan dari sekitar 1.000 orang anggota FSEDAR.

FSEDAR lebih banyak mengorganisir buruh manufaktur yang bekerja di pabrik. Buruh perempuan yang menjadi anggota FSEDAR berasal dari pabrik komponen mobil, makanan dan minuman.

Menurut dia, buruh bangunan pada umumnya tidak terorganisir di dalam satu perusahaan. Buruh bangunan lebih banyak sebagai pekerja lepas yang terpencar-pencar dan dianggap sebagai pekerja informal.

"Buruh (perempuan) sangat jarang berada di sektor infrastruktur karena pekerjaan konstruksi dianggap sebagai area pekerjaan laki-laki," kata Sarinah kepada satuharapan.com, Selasa, 7 Agustus 2018.

Di sektor konstruksi, kata dia, perempuan biasanya mengisi jabatan staf administrasi di perusahaan konstruksi. Untuk kerja di lapangan, perempuan biasanya jadi tukang masak untuk pekerja. Sarinah menilai, kebanyakan karena alasan fisik perempuan dianggap tidak cukup kuat secara fisik untuk bekerja di sektor konstruksi yang memerlukan banyak tenaga. Perempuan juga dianggap tidak ahli di bidang ini.

Menurutnya, gejala ini merupakan bentukan masyarakat yang tidak memperkenankan perempuan menjadi pekerja bangunan. Masyarakat mendidik perempuan untuk bekerja di sektor-sektor tertentu yang dianggap bidang perempuan, misalnya sekretaris, staf, administrasi dan garmen. Sektor konstruksi dianggap sebagai sektor yang maskulin di mana perempuan tidak diizinkan terlibat.

Para mandor juga biasanya mencari pekerja laki-laki dan bukan perempuan. Pada umumnya, kata dia, buruh bangunan tidak menerima hak normatif selain upah saja. Tunjangan kesehatan saja tidak ada. Buruh perempuan juga tidak akan mendapatkan cuti haid, hamil, libur dan lainnya. Sistem kerjanya adalah sistem kerja harian. “Kalau tidak masuk, ya, tidak dapat bayaran,” katanya.

Sarinah menyakini, banyak perempuan yang senang dengan sektor pekerjaan konstruksi. Dia mengenal beberapa perempuan yang kuliah arsitek, tapi adanya pandangan yang menganggap konstruksi sebagai bidang laki-laki jadi menyulitkan perempuan. Ia mengatakan, kalau masih di pintu gerbang saja, perempuan sudah tidak diizinkan berpartisipasi, kita tidak akan pernah tahu kapasitas dan kontribusinya untuk kemajuan dunia konstruksi. Contohnya, lowongan kerja buruh bangunan biasanya mencari laki-laki, tidak pernah perempuan.

Sarinah mengatakan, seharusnya perempuan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam bidang pekerjaan konstruksi. Pertama bisa dimulai dari pendidikan yang harus mengakomodir perempuan yang ingin bersekolah di jurusan yang terkait konstruksi. Apakah perempuan ingin menjadi arsitek, pekerja

konstruksi di lapangan, teknik sipil, dan lainnya, tidak menjadi masalah.

Kedua, dunia kerja konstruksi harus terbuka terhadap tenaga kerja perempuan. Karena orang tidak akan mau sekolah di suatu jurusan kalau lapangan pekerjaannya tidak dibukakan. Ketiga, teknologi bisa mempercepat kesetaraan gender karena kemajuan teknologi memungkinkan semua gender terlibat.

"Tinggal paradigma dalam pikiran saja yang diubah, jangan lagi ada dikotomi ini pekerjaan laki-laki, dan yang ini pekerjaan perempuan. Bagaimanapun juga suara perempuan itu dibutuhkan termasuk dalam membangun infrastruktur. Bangunan, rumah, gedung harus lebih mengakomodir kebutuhan perempuan," katanya.

Keempat, hak-hak normatif perempuan harus dipenuhi, misalnya cuti melahirkan, cuti haid, hak

menyusui, penghapusan pelecehan seksual dan perlindungan dari kekerasan seksual. Sarinah berharap, lebih banyak lagi perempuan yang berpartisipasi dalam dunia kerja sekalipun di sektor-sektor yang dianggap tabu bagi perempuan, misalnya konstruksi, alat berat, perbengkelan, dan lain sebagainya karena perempuan juga butuh menjadi pribadi-pribadi yang mandiri sehingga tidak bergantung pada laki-laki.

Ketergantungan perempuan kepada laki-laki memunculkan banyak implikasi seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, feminisasi kemiskinan sampai gangguan kesehatan mental.

KERJA RISIKO TINGGI

Mike Verawati Tangka (40), Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DKI Jakarta, mengatakan cara pandang masyarakat (pemilik perusahaan) yang masih dipengaruhi oleh konstruksi gender, bahwa perempuan ini adalah kelompok pekerja domestik, urusan infrastruktur atau konstruksi adalah dunianya laki-laki sehingga dengan sendirinya membuat perempuan tidak cukup percaya diri untuk masuk dalam sektor ini.

“Pekerjaan infrastruktur adalah pekerjaan yang risiko tinggi, sehingga perempuan masih dianggap kurang memiliki kapasitas dalam hal konstruksi dan sejenisnya,” kata Mike kepada satuharapan.com, Senin, 6 Agustus 2018.

Menurut Mike, kalaupun ada hanya sedikit sekali perempuan yang terlibat dalam sektor konstruksi infrastruktur. Biasanya perempuan ada dalam posisi-posisi administratif di perusahaan konstruksi.

Menurutnya, masih ada anggapan bahwa perempuan tidak cocok bekerja di sektor ini. Beberapa pengalaman perempuan bisa terlibat dalam kerja-kerja sektor konstruksi, misalnya pemecah batu, atau mengangkat batu-batu, dengan status kontrak harian, karena perempuan bukan target perekrutan pekerja sektor konstruksi.

Mike menilai, tidak banyaknya perempuan di sektor konstruksi infrastruktur bukan karena perempuan tidak tertarik, tetapi lebih pada peluangnya tidak cukup besar dan terbuka untuk perempuan bekerja di sektor infrastruktur. “Jadi kalau ada laki-laki, prioritas laki dulu,” ujarnya.

Sekali lagi karena cara pandang (mindset) konstruksi peran gender sudah membentuk cara pandang (bahkan cara pandang perempuan sendiri) bahwa yang namanya perempuan itu ranahnya domestik, kerja di rumah, urus anak dan keluarga. Kalaupun bekerja di sektor industri perempuan jadi buruh untuk kerja-kerja ketrampilan tangan seperti menjahit, bikin kancing, linting rokok, lipat kemasan, bikin kok bulu tangkis.

“Semua juga karena pelabelan perempuan cocoknya kerja yang njlimet gitu, karena alasannya perempuan lebih telaten dan rapi. Padahal sebenarnya laki-laki juga bisa bekerja seperti itu, hanya budaya pikir yang akhirnya membuat peremuan sendiri tidak memiliki kerja di sektor konstruksi atau infrastruktur,” katanya.

Mike mengatakan, kesetaraan gender di dunia kerja, khususnya di sektor infrastruktur masih jauh sekali, karena sebenarnya kesetaraan gender di dunia kerja juga masih berkutat pada hal kebijakan ketenagakerjaan juga. Secara umum perempuan dalam

dunia kerja masih diperhadapkan pada masalah diskriminasi karena wujud perempuan itu sendiri.

Misalnya, secara gaji dan tunjangan saja masih dibedakan, perempuan punya rate yang lebih rendah, dikarenakan posisi perempuan dalam keluarga sebagai penunjang ekonomi, bukan penunjang ekonomi utama, dimana selama ini kepala keluarga adalah laki-laki, walau aktualnya banyak juga perempuan yang menjadi penyokong ekonomi tunggal dalam keluarga,

SATU HARAPAN

Stigma Hambat Perempuan Berkiprah di Sektor Infrastruktur

dikarenakan menjadi single parent, janda dan lain-lainnya.

Perempuan rentan kekerasan, baik seksual, verbal, dan psikis di dunia kerja. Kemudian posisi kerja atau jabatan, memang sekarang perempuan juga ada di posisi-posisi leading, tapi tentunya tidak banyak, lagi-lagi prioritasnya adalah laki-laki, sebab laki-laki dinilai oleh publik lebih memiliki kapasitas memimpin ketimbang perempuan. "Walau tesis ini bisa runtuh karena banyak pemimpin perempuan yang bagus dan berprestasi," Katanya. ●

AHMAD MUSTAQIM - *Metrotvnews.com*
Lahir di Blora, pada 16 Februari 1991, dan saat ini ia menetap di Yogyakarta. Sejak tahun 2015, ia bekerja sebagai kontributor di Medcom.id/Metrotvnews.com, Yogyakarta.

TIMPANG UPAH BURUH BATIK DI YOGYAKARTA

Ahmad Mustaqim, Metrotvnews.com

Bahriyah selalu bangun ketika suara azan subuh dari sebuah masjid yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah, berkumandang. Usai salat subuh, ia memasak, mencuci perabotan rumah dan pakaian. Ia mandi jika semua hal telah dikerjakan. Demikian rutinitas pagi Bahriyah, perempuan berusia 60 tahun yang tinggal di Dusun Karang Kulon, Desa Giriloyo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pagi itu, 1 Agustus 2018, sekitar pukul delapan, Bahriyah yang mengenakan jilbab merah dan baju daster lengan panjang hijau motif bunga, memulai harinya. Dia mengayuh sepeda biru yang dilengkapi keranjang hitam, berangkat menuju rumah batik Sri Kuncoro, yang berjarak sekitar 150 meter dari rumahnya melalui jalanan yang menanjak dan menurun dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Di tempat itulah Bahriyah mencari nafkah sebagai buruh batik.

"Sebelum berangkat kerja, urus rumah dulu. Jika sudah selesai, berangkat kerja (membatik)," kata Bariyah dalam bahasa Jawa, saat ditemui di Batik Sri Kuncoro.

Tiba di rumah batik Sri Kuncoro, rekan pebatik lain yakni Sogiyah dan Wasingah telah tiba lebih dulu. Kata Bahriyah, ada 20 perempuan jadi buruh batik tulis. Tapi tak semua pembatik masuk kerja tiap hari, sebagian besar memilih membawa pulang

pekerjaan, lantaran mereka masih harus menyelesaikan pekerjaan lain di rumah.

Banyak perempuan Giriloyo dari kecil bisa membatik tulis. Keahlian yang dilakukan turun-temurun sejak abad 17 masehi. Bahriyah yang mulai bisa membatik sejak usia 10 tahun itu memperoleh kemampuan membatik dari orangtuanya. Pada umur 12 tahun, ia sudah mampu memproduksi batik tulis, yang dia jual sendiri.

Hasil batik yang dia buat masih berupa kain dengan goresan malam (elemen untuk membatik) yang belum diwarnai, atau masih kasar. “Mengko adole batik nang kutho (nanti menjual batiknya di Kota Yogyakarta),” kata Bahriyah.

Bahriyah sudah menjadi buruh batik di Sri Kuncoro selama enam tahun. Tiap hari ia bisa merampungkan satu hingga dua lembar kain batik ukuran 1 x 2 meter. Kain yang sudah dibatik Bahriyah masih harus dirapikan, dengan penebalan, serta pewarnaan. Dalam sebulan ia mendapat upah sekitar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu. Baginya, hasil itu tak sepenuhnya cukup untuk memenuhi segala kebutuhan di rumah. “Tidak cukup upahnya dengan kebutuhan bulanan,” kata Bahriyah.

Pada 2006, ketika Yogyakarta diguncang gempa, Bahriyah bercerita, kala itu hasil kerja membatik tak lagi laku, karena memang sepi pembeli. Lalu Bahriyah memutuskan tak lagi membatik. Ia membantu keluarganya membersihkan material bekas gempa dan menggarap lahan untuk bercocok tanam.

Dalam situasi pascabencana, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bahriyah dan keluarga mengandalkan bantuan yang berdatangan untuk bencana. Dua tahun pascagempa, pemerintah menjalankan program pembinaan kepada pembatik secara berkelompok. Mulai dari pelatihan dasar membatik, mengisi atau menggoreskan malam, hingga proses pewarnaan.

Pelatihan membatik itu setidaknya membantu para perempuan di Desa Giriloyo kembali menumbuhkan asa menjalankan industri kreatif itu. Di sisi lain, dengan membatik bisa mendapat penghasilan karena tak semua penduduk memiliki lahan garapan untuk bertani.

Waktu berjalan, manfaat pelatihan tak sebatas untuk para pembatik. Hasil pelatihan itu, untuk menopang perekonomian, perempuan pembatik di Desa Giriloyo dibagi beberapa kelompok untuk menjalankan usaha batik.

Rekan buruh batik Bahriyah di Sri Kuncoro bernama Sogiyah. Hari itu ia mengenakan kaos dan berjilbab merah. Di rumah, ia mengerjakan pekerjaan rumah tangga saban pagi. Ia mengayuh sepedanya ke batik Sri Kuncoro saat jarum jam menunjuk angka delapan. Sejak usia 10 tahun, ia sudah bisa membatik.

Usia Sogiyah 50 tahun. Kata dia, ada 13 kelompok usaha batik di desanya. Salah seorang diantaranya pemilik usaha produksi kain batik. Pembentukan kelompok sebagai jalan mempermudah pemerintah memberikan bantuan, seperti tempat duduk untuk membatik, gawangan, kompor kecil, serta peralatan lain membatik. "Katanya dikelompokkan biar maju," ucap Sogiyah.

Namun kemajuan itu tak sepenuhnya terjadi, kata Sogiyah. Menurutnya, secara manajemen bisnis, industri batik di Bantul merupakan kategori Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM), dan bisa berjalan baik. Namun, keuntungan sebenarnya lebih dirasakan juragan atau pemilik usaha batik. "Buruhnya tak mendapatkan banyak keuntungan," kata Sogiyah.

Tiap hari, Sogiyah, Bahriyah dan puluhan pebatik perempuan lain bekerja sejak sejak pukul 8 pagi hingga jam 4 sore. Baginya, membatik dengan konsetrasi dan ketelatenan tinggi. Mempertimbangkan ketebalan goresan dan sebaran malam pada kain. Sebagian waktunya di siang hari dihabiskan untuk membatik. "Istirahat hanya salat duhur, terus makan. Tidak sampai sejam, lalu membatik lagi. Jika ada acara kerja hanya setengah hari," ucap Sogiyah.

Menurut Sogiyah, kerumitan membatik tulis, membuat produktivitas mereka tak banyak. Per kain batik tulis paling cepat selesai dalam waktu sebulan. Itupun dikerjakan sejumlah orang. Ada pula produksi kain batik yang memakan waktu tiga hingga empat bulan.

Lamanya pengerjaan batik itu bergantung pada kerumitan

motifnya. Sejumlah motif batik yang cukup rumit di antaranya Sidomukti, Pringgodani, dan Parang.

Dari sisi penghasilan, pembatik perempuan hanya mendapatkan upah Rp500ribu hingga Rp600 ribu per bulan. Upah tersebut berasal dari penghitungan sekali penyelesaian kain batik tulis diupah sekitar Rp30 ribu hingga Rp60 ribu. Sogiyah mengaku pendapatan itu sangat kecil. Namun, mereka hanya pasrah. Tak ada penghasilan lain selain membatik untuk bantu pendapatan keluarga.

"Cukup ra (tidak) cukup, dicukup-cukupke. Rezeki datang dari manapun. Mboten kenyono-nyono (datang tidak terduga)," kata dia.

Ia menambahkan, tak ada kerja lembur bagi buruh batik. Tak ada pula tambahan penghasilan lain bagi para buruh. Mereka dapat tambahan Rp25 ribu hingga Rp30 ribu jika ada kegiatan workshop membatik dari wisatawan ataupun konsumen datang belanja. "Tambahan upah jika ada wisatawan belajar batik atau konsumen belanja," kata Sogiyah.

Kisah pembatik perempuan yang juga kurang mengenakkan dialami Hariyatun, 57 tahun, yang merupakan tetangga Sogiyah. Keduanya satu dusun, namun beda rukun tetangga. Hariyatun tak seperti Bahriyah yang bergabung di kelompok. Ia pembatik mandiri. Aktivitas membatik dan penjualan dilakukan sendiri.

●●●

Hari itu, Kamis, 2 Agustus 2018, pukul 15.15 WIB, Hariyatun mengenakan daster abu-abu motif bunga lengan pendek dan rambutnya terikat ikat rambut. Ia membatik di teras rumahnya beralas tanah dan berdinding kayu. Sebuah wajan kecil berisi malam ditaruh di atas bara kayu bakar, membujur sepanjang satu meter. Tanpa alas kaki, ia duduk di atas kayu bekas bangunan.

Kulitnya yang sawo matang mulai keriput. Ibu beranak tiga ini terlihat memiliki kemampuan membatik sangat baik.

Hariyatun yang mulai membatik sejak usia 10 tahun itu,

mengaku terjun di dunia batik karena melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Hariyatun hanya membatik jika punya modal. Produknya yang berupa kain bergores malam yang masih kasar akan diwarnai si pembeli sendiri. "Batiknya dijual sendiri, kalau tidak ada modal ya tidak membatik," katanya.

Menurut Hariyatun, produktivitasnya tidak menentu. Paling banyak seminggu dia menyelesaikan satu lembar kain ukuran 1 x 2 meter, yang dijual sendiri ke pengepul di Pasar Prawirotaman, Kota Yogyakarta, sekitar 14 kilometer dari kampungnya.

Di pengepul, ia menjual kain tersebut seharga Rp70 ribu per potong. Harga itu masih dipotong Rp20 ribu untuk modal. Alhasil ia hanya mendapat keuntungan bersih Rp50 ribu. "Berangkat sendiri kalau mau menjual. Terkadang sesama pembatik mandiri saling menitipkan barang yang akan mereka jual. "Ngirit bensin (hemat ongkos)," ujarnya.

Keluarga Hariyatun terdiri dari empat orang, seorang suami dan dua anak. Seorang anaknya pergi merantau ke Jakarta. Ia bercerita, keuntungan dari membatik jelas sangat tak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suaminya, Sabari berusia 61 tahun, bekerja buruh bangunan lepas.

Pendapatan dari membatik katanya, hanya sebatas membantu meringankan beban suami. "Kalau yang satu tidak bisa kerja, yang satu bisa ada penghasilan buat nyambung umur," kata Hariyatun.

Upah rendah Sogiyah dan Hariyatun tak dirasakan laki-laki pembatik tulis. Salah satunya Kristina Datu Kusuma. Pada Selasa, 28 Agustus 2018, Datu sapaan akrabnya, membatik di ruang berukuran 3 meter x 4 meter, di RT 38 RW 9 Tamansari, Kota Yogyakarta. Hari itu, Datu mengenakan kaos batik didominasi warna hitam dan biru.

Kemampuan Datu yang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) membatik, meneruskan pekerjaan ayah dan pamannya. Ia belajar membatik otodidak sejak 2001. Cara Datu membatik tulis, mengombinasikannya dengan seni lukis. Dari tangannya, ia membatik kaos, selendang, dan jarik. "Membatik

jika ada pesanan," ujarnya.

Harga kaos batik Datu, dijual sekitar Rp150 ribu hingga Rp300 ribu. Selendang dan jarik batik, dijual sekitar Rp500 ribu-Rp800 ribu. Menurut Datu, harga dipatok berdasarkan tingkat kerumitan pengerjaan motif batik. "Saya mengerjakan (batik) dan menjual sendiri. Kalau ramai, seminggu bisa menjual 20 batik. Kalau sepi, sebulan pernah tidak sama sekali," katanya.

Jika dihitung perbandingannya, pendapatan Datu dikala ramai, bisa mencapai sepuluh kali lebih besar dibanding pendapatan Hariyatun, yang juga pebatik tulis mandiri. Datu beralasan, upah rendah menjadi buruh batik, membuatnya memilih jadi pebatik mandiri berbekal kemampuan otodidaknya.

●●●

Liburan akhir pekan atau libur sekolah, sepanjang Jalan Malioboro selalu padat kendaraan. Kawasan parkir wisata Abu Bakar Ali dan Bank Indonesia, penuh bis-bis pariwisata, yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Belanja produk-produk batik merupakan kegiatan yang selalu dilakukan para turis ini.

Selain toko-toko batik, wisatawan biasanya belanja di pedagang batik kaki lima di sisi barat Jalan Malioboro. Dinas Pariwisata DIY menyebutkan ada sebanyak 4,7 juta wisatawan datang ke Yogyakarta sepanjang 2017. Angka ini meningkat dari kunjungan wisatawan di tahun sebelumnya yakni sekitar 3,5 juta.

Salah satu wisatawan dari Lampung bernama Waluyo. Ia baru saja menghabiskan 1 juta lebih untuk membeli dua kemeja batik tulis lengan panjang di toko Hamjah Batik, jalan Malioboro. Menurut Wayulo, membeli batik tulis, karena motif bagus dan bahannya halus. "Walau harga mahal tapi kualitasnya seimbanglah," kata Waluyo.

Yogyakarta, satu diantara kota batik di Indonesia, meski Pekalongan, Jawa Tengah lebih termasyur.

Namun, nasib buruh batik tak sebaik pelayan di toko batik di Jalan Malioboro dan di Pasar Beringharjo. Menurut data Dinas

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY pada 2015, ada sebanyak 71 industri batik, termasuk UMKM, dengan total jumlah pekerja sebanyak 743. Jika dirinci, di Kota Yogyakarta ada sebanyak 17 pengusaha baik dengan jumlah pekerja 208; Kulon Progo ada 31 dengan jumlah pekerja 116; Bantul ada 21 dengan jumlah pekerja 401; Gunungkidul ada 2 dengan jumlah pekerja 18. Industri batik di Yogyakarta didominasi batik tulis, sebagian kecil batik cap atau printing.

Di Bantul, Imaroh, pemilik rumah batik Sri Kuncoro bercerita tentang buruh batik di tempatnya. Menurutnya, para pembatik tersebut diupah berdasarkan kualitas kerja. Semakin rumit motif dan kualitas goresannya, mereka dibayar semakin mahal. Motif paling rumit biasa dikerjakan empat bulan oleh tiga hingga empat pembatik. Dalam dua minggu pembatik bisa menyelesaikan 20 lembar kain batik.

Ia mengatakan tak tahu detail soal ketenagakerjaan. Ia mengaku memberikan pekerjaan membatik para perempuan agar mereka berpenghasilan. “Ketimbang nganggur di rumah, mereka kan jadi ada penghasilan. Tak ada perjanjian kerja,” tuturnya.

Imaroh mengatakan, harga kain batik Sri Kuncoro dibandrol berkisar Rp1 juta hingga Rp3 juta. Harga dibedakan berdasarkan kualitas goresan. “Beda tangan, beda kualitasnya, beda harga. Mereka sudah tahu, saya kualitasnya ini, dikasih upah segini. Di sini sistemnya borongan,” kata Imaroh.

Di balik timpangnya upah buruh batik tulis di Yogyakarta, kerajinan batik menjadi satu sub-sektor fesyen pada program ekonomi kreatif pemerintah sejak 2009. Dalam makalah berjudul ‘Buruh Batik: Ironi Perempuan sebagai Pekerja dan Pejuang Kebudayaan’ karya Karina Rima Melati, dosen Akademi Komunikasi Indonesia (Akindo) Yogyakarta, dijelaskan, Kementerian Perindustrian mencatat, pada 2011-2015, terdapat pertumbuhan unit usaha dari 41,623 unit menjadi 47,755 unit, dengan tenaga kerja dari 173,829 orang menjadi 199,444 orang.

Batik menjadi salah satu sub-sektor industri kreatif yang dicanangkan pemerintah pada 2009. “Total, nilai produksi batik

sebesar USD 39,4 juta dan total nilai ekspor sebesar USD 4,1 juta," kata Karina.

Menurut paparan Karina, meskipun omzet perdagangan batik terhitung tinggi, masyarakat yang terlibat di dalam proses industri seni ini belum mendapat kesejahteraan merata. Ada ketimpangan penghasilan antara pembatik tulis yang dijalani mayoritas perempuan, dibanding pembatik cap atau printing yang dikerjakan laki-laki.

Para buruh batik tulis di Kota Yogyakarta hanya dibayar sekitar Rp 35 ribu– Rp40 ribu tiap harinya. Jika dihitung per lembar kain yang telah dibatik selama tiga hingga empat hari kerja hanya diupah Rp90 ribu. Sementara, standar upah buruh di Yogyakarta pada kisaran Rp1,5 juta sampai Rp1,7 juta per bulan.

"Ini mengkhawatirkan karena di Yogyakarta saja yang telah mendapat julukan sebagai Kota Batik Internasional buruh batiknya masih diupah di bawah standar hidup," kata Karina.

Contohnya yang terjadi pada Catur Ari Wibowo, pemilik Aliyya Batik di Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Menurut Catur. Ia punya lima pekerja batik, empat perempuan, dan satu laki-laki. Pekerja perempuan khusus mengerjakan batik tulis. Mereka berkerja seperti buruh perempuan di batik Sri Kuncoro. Sedangkan pekerja laki-laki, mengerjakan batik cap, yang lebih mudah ketimbang batik tulis. Sekali cap, kain bisa dilanjutkan dengan proses pewarnaan. Dalam sehari, produktivitas kain batik cap bisa mencapai 25 potong dengan panjang masing-masing dua meter.

"Pekerja batik cap ini digaji Rp5 ribu per dua meter. Kalau lilin dari pekerja bayarnya Rp20 ribu per potong," katanya. Menurut Catur, apabila dihitung bekerja sebulan 26 hari dan per potong Rp5 ribu, dalam sebulan bisa mendapat upah Rp3.250.000. Jika batik cap dikerjakan dengan lilin milik pekerja, upahnya lebih besar dalam sebulan. "Omzet (Aliyya Batik) dalam sebulan kira-kira Rp25 juta-Rp30 juta per bulan," ucapnya.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja (HIPTK) Dinas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi DIY, Ariyanto Wibowo, industri harus mengikuti ketentuan ketenagakerjaan dalam pengupahan pekerjanya. Ia mengaku sulit mendeteksi ada pekerja tanpa perjanjian dengan pemberi kerja. Instansinya belum pernah secara spesifik membahas masalah rendahnya upah perempuan pekerja batik tulis itu. "Di perusahaan formal ataupun informal pemberian upah harus sesuai upah minimum. Perlu dicek di lapangan dulu sejauh mana hubungan kerjanya," ucapnya.

Masih menurut Ariyanto, instansinya bekerja bergantung program kegiatan yang sudah dianggarkan selama setahun. Sebulan sudah 60 kali sosialisasi ke pemilik usaha agar memenuhi norma ketenagakerjaan, termasuk upah layak. Ia mendorong para pengusaha batik bisa memenuhi aturan kerja, termasuk jaminan ketenagakerjaan. Selain itu, Ariyanto mengimbau pekerja juga menanyakan lebih dulu detil perjanjian sebelum bekerja.

"Biar diawal enak dulu, dalam artian sama-sama memahami dan menyepakati. Saya paham banyak tenaga kerja melakukan pekerjaan, belum mengetahui aturannya. Begitu dirasakan, entukke mung kesel (dapatnya hanya lelah), ora cucuk (tidak mencukupi)," katanya.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tri Saktyana, mengklaim telah berupaya melakukan perbaikan upah perempuan buruh batik. Salah satu langkahnya memberikan pelatihan berwirausaha. Menurut dia, ada pembatik yang hanya bisa mengerjakan batik tanpa disertai berbisnis. "Tapi ada juga pelaku kerajinan (baik) yang memiliki jiwa entrepreneur. Ini kita seleksi, didorong agar bisa tumbuh menjadi pengusaha batik," ucapnya.

BATIK RAMAH ALAM, BATIK UPAH TIMPANG

Upah buruh batik di rumah Sri Kuncoro di Bantul dan Aliyya Batik di Gunung Kidul, dengan pendapatan pemiliknya, tak ditunjukkan oleh Tatang Elmy Wibowo, pemilik Galeri Batik Leksa Ganesha, di Dusun Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Hari itu, Fuadni Rohmah sibuk merapikan batik tulis pewarna alam. Ia bekerja sudah tiga tahun, jadi pembatik tulis. Perempuan berusia 28 tahun itu betah jadi pekerja batik tulis. Ia bekerja fleksible. Jika buruh lain berangkat pukul 8 pagi, ia terkadang tiba pukul 9 pagi dari rumahnya di Kecamatan Jetis, Bantul. Berjerak sekitar 5 kilometer. Meski berangkat lebih lambat, ia tetap pulang bersamaan perempuan pembatik di batik Leksa Ganesha. "Kalau membatik di sini biasanya pulangnya jam tiga sore atau setengah empat," ujarnya.

Kata Fuadni, pembuatan batik di Laksa Ganesha berdasarkan motif lukisan pada kain. Bisa berupa kain selendang atau kain panjang. Lama pengerjaannya juga bervariasi. Per lembar, mulai dari dua minggu hingga dua bulan. Ada sebanyak 10 perempuan pembatik di batik Leksa Ganesha. Mereka digaji sesuai UMR Bantul, yakni Rp1.527.150. "Tergantung kesulitannya juga," ujarnya.

Selain membatik di lokasi, Fuadni juga membatik di rumah. Batik yang ia selesaikan bisa dititipkan di galeri batik Leksa Ganesha. Jika laku, keuntungan bisa dia kantongi.

Sementara itu, rekan Fuadni, Rahayu, mengatakan sudah membatik sekitar dua-tiga tahun di lokasi tersebut. Ia berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor dari rumahnya di Kecamatan Pandak, Bantul, dengan jarak 13 kilometer. Rahayu merasa diperlakukan sangat baik.

Sebelum membatik pagi hari, sudah mendapatkan makanan ringan. Pada siang harinya juga mendapat makan. "Kalau ada lembur, biasanya ada tambahan gaji. Lembur paling selesai jam setengah empatan sore," kata dia.

Pemilik batik Leksa Ganesha, Tatang Elmy Wibowo, mengatakan, dirinya berupaya memberikan upah pantas bagi pekerjanya. Omzet usahanya tersebut bisa mencapai Rp70 juta per bulan saat musim liburan. Bahkan saat lebaran ia juga memberikan tunjangan hari raya (THR) sebesar satu kali gaji. Selain itu, pekerja juga diberikan biaya jaminan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Meskipun, biaya itu hanya untuk

perempuan pekerjanya, bukan sekaligus keluarganya. “Jadi biaya BPJS hanya untuk yang bekerja saja,” ucapnya.

Ia menambahkan, batik yang ia produksi sejak 2008 itu memakai dengan pewarna alami yang ramah lingkungan. Sebab, pewarna kain ini dibuat sendiri dari bahan seperti, kayu nangka untuk warna kuning, kulit kayu mahoni (warna kecoklatan); kulit buat jelawe (kuning tua, dan hitam). Terkadang juga memakai bahan dasar kayu mangrove.

Penggunaan pewarna alami ini memakan waktu cukup lama. Kata Tatang, pewarnaan dengan pewarna alami harus dilakukan minimal sebanyak lima kali. Sekali mencelupkan ke air pewarna harus dikeringkan dulu sebelum dicelupkan kembali. “Tapi kalau ada yang minta dengan pewarna sintetis kami tetap melayani,” kata dia.

●●●

Hariyatun hanya sesekali datang ke pusat perbelanjaan batik di Kota Yogyakarta. Sehari-hari waktunya dihabiskan membatik di pelataran rumah, untuk terus dapat rupiah, demi mencukupi kebutuhan harian. Ia tak pernah berfikir atau berkeinginan membeli kain atau baju batik tulis yang terpajang dipertokoan. Ia tahu harga batik tulis itu mahal.

Dibenaknya jika melihat batik tulis di pusat perbelanjaan, mungkin ada salah satu dari buah tangannya. Ia sadar, gaji sebulannya saja tak cukup membeli sepasang batik tulis untuknya dan suami. Seperti Waluyo, yang menghabiskan dua kali lipat penghasilan Hariyatun, dalam sehari. “Gaji sebulan habis untuk beli sepotong kemeja batik tulis. Mending untuk makan,” kata Hariyatun. ●
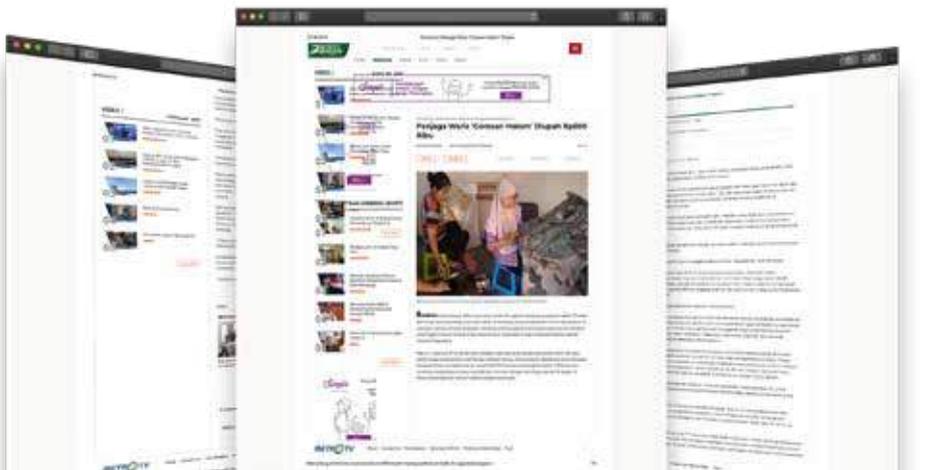
NURIKA NAULIE FAUZIAH MANAN - *KBR.id*

Lebih dikenal dengan panggilan Ika Manan. Ika lahir di Bojonegoro, 4 April 1988. Ika lulus dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, tahun 2011. Meski pernah menjalani pekerjaan sesuai bidang saat kuliah, tapi sejak 2012, Ika mantap berkarier sebagai jurnalis. Hingga saat ini, ia sudah enam tahun menjadi jurnalis radio di KBR.

CERITA BURUH HAMIL DI INDUSTRI GARMEN

Nurika Manan, KBR.id

"Istirahat, habis makan, ngepot, kerja lagi, mengejar target."

Royani, buruh perempuan di salah satu perusahaan garmen di Kawasan Berikat Nasional (Cakung) berangkat kerja dengan perasaan tak keruan. Perkaranya, setiap dua hari sekali ia mesti menghadap bagian personalia PT Amos Indah Indonesia. Bukan karena rutinitas menjahit atau hasil kerja yang buruk, melainkan karena kehamilannya.

Kala itu usia kandungannya delapan bulan. Ia mondar-mandir ke ruang personalia untuk bicara masalah cuti. Manajemen tak mengizinkan Royani ambil cuti melahirkan tiga bulan. Kalau mau dapat rehat lahiran, ia harus bersedia mengundurkan diri. "Dia bilang, ini peraturan di sini. tapi saya tidak mau," cerita Royani kepada KBR.

Saban hari, perempuan usia kepala tiga itu mesti merampungkan 60 buah jahitan per 30 menit. Mudahnya begini, satu jahitan harus selesai dalam dua menit. Itu artinya, dalam sehari atau delapan jam kerja ia harus setor 960 buah jahitan. Yang bila tak kelar, maka lembur tanpa bayaran demi mengejar target pun mau tak mau harus dilakoni. Hal semacam itu mereka sebut "skorsing."

"Istirahat, habis makan, "ngepot", kerja lagi, mengejar target. Mau pulang pun, jam pulang tidak boleh pulang, disuruh

"ngepot" lagi. Jam empat sampai jam lima tidak dibayar, katanya untuk bayar utang. Istirahat satu jam. (Istirahat bisa efektif?) Boro-boro, makan saja keselek-keselek mikirin target."

Celakanya, saat hamil pun, berlaku demikian. Alhasil, target harian itu disiasatinya dengan memangkas waktu istirahat. Jadi, satu jam rehat yang didapat Royani itu nyaris tak selo. Separuh dari waktu digunakan makan siang, sebelum akhirnya kembali menghadap meja jahit untuk mengejar target.

Dalam sebuah ruang produksi seluas hampir 50 meter persegi, ada ratusan meja-kursi sepaket dengan mesin jahit. Letaknya berjajar, disusun berderet ke belakang juga ke samping. Satu baris bisa sampai 50 buruh. Dan ada belasan bahkan puluhan baris. Seribuan buruh perempuan bekerja dengan alat masing-masing. Royani duduk di salah satu kursi di bagian menjahit.

Perkara target yang mendera buruh garmen, bukan cuma soal banyaknya jahitan yang dihasilkan. Proses yang bersinggungan dengan tajamnya jarum dan deru mesin ini menuntut ketelitian lantaran rumitnya pekerjaan.

Setidak-tidaknya, satu kemeja flanel yang biasa kita pakai itu melibatkan 48 orang dalam pengerjaannya. Royani menjelaskan, reniknya setiap bagian. Ada beberapa bagian kemeja yang harus ia jahit dengan jarum dua atau double needle. Belum lagi jahitan pada kerah, saku dan lengan.

Temuan lain di perusahaan yang sama, seorang buruh perempuan membebat perut yang tengah hamil lima bulan, agar tak kentara. Ia takut kehamilan itu berbuah pemutusan kontrak kerja. Meski, Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah mengatur mulai dari hak cuti melahirkan, jaminan untuk tetap bekerja selama hamil hingga perlindungan keselamatan.

Tapi, kondisi semacam itu lekas disangkal Kepala personalia PT Amos Indah Indonesia, Engkus Suhendar. Ia mengklaim, manajemen perusahaan sudah berupaya menjalankan perintah undang-undang. Termasuk soal cuti melahirkan.

"Di Amos, cuti hamil sudah berjalan. Jadi bulan ke-7,5 kita mengajukan hak cuti mereka. Jadi isu-isu itu tidak benar. (Soal

desakan mereka mengundurkan diri?) Enggak ada. Kalau keluar pun harus sesuai dengan perjanjian kerja. Tidak ada kalau masih ada kontrak kemudian diputus, tidak ada."

Kajian yang dirilis Juni 2018 oleh Komite Nasional Perempuan Mahardhika—organisasi advokasi hak-hak perempuan—menemukan, modus pemutusan kerja saat hamil lazim terjadi lantaran perusahaan tak mau memberi fasilitas lahiran. Soal lain, cuti tiga bulan buruh yang melahirkan dianggap menghambat target produksi. Karena sebagian besar buruh garmen berstatus kontrak, maka enteng saja bagi perusahaan melakukan pemecatan.

IKHTIAR MENGGENAPI HAK BURUH PEREMPUAN

Diburu target harian, sudah jadi makanan rutin para buruh garmen. Di kawasan berikat Tangerang, saya menjumpai ritme serupa. "Maaf, buru-buru, ini istirahat cuma setengah jam. Saya masih lembur, enggak dulu ya," jawab seorang perempuan, ketika saya hendak minta waktu wawancara.

Di jalanan Siliwangi, Jatiuwung, Tangerang sore jelang mahrib, orang berseragam lalu lalang bergegas, berhamburan keluar pabrik. Menghampiri gerobak makanan para penjaja. Beberapa tampak sesegera mungkin menandaskan bakso di mangkoknya.

Yang berbeda, kecemasan yang melilit Royani tak terjadi pada buruh perempuan di sana. Misalnya pada Eliyanti. Ia mendaku tak pernah takut hamil. Sejak 18 tahun silam memutuskan nyemplung jadi buruh garmen.

Saya temui di tengah jam istirahatnya, dengan sedikit terburu, ia menjawab lugas saat ditanya perkara kehamilannya. Urusan kerja dan melahirkan, baginya yang ada lancar belaka. "Lah, saya sudah tiga kali hamil, bekerja sejak tahun 2000. Kalau sakit ya izin, lalu lahiran juga ditanggung perusahaan. Dan dapat cuti tiga bulan," aku Eliyanti di tengah rehatnya menjahit.

Eliyanti bekerja sebagai operator jahit (sewing) di PT Pan Brothers--salah satu pemain garmen terbesar di Indonesia. Produknya juga memasok merk-merk kesohor dunia. Sebut saja Uniqlo, The North Face, Lacoste atau juga Ralph Lauren.

Buruh lain, Risma mengungkapkan, ibu hamil di perusahaan ini beroleh fasilitas cek kesehatan sebulan sekali. Selain itu, pengawas juga melarang buruh hamil bekerja lembur. Keistimewaan lain, beban kerja dikurangi.

"Lalu jam kerja itu dia enggak lembur, cuma delapan jam kerja. Dan itupun dikasih kerjaan yang gampang-gampang, yang paling gampang. Supervisor juga nggak mau ambil risiko juga kan, kalau terjadi apa-apa sama kehamilannya. Kalau di-sewing itu kan paling nandain (menandai pola) doang," tutur Risma yang delapan tahun bekerja di bagian jahit.

Nasib mujur itu terjadi lantaran perusahaan menyadari buruh perempuan menjadi penggerak utama industri ini. Sehingga pelbagai cara dilakukan untuk mempertahankan para pekerja. Salah satunya, menurut Deputy General Manager HRD, Denny Henry Samboh, dengan mematuhi pemenuhan hak-hak pekerja perempuan yang dimuat Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Memang orang berpikir, buat apa susah-susah sampai ada pengadaan pembalut. Kalau dikali 4.000 (karyawan) saja sudah berapa dananya? Buat kami, setelah sudah biasa melakukan itu, artinya kan ada alokasi bajet yang diset-up untuk itu," jelas Denny.

Pan Brothers bukan saja memberikan cuti melahirkan tiga bulan, melainkan juga termasuk cuti haid, bantuan melahirkan, ruang laktasi dan perlakukan khusus bagi buruh hamil—seperti kursi rehat bagi ibu hamil.

Bahkan sejak 2017 lalu, perusahaan ini jadi satu-satunya perusahaan garmen yang mulai mengikuti sertifikasi EDGE. Kalau sudah melewati ini, maka sebuah perusahaan memenuhi syarat penilaian standar sertifikasi bisnis untuk kesetaraan gender.

"Berangkat dari ini industri padat karya, sumber daya manusia yang banyak, kebanyakan perempuan, manajemen menyikapi ini supaya bagaimana mereka bisa stay. Karena mencari pekerja nggak gampang. Karena kalau gaji, boleh dicek, perusahaan di kawasan ini juga banyak manufaktur. Kalau hanya gaji tidak cukup untuk buat mereka stay, loyal, buat mereka semangat kerja. Apa lagi? Ya sudah daripada investasi susah-susah, kami

ikuti saja regulasi, undang-undang," jelas Denny kepada KBR.

Timnya, jauh-jauh hari menyiapkan tenaga pengganti bagi buruh yang ambil cuti melahirkan. Bahkan bila perlu, ada penggantian pekerjaan, juga rotasi pekerja. Agar kebijakan ini bisa berjalan lancar, menurutnya setiap buruh di pabriknya harus mampu dan wajib menguasai seluruh bagian kerja di industri garmen. Sehingga saat ada buruh hamil ambil cuti, itu bukan jadi perkara besar sebab siapa saja bisa menggantikan tugas.

"Mereka yang hamil itu kan di-switch, ke pekerjaan yang lebih mudah. Karena di sini mereka sudah dibekali untuk bisa semua. Jadi bisa saling cover, nggak masalah ketika di-switch pun," sambung Denny.

Sialnya, tak semua perusahaan punya kesadaran menggenapi hak-hak buruh perempuan. Rilis pemerintah pada 2018 menyebutkan, dari total 3.000an perusahaan, baru 150an di antaranya yang patuh. Data itu dikumpulkan dari rekap 2017.

Catatan pemerintah itu sejalan dengan temuan Perempuan Mahardhika. Dalam kajian tentang pengabaian hak maternitas buruh garmen di KBN Cakung, organisasi tersebut menemukan separuh dari buruh perempuan di area industri kelas kakap ini, takut hamil.

Tim kajian mewawancarai lebih dari 100 buruh perempuan dari 45 perusahaan. Dari situ, terungkap tiga sebab mereka takut hamil. Antara lain khawatir keguguran, cemas kehilangan pekerjaan, dan takut penghasilannya berkurang.

Kerja ribuan buruh perempuan menggerakkan industri garmen nyatanya tak sepadan dengan risiko dan kesulitan di tengahnya. Ironi, sebab industri ini jadi penyumbang tenaga kerja terbesar setelah industri makanan. Jumlahnya, tahun lalu saja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai lebih dari 1,5 juta pekerja. Meliputi skala kecil dan mikro, sedang hingga besar.

Bila disebutkan bahwa 83 persen buruh garmen itu perempuan, maka kita bisa bayangkan berapa banyak yang kemungkinan dapat perlakuan seperti Royani. Padahal, persentase jumlah yang jauh lebih tinggi itu menggambarkan buruh perempuan lah yang jadi penggerak utama industri garmen.

Deputy General Manager HRD PT Pan Brothers, Henry Samboh mengaku selain aturan dan pengawasan pemerintah, peran pemilik label pakaian sebagai buyer berpengaruh besar mendorong keberpihakan perusahaan terhadap buruh perempuan.

Hal tersebut pula yang mendorong Sekretaris Komite Nasional Perempuan Mahardhika Mutiara Ika Pratiwi berencana menyerahkan hasil temuan lembaganya ke para pemilik label. Dengan begitu, ia berharap, pemilik label yang membeli produk di KBN Cakung mampu mengintervensi pabrik-pabrik garmen untuk memenuhi hak maternitas buruh hamil.

“Dalam setiap brand atau buyer, itu pasti mereka punya kode etik. Tetapi saya yakin, data-data sedetail ini, mereka belum tahu, sehingga ada kepentingan bagi kami, Perempuan Mahardika, bisa mendialog-sosialkan data-data ini, bahkan sampai di tingkatan buyer di internasional,” pungkas Ika. ●

RACHMAWATI - *Kompas.com*
Akrab dipanggil Ira. Lahir di Denpasar 8 April 1983. Lulusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Jember kini bekerja sebagai kontributor untuk Kompas.com di Banyuwangi. Pengalaman kerjanya sebelum di media online adalah jurnalis radio. Ira pernah bekerja di Radio Akbar FM Jember, Radio Sritanjung Banyuwangi, Radio Serumpun FM Batam, dan Radio Blambangan Banyuwangi. Selain bekerja, Ira juga tak meninggalkan rasa cintanya pada dunia aktivis. Ia tercatat sebagai relawan Rumah Literasi Banyuwangi, Pustakawan Indonesia, relawan Sahabat Anak, dan relawan Marine Education Bangsring Underwater.

BERKAT MIE KERING RUMPUT LAUT, IBU-IBU DI SARAWONDORI PAPUA MAMPU KULIAHKAN ANAK

Rachmawati, Kompas.com

Rosmina Karobaba (41) terlihat memasukkan mie kering dalam kemasan plastik sedangkan Novalina Wahana (39) bertugas menata kemasan yang telah berisi mie kering hasil buatan kelompok mereka ke dalam sebuah keranjang. Aktivitas tersebut dilakukan kedua perempuan asli Kepulauan Yapen, Papua, di salah satu rumah kayu di tepi teluk Sarawondori di Distrik Kosiwara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Minggu, 19 September 2018.

Sembari melakukan pengepakan mie, kedua perempuan tersebut juga mengawasi anak-anaknya bermain di sekitar pelantaran tempat mereka bekerja. Pengepakan mie kering rumput laut tersebut dilakukan setiap pagi hari setelah mereka selesai menyelesaikan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga di rumahnya masing-masing.

Mereka harus segera menyiapkan mie kering rumput laut tersebut karena tiga toko di Kota Serui kehabisan stok mie kering rumput laut yang diproduksi oleh kelompok Rawing Mairori sejak empat tahun terakhir. Mie kering rumput laut tersebut sudah dibuat beberapa hari sebelumnya. Mereka sengaja produksi

mie kering dalam jumlah banyak karena cuaca sedang panas dan sangat baik untuk mengeringkan mie buatan mereka. Rosmina Karobaba, ketua kelompok Rawing Mairori bercerita, ada 10 perempuan Sarawondori yang semuanya adalah ibu rumah tangga ikut memproduksi rumput laut menjadi makanan olahan.

"Ada mie kering rumput laut, stik rumput laut, cendol dan juga puding. Kadang kami juga buat bakso rumput laut jika ada pesanan. Puji Tuhan dalam waktu sebulan kita bisa dapatkan uang sekitar Rp 2 juta," cerita Rosmina kepada Kompas.com, Minggu, 19 September 2018. Perempuan yang akrab dipanggil Ros tersebut bercerita jika Teluk Sarawondori banyak menghasilkan rumput laut adalah jenis Ketomo.

Bahkan pada tahun 2007, panen raya rumput laut di Kampung Sarawondori sempat dihadiri oleh salah satu menteri. Saat itu, menurut Ros rumput laut melimpah ruah tapi para nelayan tidak tahu harus dijual ke mana sehingga mereka hanya menjemur rumput laut yang mereka panen hingga kering lalu menumpuknya di gudang menunggu penjual datang. "Tidak ada kepastian akan dijual kemana rumput laut kering tersebut. Hanya panen, jemur lalu ditumpuk saja. Stoknya sangat banyak sekali. Jadi walaupun banyak tetap saja tidak menghasilkan uang. Akhirnya bapak-bapak sudah jarang menanam rumput laut. Mereka kembali melaut mencari ikan," kata Ros.

Hal senada juga diceritakan oleh Isak Karobaba (42). Lelaki yang berbadan gempal tersebut awalnya tinggal di Nabire, namun saat mendengar bisnis rumput laut, Isak mengajak keluarganya kembali ke Sarawondori untuk bisnis rumput laut sekitar 10 tahun yang lalu. Awalnya, sekali panen Isak bisa mendapatkan 20 ton rumput laut berukuran besar. Namun semakin lama produksi rumput laut mereka menurun karena Isak dan para petani rumput laut kesulitan untuk menjual rumput laut. "Kalaupun ada yang beli kesini, waktu kedatangannya tidak jelas. Akhirnya rumput laut kami keringkan lalu ditumpuk di gudang. Saya juga mencari ikan dan teripang," ujar Isak berkisah.

Menurutnya, satu kilo rumput laut basah jika dikeringkan

bobotnya menjadi 6-7 ons. Sementara satu tali rumput laut bisa menghasilkan hingga 10 kilogram rumput laut basah. "Tapi sampai saat ini saya masih punya beberapa tali rumput laut. Ukurannya bisa capai 3 atau 5 meter. Perairan ini sangat cocok untuk rumput laut," katanya. Pada tahun 2007, Ros dan beberapa ibu rumah tangga di sekitar Sarawondori mendapat pelatihan pembuatan pengolahan makanan dengan bahan utama rumput laut dan mendapatkan uang bantuan sebesar Rp750.000. Ros lalu membuat kelompok, namun tidak berjalan maksimal. Akhirnya, Ros memutuskan untuk membuat cendol dan puding dengan memanfaatkan rumput laut kering yang jumlahnya berlimpah di kampungnya seorang diri.

Salah satu nelayan yang menyiapkan stok rumput laut untuk Ros adalah Isak Karobaba. Ros sempat berencana membuat permen, namun bahan-bahan yang digunakan tidak bisa didapatkan di Kota Serui. "Karena kelompok, saya sempat minta anggota kelompok iuran Rp25.000 untuk beli blender. Tapi tidak ada yang mau. Akhirnya saya gunakan uang sendiri untuk beli blender dan pinjam genset karena disini saat itu tidak ada listrik," cerita Ros.

"Saya kerjakan sendiri semua. Waktu itu hanya buat puding dan cendol. Satu cetakan ada 15 potong, dan per potong saya jual Rp1.000. Per hari saya bisa bawa puding tiga cetakan. Sementara ongkos naik kendaraan umum PP habis Rp10.000. Masih ada untung walaupun sedikit," katanya.

Saat itu, puding dan cendol buatan Ros sangat terkenal di Kota Serui hingga akhirnya pada tahun 2010, dia kembali diajak untuk mengikuti pengolahan rumput laut menjadi mie basah dan bakso. Ros memilih berjualan karena pasca-bercerai dengan suaminya, Ros secara otomatis harus menjadi kepala rumah tangga untuk menghidupi anak semata wayangnya. Selain itu dia juga mengajak ibu rumah tangga disekitarnya agar mereka mendapatkan uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. "Jika anggota kelompok, kebanyakan uangnya digunakan untuk sekolah anaknya, sedangkan kebutuhan sehari-

hari bisa dari penghasilan para suami. Beda dengan saya yang harus mandiri seorang diri," ujarnya menambahkan.

Setelah kelompok pertama bentukannya gagal, Ros kemudian kembali membuat kelompok yang terdiri dari 10 ibu rumah tangga di Sarawondori setelah mendapatkan pelatihan baru pengolahan rumput laut. Lalu, dari hasil pelatihan tersebut, setiap hari Minggu, para ibu rumahtangga anggota kelompok menjual mie basah dan bakso rumput laut di tempat wisata Teluk Sarawondori. Namun mereka terkendala dengan cuaca. Nona, salah satu anggota kelompok pernah bercerita jika suatu hari Minggu hujan turun deras selama seharian, sehingga mie dan bakso mereka tidak laku sama sekali, padahal mereka sudah membuat makanan sebanyak 50 porsi. Akhirnya Nona dan beberapa anggota kelompoknya menjajajakan mie dan bakso rumput laut mereka menggunakan perahu ke rumah-rumah untuk menutupi modal yang telah mereka keluarkan.

"Per porsi kami jual Rp10.000. Hujan-hujan kami tawarkan ke rumah-rumah dengan menggunakan perahu. Ada yang langsung bayar ada juga yang hutang. Perjuangan sekali," kata Nona ambil menghela nafas berat. Setelah peristiwa tersebut, Ros memutar otak agar mereka tetap bisa berjualan mie rumput laut hingga akhirnya Ros memutuskan untuk membuat mie kering agar lebih awet. Berminggu-minggu dia mencoba untuk membuat mie kering bersama anggota kelompoknya hingga akhirnya mereka berhasil menemukan komposisi yang pas untuk mie kering andalan mereka. Selain itu mereka juga menciptakan snack rumput laut untuk oleh-oleh bagi pengunjung yang datang ke Kepulauan Yapen.

GUNAKAN TEKNOLOGI UNTUK PEMASARAN

Masalah baru kemudian muncul karena Ros tidak tahu harus memasarkan mie buatan kelompoknya. Dia kemudian menawarkan mie kering rumput laut ke toko-toko di kota Serui namun ditolak karena harganya lebih mahal dibandingkan mie instan. Ros tidak habis akal, dia kemudian memfoto produk dan menjualnya secara online di media sosial miliknya.

"Saya belajar main Facebook. Saya foto dan unggah di Facebook. Tapi kendalanya tidak ada sinyal di kampung kami. Akhirnya setiap hari saya ke kota untuk upload foto dan memastikan apakah ada yang pesan mie rumput laut baik lewat inbox atau SMS," kata Ros. Pesan itu baru dibaca kalau ada sinyal. Dan ternyata ada yang pesan. Dari situ Ros dan teman-temannya semakin semangat untuk membuat olahan rumput laut. "Bukan hanya mie kering tapi juga stik rumput laut yang lebih tahan lama dibandingkan cendol dan puding," jelasnya.

Bahkan Ros permah melayani pembeli hingga Jayapura dan Jakarta. Setelah mie kering rumput laut semakin dikenal, akhirnya beberapa toko menerima mie kering dan stik rumput laut buatan ibu-ibu Kampung Sarawondori karena peminatnya cukup banyak untuk dibawa sebagai oleh-oleh khas dari Kepulauan Yapen. Ros berhasil meyakinkan pemilik toko untuk menjual produksi olah mereka karena mie dan stik asal Sarawondori banyak yang mencari. Saat ini, Ros dan kelompok Rawing Miorari setiap pekan memproduksi stik rumput laut sebanyak tiga kali, dan sekali produksi menghasilkan paling sedikit 130 kemasan. Sementara untuk mie kering rumput laut menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Jika cuaca hujan maka mereka menghentikan produksi mie keringnya.

"Kami ada oven untuk mengeringkan mie tapi hasilnya tidak sebagus mengeringkan dengan panas matahari. Kami menjaga kualitas. Tapi sebanyak apapun produksi mie saat ini selalu ada yang beli. Bahkan para pembeli langsung datang ke kampung kami," tutur Ros. Untuk stik rumput laut dijual Rp12.000 rupiah per kemasan sedangkan mie rumput laut dijual Rp20.000 untuk ukuran 400 gram. Ros juga memberikan pelatihan membuat makanan olahan dari rumput laut ke ibu-ibu di kampung lain yang beradi di Kabupaten Kepulauan Yapen.

SARJANA DARI RUMPUT LAUT

Isak Karubaba (42), nelayan di Kampung Sarawandori mengaku secara perekonomian sangat terbantu dengan kegiatan

pembuatan olahan makanan rumput laut yang dilakukan oleh para ibu rumah tangga di kampungnya. Isak Karobaba sendiri juga ikut menanam rumput laut jenis Ketomo yang dijadikan bahan utama stik dan mie kering rumput laut. Isak mengaku awalnya dia pernah panen rumput laut hingga 20 ton setiap panen namun sekarang turun sampai 5 ton sekali panen. Satu kilo rumput laut basah dihargai Rp3.000 sedangkan kering dihargai Rp7.000. Sementara ibu-ibu kelompok berani membeli rumput laut kering di atas harga itu.

"Istri saya, Novalina Wahana juga ikut tergabung dalam kelompok tersebut dan sangat terasa sekali hasilnya. Mereka buatnya juga di rumah sini. Tidak jauh-jauh keluar rumah jadi bisa mengawasi anak-anak," ujar bapak enam orang anak tersebut.

Isak sempat berhenti menanam rumput laut karena tidak ada pembelinya. Namun sejak lima tahun terakhir dia tetap menanam rumput laut walaupun tidak sebanyak dulu. Saat ini, dua anak Isak kuliah di luar kota, sementara adik-adiknya masih duduk di bangku sekolah SD, SMP dan SMA. "Saya mau anak-anak saya menjadi anak pintar. Jadi sarjana semuanya. Untuk biaya kuliah dan sekolah dari pekerjaan saya sebagai nelayan dan ibunya yang ikut kelompok membuat mie dan stik. Kadang jika tidak melaut, saya juga membantu mereka menyiapkan bahan utama rumput laut. Saya tidak masalah walaupun laki-laki tapi membantu para ibu," jelas Isak sambil tertawa.

Sementara itu Rosmina Karobaba (41), ketua kelompok Rawing Mairori mengaku jika dirinya sempat kuliah pada tahun 2010 dari hasilnya berjualan makanan olahan rumput laut. Saat itu dia berpikir, sebagai orangtua tunggal, ingin menjadi pegawai negeri sehingga bisa memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya. Ros lulus jadi sarjana pendidikan agama Kristen tahun 2014 namun dia memillih untuk menggeluti bisnis makanan tersebut karena hasilnya lumayan. "Ilmu saya sebagai sarjana bisa saya tularkan ke anak-anak sekitar sini tanpa harus menjadi guru. Saya sudah menabung agar anak saya satu-satunya yang saat ini masih SMA bisa melanjutkan kuliah setinggi-tingginya. Saya

ingin mematahkan pikiran bahwa orang sukses di Papua harus jadi pegawai. Tuhan penuh kasih telah memberikan berkah kepada kami dari rumput laut yang berasal dari kampung kami," pungkasnya. ●
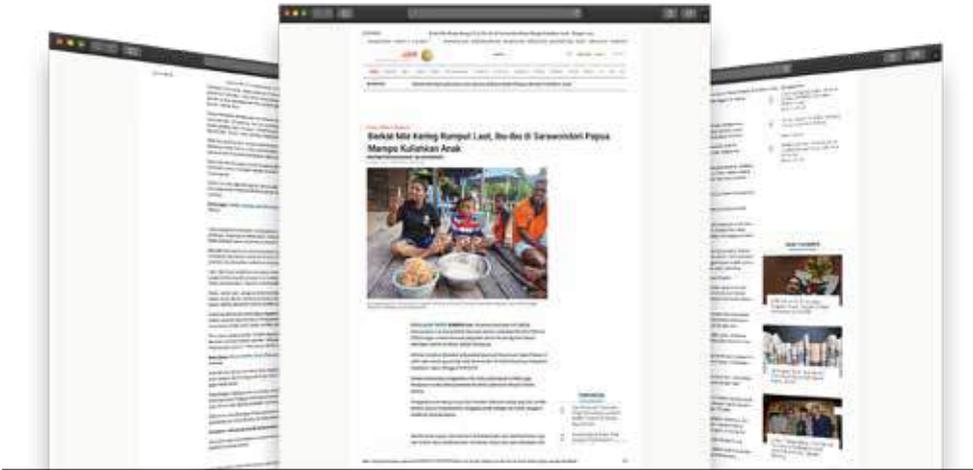
RAMAH - *Kabarpapua.co*
Adalah pria kelahiran Buton, Sulawesi Tenggara pada 3 Juli 1987. Tapi kini ia menetap dikota Jayapura, Papua. Ia sudah bekerja sebagai jurnalis sejak tahun 2010. Cintanya pada dunia jurnalistik membuatnya terus bertahan sampai sekarang. Saat ini Ramah menjalankan profesinya sebagai jurnalis di Kabarpapua.co, sebuah media online yang berbasis di Papu.

MANFAATKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI PELUANG USAHA

Ramah, Kabar Papua

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat khususnya perempuan.

Perempuan di Jayapura kini mulai memanfaatkan peluang pesatnya perkembangan ekonomi, termasuk ekonomi digital. Dengan itu mereka mampu menjadi akselerator peningkatan partisipasi perempuan dalam roda perekomomian.

Seperti yang dilakukan seorang pelaku UMKM asal Kota Jayapura, Silpa Marani yang memanfaatkan media sosial Facebook sebagai sarana penjualan hasil karya kerajinan tangannya.

"Untuk pembuatan biasanya kami beli bahan baku benang dan jarum apa adanya yang kami dapatkan di pasar tradisional. Pengrajin noken, anting-anting berbahan benang, dan tas," kata Silpa.

UKMK yang digeluti perempuan 28 tahun kini sudah mulai mewujud dan meningkatkan pendapatannya. Sedikit demi sedikit, ia mulai memberi kontribusi untuk pembangunan perekonomian di Kota Jayapura.

"Kami punya usaha baru berjalan sekitar satu tahun. Modal awalnya dari uang masing-masing. Prospek kedepannya, saya pikir itu bagus karena kami buat produk kami tidak kalah bersaing

dengan produk dari luar," kata Silpa.

Silpa mengatakan, ia membuat produknya sesuai dengan permintaan konsumen. Hanya saja, Silpa mengaku terkendala pada bahan baku, yang didapatkan harganya mahal, berbeda dari luar Papua seperti daerah Jawa yang harganya jauh lebih murah. Ia mencontohkan, misalnya akan membuat tas dari kulit, maka harga pegangan tangan untuk tas tersebut biasanya mencapai Rp75.000 per pasang.

DARI KETERTARIKAN MENJADI PELUANG USAHA

Silpa bercerita, awalnya ia tak tertarik membuat kerajinan tangan, apalagi sampai menjadi pengrajin. Namun karena melihat temannya diberikan pelatihan, Silpa tertarik untuk membentuk sebuah kelompok kerajinan tangan.

Dari situlah, Silpa mulai menekuni kegiatannya sebagai pengrajin. Tapi, walau hanya kerja sampingan namun cukup untuk meraup pundi-pundi rupiah dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Setelah Silpa merasa cocok dan menilai apa yang ia lakukan adalah hal bagus dan bisa juga untuk menjadi peluang usaha, lalu Silpa semakin serius membentuk satu kelompok dengan anggota sembilan orang. Ia juga mengajak adik-adiknya yang perempuan semua.

"Untuk penjualan satu tahun ini saya buat pembukuan sekitar Rp4 juta kami dapat. Yang penting ada untuk memenuhi kebutuhan. Biasanya sebulan dua sampai tiga pasang yang laku," kata Silpa.

Silpa semakin bersemangat, apalagi Silpa mendapat dukungan dari Disperindagkop setempat untuk menjadi binaan dalam pengembangan UMKM.

"Saya bersyukur karena di samping membantu kami punya kelompok, pihak Disperindagkop dan UKM kota Jayapura selalu datang untuk membimbing kami. Mereka suka datang menanyakan keadaan kelompok, seperti permasalahan atau kendala yang dihadapi," kata Silpa.

Selain itu, Silpa mengaku, mendapat dukungan dari keluarga karena ia sudah berhasil membuka lapangan kerja untuk adik-adiknya, sehingga mereka tidak harus minta kepada orang tua.

"Bisa menghasilkan uang sendiri. Kelompok kami masing-masing kerjakan produknya sendiri-sendiri, uangnya untuk sendiri juga, tapi masuk dalam kami punya laporan pembukuan kami," kata Silpa. ●

VESSY DWIRIKA FRIZONA - *Suara.com*

Lahir di Jakarta, pada 20 Juli 1988. Ia lulus dari Fakultas Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran," Jakarta, tahun 2010. Vessy baru memantapkan kariernya di dunia media sejak 2012 dengan bekerja di Bolanews.com. Ia juga pernah bekerja di Okezone.com, MNC Group, dan sejak Mei 2018 tercatat sebagai content creative di Suara.com.

EKSPLOITASI SPG, POTRET KELAM DARI BERATNYA KESETARAAN GENDER

Vessy Dwirika Frizona, Suara.com

Tak bisa dipungkiri pekerjaan sebagai Sales Promotion Girl (SPG) sangat rentan terhadap eksploitasi fisik dan pelecehan seksual. Seperti yang dialami seorang SPG bernama Tara Dianti (nama samaran). Sudah tiga tahun perempuan 23 tahun ini menjalani pekerjaan sebagai SPG. Setiap bekerja, Tara selalu menjaga penampilan, menjaga bicara, dan tak pernah lepas tersenyum. Tara mengaku kerap risih dengan pandangan genit pelanggan dan ucapan usil para lelaki yang menjadi target penjualannya.

Tara mengaku, bekerja sebagai SPG otomotif memang menyenangkan. Dalam sehari ia bisa mendapatkan uang minimal Rp500 ribu untuk waktu kerja selama enam jam. Baginya itu lebih menarik daripada harus bekerja di perusahaan yang terikat waktu formal kerja delapan jam dengan gaji standar Upah Minimun Regional (UMR) untuk lulusan baru fresh graduate sepertinya.

Bekerja menjadi SPG sejak kuliah, dara berambut lurus ini mengaku ketagihan. Karena dari hasil bekerja ia bisa membeli barang keperluannya dengan mudah, walau dengan risiko diganggu laki-laki ‘nakal’. Namun, dalam hati kecilnya, Tara ingin sekali bisa bekerja nyaman tanpa harus memasang senyum

palsu setiap kali digoda.

“Digoda-goda pelanggan laki-laki itu sudah jadi makanan sehari-hari. Diminta kenalan, dipandangi dalam-dalam, atau colek-colek sok akrab harus didahapi. Kami (SPG) tidak boleh melawan, apalagi marah-marah, karena itu dianggap tidak sopan. Padahal kami sudah dilecehkan,” aku Tara kepada Suara.com.

Ketika dirinya dipandangi tak biasa oleh lelaki demi produk yang dijajakannya dibeli, Tara terpaksa rela. Dia harus pintar-pintar menghindar dan kuat menahan marah meski emosi membuncah kepala dan sumpah-serapah sudah di ujung lidah. Lagi-lagi dara harus tetap senyum dan berusaha mengalihkan perhatian calon pembeli untuk fokus kepada produk yang dijajakan bukan dirinya.

Tak jarang Tara membiarkan nomor teleponnya dimiliki pelanggan dan akun Instagram-nya diketahui. Apalagi bagi pelanggan yang sudah membeli, tak enak jika dia menolak.

“Dimintai kontak pribadi itu juga sering. Biasanya saya lihat-lihat dulu orangnya, kalau pelanggannya sudah beli ya mau tak mau saya kasih. Kalau kira-kira tidak membeli dan kelihatannya cuma mau genit-genit saja, saya cari calon pelanggan lain sambil perlahan meninggalkan. Untuk yang menelepon biasanya menanyakan sudah punya pacar atau belum, tinggal dimana, sibuk apa, ya standar laki-laki kalau lagi pendekatan,” ceritanya.

Soal pakaian, sebagai SPG yang menjajakan produk otomotif, Tara harus memakai seragam yang diberikan koordinatornya. Modelnya mini dan melekat pas ke tubuh.

“Untuk pakaian sudah diberi tahu dan ditentukan dari awal, kalau sudah deal, ya harus pakai. Pakaiannya sudah pasti terbuka. Entah hot pants, baju you can see, ketat, rok mini, v-neck yang belahannya dalam, ya harus dipakai. Kalau tidak suka, ya tidak usah bekerja, yang artinya kita tidak dapat uang,” beber perempuan lulusan Ilmu Komunikasi dari salah satu universitas swasta di Jakarta ini.

Sebenarnya Tara tahu, risiko menjadi SPG bisa lebih buruk dari sekadar dipandang-pandang dan dirayu. Di lingkungan sesama

SPG, ada banyak teman Tara yang awalnya bekerja 'lurus' namun akhirnya berbelok sambil mencari tambahan. Sebab, memang banyak tawaran dan iming-iming hidup mewah dari pelanggan.

"Bagi yang suka atau tidak kuat digoda, banyak juga yang mau dipegang-pegang, diajak jalan, check-in setelah event. Karena itu sudah menjadi urusan masing-masing. Agensi atau supervisor kami tidak ikut campur. Bahkan untuk SPG yang sudah senior, gaya hidup mereka lebih highend daripada pekerja kantoran. Semua karena ditopang pelanggan, bisa lebih dari satu malah," ungkapnya.

Tara menyayangkan, tak ada pengawasan dan perlindungan terhadap pekerjaan honorer seperti SPG. Padahal dunia SPG sangat rentan eksploitasi fisik dan pelecehan seksual. Baik secara fisik, verbal, dan psikis.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2016, jumlah total buruh/karyawan/pegawai dari 17 sektor pekerjaan sebanyak 45,8 juta orang. Dari jumlah tersebut 29,3 juta diantaranya adalah laki-laki dan 16,4 juta perempuan. Tiga sektor pekerjaan yang didominasi perempuan antara lain jasa pendidikan 61,1 persen, jasa lain 62,4 persen dan jasa kesehatan dan sosial 67,9 persen. Sisanya, mengisi sektor pekerjaan yang kurang memiliki prestise dan tuntutan ketrampilan khusus. Pekerjaan perempuan sebagai Sales Promotion Girls (SPG) rokok dan minuman merupakan salah satu contoh.

Profesi di bidang promosi ini memang lekat dengan kesan 'hanya mengandalkan' modal fisik semata. Dengan alasan tuntutan pekerjaan, tidak jarang mereka harus berpakaian minim dan dandanan menor untuk menarik banyak pembeli dari pangsa pasar yang sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Pekerjaan dan penampilan mereka tidak jarang mengundang risiko pelecehan.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Trades Union Congress (TUC), sebuah federasi serikat pekerja di Inggris dan Wales, yang mewakili mayoritas serikat pekerja mengungkap, lebih dari 50 persen karyawan perempuan dilecehkan secara seksual di tempat kerja. Kebanyakan dari para perempuan korban pelecehan

tersebut mengaku tidak melaporkan kejadian yang mereka alami. Lewat survei yang dilakukan pada 1.500 wanita ditemukan ada dua bentuk pelecehan seksual yang dialami para perempuan.

Agensi Tak Ikut Campur Dunia Hitam SPG

Nasyath Faykar, pemilik Ijatzcadenza Agensi, sebuah agaensi model dan SPG di Jakarta membenarkan penampilan fisik merupakan syarat utama untuk dapat bekerja sebagai SPG. Ia mengungkap, kriteria pemilihan SPG yang akan dipekerjakan oleh perusahaanya sangat subjektif. Meski pekerjaan seorang SPG adalah menjual produk, tetapi tak ada seleksi uji kemampuan pemasaran atau negosiasi kepada calon pekerja.

"Syaratnya? Pasti cantik, setidaknya berpenampilan menarik. Itu pun standarnya tidak ada spesifikasi khusus. Tergantung bagaimana saya dan tim melihat, begitu pun klien kami yang akan menggunakan jasa SPG untuk produknya. Tetapi yang paling umum memiliki tinggi badan diatas 165 cm dan berat badan 45-53 kilogram, sudah selera pasar. Kami hanya melihat lewat foto yang dikirim, foto seluruh tubuh dan foto close up," ujar lelaki yang akrab disapa Ijat ini.

Lelaki yang sudah mengorbitkan beberapa selebriti ibu kota ini mengakui, dunia SPG memang kejam dan buram. Mereka yang dipilih, hanya mereka yang dianggap cantik. Perempuan bertubuh gemuk, kulit gelap, dan tidak menarik, maka tidak bisa jadi SPG. Walau mungkin mereka lebih luwes bicara dan pandai menawarkan produk. Begitu pula para SPG yang tidak mau ikut aturan, seperti berpakaian minim dan menyapa calon pelanggan, maka tidak lagi dipekerjakan. Termasuk yang melawan ketika digoda, juga berisiko masuk daftar hitam SPG.

"Minat perempuan muda berusia 18-23 tahun untuk menjadi SPG memang cukup banyak. Bahkan mereka yang berstatus sebagai mahasiswi dari universitas terkemuka di Jakarta pun senang bekerja sebagai SPG. Sejauh ini mereka kebanyakan SPG saya tidak begitu mempedulikan pelanggan yang genit-genit. Bahkan, memang ada yang bekerja dengan tujuan ingin diganggu supaya bisa dapat tambahan lain," bebernya.

Soal upah dan jam kerja yang rentan terhadap perempuan, Ijat mengaku tak ada aturan yang disepakati antara agensi dengan SPG. Tetapi memang tidak berpihak kepada pekerja perempuan. Perusahaan penyalur SPG pun tidak diikat oleh peraturan yang jelas oleh pemerintah dan ketegasan soal perlindungan terhadap pekerjanya.

"Tidak ada tuh, perusahaan agensi seperti kami tidak ada pengawasannya. Paling yang diawasi hanya sebatas pemenuhan hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja. Mengenai upah, aturannya dikurangi 20 persen dari total honor jatah SPG per-shift. Jam kerja pun berisiko sampai malam, bisa sampai di atas jam 10 malam. Untuk perlindungan perjalanan pulang, itu bukan tanggung jawab kami lagi sebagai agensi. Itu sudah masing-masing, ya dalam beberapa event ada klien yang mengantar pulang atau di drop di suatu tempat," ujarnya.

Mengenai pelecehan seksual yang sering dialami SPG, menurut Ijat itu biasa, dan tergantung sikap SPG-nya. "Ada yang senang digoda dan ada yang tidak senang. Namun, ada juga yang tujuannya memang mencari penggoda. Karena zaman sekarag, nggak di Jakarta, nggak di daerah memang begitu, perempuan maunya banyak, tapi inginnya mendapatkan secara instan," ujarnya.

"Kalau ada SPG yang merasa terganggu, ya tinggal bersikap saja, rata-rata mereka mengadu kepada koordinator atau agensi. Biasanya mereka suka diajak hangout, makan malam, check-in, bahkan jadi simpanan. Nah, kalau sudah begitu, maka diluar tanggung jawab agensi, itu urusan masing-masing. Kami biasanya hanya memberi arahan saja, 'ya kamu jangan mau'. Lagi pula sepertinya banyak yang sudah pada tahu (dunia gelap SPG)," celotenya panjang lebar.

Pada dasarnya, Ijat menyadari pekerjaan SPG memang rentan eksploitasi dan pelecehan seksual. Untuk menghentikannya memang sulit karena permintaan banyak dan minat yang ingin bekerja menjadi SPG sama banyaknya. Dan untuk memberantasnya hanya bisa dari keluarga masing-masing. Karena pergaulan SPG

memang negatif, mereka yang bekerja 'lurus-lurus' saja bisa terseret atau ikut serta masuk 'lembah hitam'.

"Banyak eksekutif muda dan om-om yang kebanyakan uang, mereka biasanya menyalurkan uangnya ke perempuan-perempuan itu. Ada pula perempuan yang mendambakan jadi simpanan. Mereka bisa dapat barang mewah. Kalau sudah masuk dunia hedonisme seperti itu tidak sanggup untuk hidup bokek," katanya.

Di sisi lain, Gadiza Sekarani (nama disamarkan) yang baru mencoba bekerja sebagai SPG rokok mengatakan sering cemas saat harus bekerja. Sebab, perempuan 21 tahun itu mengaku tidak biasa mendekati kumpulan laki-laki untuk menawarkan rokok. Namun, karena butuh uang dia nekat saja dengan dibantu temannya yang sudah berpengalaman.

"Ketika event-event awal saya memang takut, apalagi di acara-acara musik atau minuman yang banyak laki-lakinya. Nggak percaya diri rasanya, tapi dari jauh saya dipantau koordinator, kalau nggak jualan nanti ditegur," tuturnya.

Mahasiswi jurusan Informasi Teknologi (IT) di salah satu universitas swasta di Jakarta ini pun menceritakan pengalaman tak menyenangkannya ketika menerima pelecehan seksual yang sifatnya fisik dan verbal dari para calon pembelinya.

"Banyak laki-laki yang curi kesempatan saat kenalan atau memberi uang saat membayar, seperti pegang tangan dan colek-colek, kadang ada yang sok akrab langsung merangkul pinggul atau bahu. Ya, kesal sih, tapi katanya itu biasa dan kita hanya boleh menghindar secepat mungkin," ujarnya.

Pelecehan lainnya yang pernah dialami Gadiza juga datang dari atasan, supervisor atau koordinator. Sering kali itu lebih sulit ia hindari ketimbang menghindar dari pelanggan. Sebab, risikonya bisa kehilangan job atau honor tertahan.

"Ya, kalau dari atasan kadang suka ada juga yang iseng. Misalnya meminta kita duduk menyilangkan kaki di bangku tinggi saat pakai rok mini, itukan bikin paha kelihatan, alasan mereka supaya secara estetika enak dilihat saja," tutur Gidiza.

KOMNAS PEREMPUAN ANGKAT BICARA

Ketua Divisi Pemulihan Komnas Perempuan, Sri Nurherawati pernah mengatakan, strategi dagang yang diterapkan para pengusaha dengan mempertontonkan lekuk tubuh perempuan adalah salah satu bentuk eksploitasi. "Ya seperti itu adalah salah satu bentuk eksploitasi perempuan," seru Sri Nurherawati beberapa waktu lalu.

Para perempuan itu tidak menyadari telah dimanfaatkan oleh pengusaha untuk meraup keuntungan. "Sebenarnya itu sudah masuk human trafficking, karena sudah menjual bentuk tubuh manusia," tuturnya. Menurut dia, perlakuan itu dapat saja dipidanakan jika perempuan-perempuan itu mau melaporkannya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Kekerasan terhadap Perempuan, Thaufiek Zulbahary mengatakan, berdasarkan data secara umum 2018, tercatat sepanjang 2017, masuk 195 pengaduan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di tempat kerja.

"Pelakunya atasan kerja. Apalagi kasus yang terjadi terkait kekerasan seksual, fisik, psikis (seksual) perdagangan orang. Tahun kemarin yang terjadi pelecehan seksual di ranah komunitas, pelakunya lagi-lagi dari atasan kerja. Konteks dari SPG adalah refleksi dari pekerjaan perempuan yang mengacu pada kekerasan seksual, ini juga diatur dalam undang-undang," kata Thaufiek Zulbahary.

Profesi SPG sendiri ada akibat dorongan pasar. Eksploitasi yang terjadi bukan saja dari segi fisik, tetapi juga dari ekonomi, karena upah mereka dipotong agensi. Menurut Thaufiek, ini sebetulnya juga harus diawasi karena sangat melemahkan perempuan. Untuk mengatasi permasalah ini, masih banyak tugas yang harus dilakukan Komnas Perempuan.

"Sejauh ini yang bisa kami lakukan adalah mendorong adanya perlindungan hukum di semua ranah. Mendorong DPR mengesahkan RUU pelecehan kekerasan seksual, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS). Sehingga bila ada indikasi pelecehan seksual kapan pun dimana

pun ada dampak hukumnya, sehingga bisa mengurangi kasus," ungkapnya.

Untuk sekarang ini, yang bisa dilakukan agar proses hukumnya tepat adalah melapor. "Harus berani angkat bicara, seperti 'saya kan kerja, bukan mau hal lain'. Harus berani bilang, maaf pak, itu tidak pantas.' Hal seperti itu harus diedukasi. Sejauh ini di kelompok buruh termasuk buruh migran sudah diedukasi pemahaman indikasi yang mengarah ke hubungan seksual dan bila merasa ada ketimpangan koordinasi. 'Jangan mentang-mentang Anda manajer, bisa berlaku seenaknya.' Katakan seperti itu," paparnya.

Untuk para pekerja perempuan perlu adanya penguatan dan penyadaran tentang hak agar perempuan lebih berdaya. Thaufiek Zulbahary juga menambahkan, para pekerja perempuan harus peka terhadap modus-modus yang mengarah ke pelecehan seksual atau mengganggu keamanan kerja perempuan itu sendiri.

"Misalnya, apabila klien atau atasan mengajak 'lembur di atas', yaitu ajakan atasan atau klien untuk melanjutkan pekerjaan ke puncak (menginap), atau ada lagi yang namanya 'chatting sayang', percapakan antara klien atau atasan dengan pekerja perempuan tetap mengarah keajakan kencan. Contohnya menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi tetapi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Ujung-ujungnya itu bisa memojokkan pekerja perempuan untuk melakukan hubungan seksual. Hal itu rawan sekali di pabrik dan pekerja-pekerja honorer seperti SPG. Termasuk melakukan pekerjaan dengan posisi duduk yang membuat atasan dapat melihat area seksual atau memegang bagian tubuh seksual pekerja perempuan," ujarnya.

Thaufiek menduga modus-modus yang ia sebutkan diatas dilakukan juga di jenis-jenis pekerjaan seperti SPG. Entah dilakukan oleh atasan atau pelanggan. Apalagi pekerjaan SPG dikejar target, yang sangat mungkin membuat pekerja SPG mau memberikan nomor telepon. Dalam hal ini posisi mereka sangat lemah dan belum ada kebijakan yang melindungi.

Saat ini RUU PKS yang sedang diperjuangkan oleh Komnas

Perempuan meliputi 13 risalah kebijakan, yang meliputi hukum acara penanganan kasus kekerasan seksual, definisi atas beberapa frasa yang berkaitan dengan seksualitas, hak korban atas perlindungan, ketentuan pidana dan efektivitas, serta masih banyak lagi.

"Mengapa perlu pengaturan lebih khusus? Karena pelecehan seksual itu sangat luas, rumit sekali inplementasinya, berbeda dengan definsi perbuatan cabul yang mudah dibuktikan dengan adanya penetrasi. Nah RUUPKS yang dibuat Komnas Perempuan menyasar itu," jelasnya.

Tentang profesi perempuan yang mengandalkan fisik, Thaufiek mengatakan bahwa perbedaan gender itu harus dihilangkan. Perusahaan harus menerapkan standar bahwa bedanya laki-laki dan perempuan hanyalah alat kelamin dan alat reproduksi. Perusahaan seharusnya sudah menyeleksi pekerja hanya berdasarkan kemampuan atau skill.

"Menurut saya streeotype terhadap perempuan masih sangat memprihatinkan, apalagi di dunia kerja. Ketika perempuan dianggap lemah dan dianggap tak akan bisa melawan. Sudah seharusnya kita membuka pikiran bahwa laki-laki dan perempuan harus saling menguatkan agar dapat terwujud kesetaraan," imbuhnya. ●

YOHANES ADRIANUS RH - *NTTonline.co*

Akrab dikenal sebagai Adi Rianghepat. Ia lahir di Pen-fui, Kupang, NTT pada 22 Januari 1974. Adi lulus sebagai Sarjana dari Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia merintis karier sebagai seorang jurnalis sejak 2002. Ia tercatat pernah bekerja di Harian Umum Radar Timor, Radio Swara Timor, Harian Umum Fajar Bali Biro Kupang, Aktualita-NTT, LKBN Antara Biro NTT, dan sekarang memilih menjadi jurnalis paruh waktu di nttonlinenow.com.

POTRET PEREMPUAN ADONARA MENGGANTUNG ASA DARI BERKEBUN

Yohanes Adrianus, NTTonline.com

Hari masih sangat dini. Waktu saat itu menunjuk pukul 04.15 WITA. Hampir sebagian rumah kampung pelosok di Pulau Adonara tepatnya di Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur itu masih sepi. Ina (mama) Antonia Lua Boli sudah bangun. Ibunda dari Wulan, itu sudah menampi beras untuk ditanak sebagai sarapan bagi anaknya. Begitulah keseharian Antonia yang terus berjuang tanpa kenal lelah mempertahankan dan melanjutkan kehidupannya dan Wulan, anak semata wayangnya, sejak suaminya memilih merantau.

MENGGANTUNG ASA DARI BERKEBUN

Memilih berkebun dengan harus menantang kondisi alam Pulau Adonara yang kurang mendukung menjadi satu-satunya pilihan Antonia mengais makan dan rezeki demi menggapai asa hidup berdua bersama anaknya. Jika disuruh memilih, Antonia mengaku tak akan menjadi petani dengan kondisi alam yang sangat kering itu. Menjadi petani di Pulau Adonara sangatlah berat. Betapa tidak, pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, sebelah timur Pulau Flores dengan luas wilayahnya

509km persegi dan titik tertingginya 1.676 meter itu hanya dipenuhi pertanian lahan kering.

Kondisi geografis pulau yang termasuk Wilayah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dibatasi oleh Laut Flores di sebelah utara, Selat Solor di selatan dan memisahkan dengan Pulau Solor, serta Selat Lewotobi di barat serta memisahkan dengan Pulau Flores itu hanya bisa menghasilkan jagung, ubi atau singkong, serta tanaman perkebunan lainnya seperti kelapa.

Namun begitu, jalan ini harus dilalui Antonia meskipun berat. "Kondisi itulah yang telah memaksa saya untuk terus bekerja sekeras-kerasnya demi hidup saya dan anak saya," katanya. Dia mengaku, mulai berkebun sejak pukul 05.00 WITA usai menyediakan makan pagi untuk anaknya. Hal ini dilakukan agar tidak terlampau terik jika panas mulai datang menyapa. "Ya, saya harus berangkat pagi-pagi agar tiba di kebun masih pagi sehingga bisa mencangkul dalam keadaan tidak terlalu terik," katanya.

Lahan yang digarapnya tak juga luas. Tak luas setara hektaran, namun kebun peninggalan orang tuanya itu telah menjadi salah satu sumber penghidupan keluarganya. Meskipun masih sangat bergantung dari belas kasihan alam berupa hujan, namun di atas lahan itulah Ina Antonia menanam jagung, kacang hijau dan sejumlah tanaman umur pendek lain seperti pepaya, labu dan sejumlah sayur lainnya. Hasilnya dia manfaatkan sebagai bahan pangan rumahnya dan sebagian dia jual untuk mendapatkan uang bagi pemenuhan sejumlah kebutuhan dia dan anaknya.

"Hidup ini sangat berat dan keras. Saya tak bisa berdiam dengan kondisi yang saya alami ini. Saya harus terus bekerja demi kehidupan dan keberlanjutan keluarga saya," tuturnya tegas dengan rona wajah agak kusut dihiasi genangan air di pelupuk matanya yang tak mau dia teteskan. Kebun Antonia yang peninggalan orang tuanya itu berjarak hampir satu kilometer dari rumahnya. Jika musim hujan tiba, kebun itu bisa ditanami sejumlah tanaman selain jagun dan kacang tanah. Ada juga sayur-sayuran dan kacang hijau. Dari kebun itulah sumber penghidupan dan kehidupan Antonia dan anaknya. Hal yang

dilakukan Antonia setelah masa panen datang dan di saat musim menginjak kemarau, Antonia tetap melakukan aksi bersih-bersih sembari menanam sejumlah tanaman usia pendek seperti sayur dan pepaya. "Terpaksa saya harus menyediakan wadah penampung air untuk dimanfaatkan menyiram tanaman itu agar tanaman tetap tumbuh," katanya.

Selama hampir enam jam saban hari, Antonia harus bergelut di lahannya dengan cara yang masih tradisional, sebelum akhirnya dia harus mengaso untuk menyediakan makan siang untuk mereka berdua. "Ya, pola hidup saya itu saya lakukan saban hari dan sudah menjadi rutinitas sepanjang tahun dan selama saya hidup," katanya.

Dari dalam dapurnya, seadanya Antonia menyediakan jagung dicampur beras untuk ditanak makan berdua dengan anaknya. Sejumlah sayur yang sempat dia petik di kebunnya akan menjadi teman makan. Jika ada sedikit uang dia akan membeli lauk lainnya seperti ikan sebagai teman makannya dan anaknya. Lagi-lagi Antonia mengatakan, rutinitas itu dia lakukan sejak suaminya memilih merantau belasan tahun silam. Dan karena rutinnya Antonia lalu menyebut aksinya itu sebagai sebuah kewajiban.

"Ya, sudah menjadi aksi wajib saya tiap hari. Kecuali pada hari Minggu, karena saya harus beribadah ke gereja untuk menyerahkan diri dan berpasrah sembari mendoakan segala usaha dan kerja saya kepada Tuhan dengan penuh harapan akan mendapat berkat," katanya.

Antonia Lua Boli adalah yatim piatu yang terlahir dari kedua orang tuanya yang juga saban hari bekerja sebagai petani. Anak ke empat dari lima bersaudara itu tidak diwarisi sejumlah harta yang bisa memberikannya kehidupan yang nyaman. Saudara-saudaranya pun memilih merantau untuk terus menjalani kehidupan mereka masing-masing. Atas keputusan bersama saudaranya, Antonia lalu diminta untuk tetap berada di kampung dan terus merawat rumah tua sisa peninggalan orang tua dan sedikit tanah pertanian lahan kering milik keluarga untuk bisa terus bertahan hidup. Menikah dengan seorang lelaki Adonara

yang juga hanya bisa bertani tanpa lahan, telah mendorong suaminya untuk memutuskan merantau.

Pada awal pernikahan dan hidup bersama suaminya, keduanya masih bisa menalangi hidup dengan menggarap lahan peninggalan orang tua Antonia. “Ya, kalau hanya sekadar untuk makan kami berdua sangatlah mencukupi dari lahan yang ada meskipun masih sangat berharap hujan,” katanya. Namun hal itu mulai berubah, ketika mereka dikarunia anak. “Dia (Wulan) terus bertumbuh besar dan bersekolah dan tentu ada banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Hal itulah yang telah mendorong suami saya untuk merantau,” katanya.

Sepeninggalan suaminya ke tanah rantau itulah, Antonia harus ekstra keras bekerja, mulai bangun pagi mengurus kebutuhan makan anaknya dan setelahnya ke kebun untuk menanam (jika musim menanam) atau mempersiapkan lahan untuk menanti musim tanam tiba. “Masih sama sebenarnya rutinitas saya sejak masih bersuami maupun sejak dia (suami) merantau. Hanya sedikit berbeda karena sekarang saya hanya bekerja sendiri jadi sedikit lebih keras kerjanya,” katanya.

Antonia mengaku, hanya pekerjaan (berkebun) itulah yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan hidupnya dan anaknya, sambil menanti kiriman hasil jerih lelah sang suami di tanah rantau yang juga tak tentu. “Jujur saya tak bisa hanya menanti kiriman uang dari sang suami dari tanah rantau yang juga tak tentu waktu dan jumlahnya. Saya juga tak bisa berdiam dengan kondisi itu, maka berkebunlah pilihan saya,” katanya. Dan memang, menggeluti hari-hari sebagai ibu dari Wulan dan orang tuanya dengan berkebun sudah lumrah. “Kami memang dibesarkan dengan cara (berkebun) itu oleh mendiang orang tua saya,” katanya.

Memang, berkebun cara tradisional dengan hanya bergantung pada alam, sangatlah membutuhkan tenaga yang luar bisa keras. Sesekali, bantuan dan uluran tangan saudara-saudari sekandungnya dari tanah rantau dibutuhkan. “Ya, kadang saya harus meminta uluran tangan saudara untuk pemenuhan

kebutuhan sekolah anak saya," katanya. Hal untuk makan dan pangan dalam rumah tangga, tentu masih bisa menggantung kepada stok jagung yang tersedia. Namun kebutuhan Wulan yang sudah mulai bersekolah tidaklah sedikit. Langkah mendekatkan diri kepada belas kasihan dan uluran tangan saudara menjadi keniscayaan. "Beberapa kebutuhan anak saya Wulan tentu butuh duit dan itu saya harus meminta dari saudara. Itu sebuah hal lumrah dengan kondisi saya yang sangat tak bisa memiliki simpanan duit yang cukup," katanya.

BERSANDAR KEPADA KELOMPOK INFORMAL

Kondisi kerasnya hidup yang dialami Antonia telah mendorongnya harus bergabung dengan sejumlah perempuan lainnya di sebuah kelompok informal yang digagas bersama untuk menalangi kebutuhan hidup rumah tangga masing-masing mereka. Dia sadar bahwa hanya dengan menggeluti aktivitasnya sebagai petani di kondisi alam yang keras itu tak akan mampu memenuhi sejumlah kebutuhan anaknya yang terus bertambah usia.

Kelompok yang sudah hidup belasan tahun silam digagas sejumlah perempuan lainnya yang juga senasib karena ditinggal suaminya merantau itu telah menjadi wadah bagi para perempuan mengais sejumlah rezeki untuk mempertahankan hidup rumah tangga, sepanjang belum ada kiriman dari sang suami. "Saya kemudian tergerak dan bergabung dengan para perempuan lain di kelompok itu," katanya. "Saya sadar bahwa anak saya tentu terus bertumbuh dan tentu kian banyak kebutuhannya untuk sekolah," ungkapnya.

Di kelompok itulah sejumlah aktivitas para perempuan dilakukan. Mulai dari penyediaan jasa tenaga untuk bergotong royong membuka kebun warga lainnya, arisan beras dan uang serta jasa kerja lainnya dilakukan secara bersama-sama. Dari kerja bersama itulah, diperoleh sejumlah uang yang ditabung untuk selanjutnya disalurkan secara bergilir sesuai kebutuhan tiap-tiap anggotanya. "Kalau arisan kami gelar tiap pekan di hari Kamis

malam diawali dengan doa bersama," katanya.

Memang sedikit berbeda dengan jenis dan cara arisan di tempat dan kelompok arisan lainnya. Arisan yang dilakukan Ina Antonia dan 34 perempuan lainnya itu dilakukan sangat sederhana. Setiap anggota akan membawa uang senilai Rp1.000 setiap saat arisan dengan beras satu kaleng ukuran kaleng kecil bekas kental manis. Uang dan beras itulah yang kemudian akan disalur kepada setiap anggota yang membutuhkannya. "Bahkan kami juga mengumpulkan kayu api yang akan kami berikan kepada keluarga yang butuh saat akan ada acara adat atau acara keagamaan," katanya.

Semua aksi nyata perempuan-perempuan dalam kelompok itu berjalan apa adanya dan tak pernah henti. "Kami sangat menikmati aksi kelompok ini selain sebagai salah satu sumber tambahan penghidupan keluarga, kami juga bisa saling mendoakan dan saling menguatkan antarkami kaum perempuan yang ditinggal suami karena merantau atau meninggal dunia atau pergi menikah dengan perempuan lainnya," katanya.

Para perempuan di kelompok ini sadar betul bahwa memangku tangan dan menanti kiriman suami dari tanah rantau adalah sesuatu yang akan 'membunuh' perjalanan keluarga. "Hidup ini kan terus berjalan dan kami tak mau menanti saja kiriman dari suami yang juga belum pasti waktunya dan jumlahnya. Kami tak boleh berdiam dan kelompok inilah wadah kami berjuang," katanya.

Tak berbeda dengan Ina Antonia dan anggota kelompok perempuan lainnya, hal sama juga dilakukan Ina Barek Kewoon (65) dan empat perempuan lainnya yang tergabung dalam kelompok mereka. Sejak ditinggal suaminya di tanah rantau, Ina Barek memilih bergabung dengan empat perempuan lainnya yang senasib dan sepenanggungan membentuk kelompok perempuan tangguh itu.

Di kelompok ini, Ina Barek dan empat perempuan lainnya menawarkan jasa penyewaaan peralatan masak bagi warga kampung yang mengadakan pesta adat atau pesta pernikahan.

Selain itu, dengan memanfaatkan keahlian menenun, kelompok ini juga menawarkan jasa penyediaan peralatan adat bagi seremoni adat saat pernikahan, kematian dan atau seremoni adat lainnya.

"Karena sebagian seremoni adat memanfaatkan hasil tenunan maka kami menyediakannya dari hasil tenunan anggota kelompok. Kami mencoba memanfaatkan peluang di kampung ini karena semua hal di kampung ini selalu diselesaikan dengan seremoni adat. Kondisi itulah yang kami manfaatkan dengan menawarkan jasa ini," kata Ina Barek. Hasil jasa penyewaan itulah kemudian dikumpul lalu dibagikan kepada semua anggota kelompok dengan mekanisme yang sudah disepakti bersama. "Kami punya tata cara pembagian hasil jasa penyewaan yang kami tawarkan," katanya tanpa merincikannya.

Ibu dari lima anak ini mengaku sangat terbantu dengan kelompok yang sudah dirintis sejak 2009 silam itu. Memang tak mudah membangun kelompok tersebut untuk akhirnya terus eksis dan menjadi salah satu sandaran hidup keluarga masing-masing anggota kelompoknya.

TAK DILIRIK PEMERINTAH

Ina Antonia dan Ina Barek serta semua perempuan Adonara yang bernasib sama dan membentuk kelompok informal mereka, tak pernah kecut hati meskipun tidak dilirik pemerintah. Usaha yang mereka jalani, terus berjalan alamiah. Meskipun tergolong sebagai kelompok usaha kecil, namun kelompok informal para perempuan itu tak pernah terlirik pemerintah untuk diintervensi sejumlah bantuan.

Antonia dan Ina Barek bahkan mengaku tak pernah terkendala dalam menghidupi dan menggerakkan roda kelompok perempuan yang ada. Mereka bekerja secara mandiri memanfaatkan semua sumber daya dan tenaga yang mereka miliki. Meskipun demikian, perempuan-perempuan itu tetap tangguh menjalani semua aktivitasnya dan terus memepertahankan hidup keluarganya. "Tanpa bantuan pemerintah pun kami terus hidup dan bisa tetap

hidup sampai saat ini dengan kelompok kami," kata Ina Barek.

Dia mengaku, hidup ini terus berjalan meskipun dengan sejumlah beban yang berat jika dihitung. Namun demikian, tak akan bisa teratasi seluruh kebutuhan hidup yang ada jika hanya berpangku tangan dan menanti kiriman suami dari tanah rantau. "Saya dan anak-anak tak pernah berhenti makan dan berhenti untuk tidak pakai. Karena itu semua jalan halal di kelompok ini terus kami lakukan demi tetap hidup dengan martabat sebagai perempuan Adonara," katanya.

Kendatipun tak mendapat lirikan pemerintah, namun aksi para perempuan yang menggabungkan diri dalam kelompok-kelompok potensial itu ternyata mendapat apresiasi positif masyarakat, terutama para tetua kampung desa itu. "Kelompok-kelompok perempuan ini sudah berjalan sejak lama dan semacam 'warisan' dari para perempuan desa itu," kata Kopong Boli (76) seorang tetua kampung itu.

Dia mengaku kelompok-kelompok perempuan itu telah memberi kontribusi bagi desa tersebut. "Meskipun harus menyewa namun dengan penyediaan jasa yang ditawarkan akan sangat memperlancar semua seremoni hajatan yang dilakukan di kampung itu," katanya.

Hal lainnya, secara kasat mata, dengan kelompok itu, banyak anak dari para anggota kelompok itu yang bisa terus mengenyam pendidikan bahkan hingga perguruan tinggi. Sekiranya jika kelompok-kelompok ini juga mendapat tempat yang baik di mata pemerintah dengan sejumlah bantuan dana maka diyakini akan sangat membantu mempercepat pergerakan ekonomi para perempuan juga masyarakat desa ini. "Butuh perhatian pemerintah karena sejauh ini mereka (kelompok perempuan) bergerak secara mandiri dengan sumber daya dan tenaga yang mereka miliki," katanya.

Hal senada disampaikan Frans Bapa yang berharap agar intervensi pemerintah harus dilakukan. Apresiasi masyarakat tak bisa lepas dari intervensi pemerintah di kelompok-kelompok perempuan ini. Setidaknya kelompok-kelompok perempuan

tangguh ini ditempatkan sebagai salah satu bagian dari sasaran pembangunan desa. Jika demikian maka alokasi anggaran bisa merembes ke dalam kelompok perempuan ini.

Memang menjadi sulit katanya jika kelompok ini belum diformalkan sebagai konsekuensi dari pemanfaatan anggaran pemerintah yang hanya akan berlaku bagi kelompok-kelompok formal. "Yang saya lihat saat ini hanya kelompok formal saja yang menjadi sasaran intervensi pemerintah. Saya kira perlu dicari formulasi lain agar kelompok ini juga mendapat intervensi sama meskipun tidak harus sebanding," katanya.

Di titik itu, para perempuan yang tergabung dalam kelompok perempuan informal tak mau patah arang. Meraka terus bekerja dan menggerakkan kelompok perempuannya apa adanya. Yang ada di benak dan di mata mereka, bahwa kebutuhan anak dan keluarga harus terus dipenuhi setiap harinya. Seolah tak mau merengek ke pemerintah, roda organisasi informal itu terus digerakkan dan mendapat sambutan hangat masyarakat.

"Hidup ini sangat berat dan keras. Saya tak bisa berdiam dengan kondisi yang saya alami ini. Saya harus terus bekerja demi kehidupan dan keberlanjutan keluarga saya," kata Ina Antonia.

Setidaknya potret para perempuan tangguh Desa Pledo di Adonara, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini akan menjadi salah satu bagian dari gambaran betapa perempuan tak lagi menjadi subordinat dalam klaster kehidupan masyarakat yang masih lekat dengan tradisi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai yang pertama.

Perempuan harus menjadi yang setara dalam segala aspek kehidupan terutama dalam mempertahankan hidup keluarga. ●

Potret Perempuan Adonara
Menggantung Asa Dari Berkebun
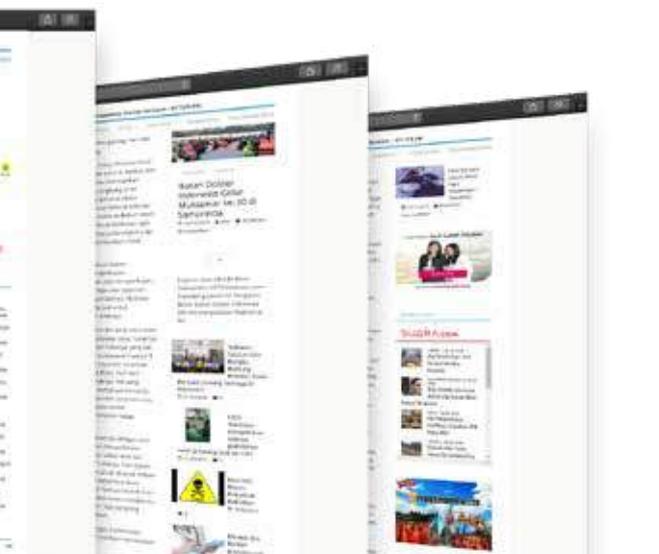
KATEGORI TELEVISI

Nominasi:
Ruang Kasih untuk Pejuang ASI
AGNES SINAMBELA, *DAAI TV*

Mama Jibu-Jibu Arumbae, Perempuan Pejuang Ekonomi dari Latuhalat
INSANY SYAHBARWATI, *iNews TV*

Perempuan Berdikari, Ekonomi Mandiri
SEKAR SARI INDAH CAHYANI, *iNews TV*

Kompetisi di Dunia Migas
ARIK TRI PANGESTUTI, *B-One TV*

Pemenang Terbaik:
Ruang Kasih untuk Pejuang ASI
AGNES SINAMBELA, DAAI TV

AGNES THESIA SINAMBELA - ***DAAI TV***
Lahir di Stabat, 6 September 1994. Perempuan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2015. Sejak tahun 2017 ia bekerja di DAAI TV, Medan sebagai reporter. Sampai sekarang Agnes melanjutkan kariernya di dunia jurnalistik. Tahun 2012 hingga 2014, ia memilih aktif di Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Fakultas Hukum Undip dan Asian Law Student Association (ALSA), Fakultas Hukum Undip.

RUANG KASIH UNTUK PEJUANG ASI

Agnes Sinambela, DAAI TV

Ruang laktasi ternyata masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Tak semua perusahaan menyediakan ruangan yang sesungguhnya tak membutuhkan ukuran besar ini. Padahal pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan dan kantor menyediakan ruang laktasi untuk karyawan mereka yang sedang menyusui.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, pada pasal 30 ayat 3 mengatakan, "Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan."

Tayangan DAAI TV ini membahas kondisi perusahaan di Binjai, Sumatera Utara yang belum menyediakan ruang menyusui dan bagaimana karyawati perempuan tetap berusaha menjaga asupan ASI untuk bayi mereka dengan tetap memerah ASI di ruangan-ruangan yang tak semestinya. Bahkan salah seorang ibu yang diwawancara memerah ASI di meja kerjanya.

Morina Natalia Tarigan, seorang PNS, mengaku ingin memberikan asupan gizi terbaik untuk anaknya. Itu sebabnya, meski kantor tak menyediakan ruangan yang layak, ia tetap memerah ASI. "Memerah ASI ini kan berhubungan dengan hal yang sensitif pada perempuan ya. Jadi teman pria juga suka mikir langsung negatif gitu. Dan itu yang menyebabkan mereka bully

saya secara verbal." tutur Morina.

Kisah Morina juga dibenarkan oleh Nur Azizah, 30 tahun, seorang pekerja swasta. Juga dibenarkan oleh Aida, ibu dua orang anak dengan profesi dokter, dan Jenny Simanjuntak, ibu dua anak yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Para perempuan pejuang ASI ini berharap memiliki tempat yang layak dan nyaman agar mereka bisa memberikan makanan terbaik bagi buah hatinya, karena adanya ruang laktasi yang higienis, nyaman dan layak. Bukan di ruang kosong, toilet, musala, atau meja kerja. ●

INSANY SYAHBARWATI - *iNews TV*
Lahir di Ambon, 18 Desember 1972. Ia lulus dari tiga kampus dengan peminatan yang berbeda, yaitu D-3 Teknik Informatika di Universitas Muslim Indonesia, Makasar, S-1 Teater Penyutradaraan, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, dan S-1 Ilmu Komunikasi, Universitas Terbuka. Saat ini Insany bekerja sebagai Station Manager iNews TV Ambon, dan Program Manager LBH Ambon. Selain bekerja sebagai jurnalis, ia juga menjadi aktivis, penulis buku, presenter, dan dosen.

MAMA JIBU-JIBU ARUMBAE, PEREMPUAN PEJUANG EKONOMI DARI LATUHALAT

Insany Syahbarwati, iNews TV

Karya jurnalistik untuk media televisi ini menceritakan tentang kegiatan perekonomian masyarakat adat negeri Latuhalat yang belum berdampak pada tingkat kesejahteraan. Cerita dalam karya ini menyajikan banyaknya problematika dalam kehidupan para jibu-jibu, mulai dari ditunggangi renternir berkedok badan usaha simpan pinjam koperasi hingga permasalahan lainnya. Karya ini juga mengulas tidak adanya pelatihan peningkatan kapasitas perekonomian bagi para jibu-jibu sehingga seringkali ikan yang dijual justru tidak stabil karena mengikuti kondisi pasar, serta pola penjualan tradisional yang masih mereka pertahankan.

Mama jibu-jibu Arumbae adalah lokal wisdom kegiatan perekonomian masyarakat yang khas di Maluku, salah satunya terdapat di Negeri Latuhalat, Pulau Ambon Maluku. Kegiatan perdagangan yang sudah dimulai pasca konflik Maluku ini menjadi satu-satunya cara menghidupi keluarga di desa pesisiran pantai ini.

Kekayaan laut di negeri Latuhalat yang berhadapan dengan Laut Banda yang terkenal memiliki kekayaan hasil laut yang berlimpah memudahkan nelayan unuk mendapat tangkapan ikan

yang berlimpah. Untuk menjual hasil tangkapan ikan tersebut setiap pagi sudah berjejer mama jibu-jibu yang menanti nelayan di tepi pantai.

Mama jibu-jibu dengan berkebaya Ambon, sudah mewarisi pekerjaan ini untuk berjualan ikan dari rumah ke rumah atau ke pasar Arumbae. Namun kondisi ini tidak lantas meningkatkan kesejahteraan mereka. Biasanya seusai melaut semalaman, para nelayan sudah bisa bersantai. Sedangkan para jibu-jibu adalah perempuan yang melanjutkan berdagang hingga ikan habis terjual.

Perdagangan tradisional ini hanya bisa menghasilkan kebutuhan sehari-hari namun tidak meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Diduga tidak adanya campur tangan pemerintah dari sisi pemberdayaan ekonomi dan bantuan pinjaman untuk modal usaha membuat para mama jibu-jibu itu sebagian akhirnya terlilit hutang. ●

SEKAR SARI INDAH CAHYANI - ***iNews TV***
Lahir di Tanjung Karang, 3 Juni 1981. Jurnalis perempuan asli Lampung ini adalah lulusan dari SMAN 3 Bandar Lampung dan FISIP Universitas Lampung. Sudah 14 tahun ia terjun dalam dunia jurnalistik. Masa kerja tiga tahun pertamanya adalah di media cetak, Lampung Post. Tapi setelah itu ia beralih ke media televisi. Ia pernah bekerja di Siger TV, Lampung TV, Sindotv, hingga akhirnya menjadi jurnalis di iNews sejak 2015 hingga sekarang.

PEREMPUAN BERDIKARI, EKONOMI MANDIRI

Sekar Sari Indah Cahyani, iNews TV

Ibu-ibu di Lampung Barat membentuk Kelompok Wanita Tani atau KWT. Organisasi ini memiliki tujuan memberdayakan perempuan secara ekonomi. Mereka bergerak dalam komoditas kopi, hasil tani yang masih menjadi andalan di Provinsi Lampung.

Sehari-hari sekelompok ibu ini akan melakukan pekerjaan rutinnya. Menampi, menggiling, dan membungkus kopi dalam kemasan-kemasan tertentu. Tekad mereka membara, menahan segala kondisi untuk niat mulia, bisa membantu keluarga.

Nurma, ketua kelompok KWT 'Mandiri', mengatakan setiap bulan kelompok tani yang ia pegang mampu mengolah 2,3 ton biji kopi. Omzet yang mereka hasilkan mencapai 60 juta per bulan. Setiap hari ratusan kilo biji kopi mereka olah. Dari peralatan sederhana, mereka terus berusaha.

Awalnya Nurma adalah buruh pabrik. Ia sering berkumpul sesama ibu. Hingga akhirnya terbersit keinginan untuk memiliki usaha, agar mereka jadi produktif dan mandiri. Maka mereka sepakat membentuk kelompok tani.

Dari hanya menggoreng biji kopi sebanyak lima kilogram untuk tiga bulan, kini KWT Mandiri sudah mampu memberdayakan diri. Kopi yang mereka produksi dijual untuk pasar lokal. Meski demikian, mereka masih ingin terus bergerak dan berharap bisa berkembang lebih dari sekarang. ●

PEREMPUAN BERDIKARI,
EKONOMI MANDIRI

ARIK TRI PANGESTUTI - *Media B-one TV, Bojonegoro*
Arik, sapaannya, lahir di Bojonegoro, 30 Desember. Saat ini Arik bekerja di media televisi B-one TV, sebuah tv lokal di Bojonegoro. Ia bekerja sebagai jurnalis di stasiun televisi tersebut sejak tahun 2012 dan berlanjut hingga hari ini. Selain di B-one TV, Arik juga sempat menjadi jurnalis di HaloBojonegoro pada 2012 hingga 2014. Selain aktif menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro, Arik juga menjadi anggota Forum Radio Bojonegoro.

KOMPETISI DI DUNIA MIGAS

Arik Tri Pangestuti, Media B-one TV, Bojonegoro

Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang letah geografisnya berada di paling ujung barat. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk di Kabupaten ini mencapai lebih dari satu setengah juta jiwa.

Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas Indonesia. Selain terdapat ratusan sumur minyak peninggalan zaman penjajahan Belanda, di kawasan perbukitan Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, juga terdapat sejumlah lapangan migas milik negara.

Sejumlah lapangan migas tersebut diantaranya lapangan Sukowati, lapangan Banyu Urip Blok Cepu, serta lapangan Jambaran Tiung Biru. Sejumlah lapangan migas tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja. Tidak hanya laki-laki, kaum perempuan juga tertarik bekerja di industri migas tersebut.

Rekaman ini mencoba memotret bagaimana pekerja perempuan di dalam dunia migas. Apakah mereka mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pengupahan, fasilitas kesehatan, juga kesempatan karir. Adakah diskriminasi, atau mereka sudah mendapatkan kesempatan yang setara dengan pekerja migas laki-laki? ●

Bojonegoro
KESETARAAN GENDER DI DUNIA KERJA
BOJONEGORO